

Pengembangan Masyarakat Partisipatif (Buku 1)

by Dumasari Dumasari

Submission date: 09-Jul-2020 06:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 1355162639

File name: DINAMIKA_PENGEMBANGAN_MASYARAKAT_PARTISIPATIF-Buku_1.pdf (1.21M)

Word count: 22357

Character count: 161547

DINAMIKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF

**OLEH
DUMASARI**

**PENERBIT UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH (UM)
PURWOKERTO PRESS
BEKERJASAMA DENGAN
PUSTAKA PELAJAR
YOGJAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati pertama penulis menghaturkan puja dan puji kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena berkat izi⁷nya jualah penyusunan buku ini dapat terselesaikan tanpa aral melintang. Penyusunan buku ini berawal dari kesadaran penulis tentang pentingnya pengembangan masyarakat digerakkan dengan pendekatan partisipatif secara berkelanjutan oleh berbagai pihak terkait dalam satu langkah kondusif dan terpadu. Untuk itu, tema yang ditetapkan berkenaan dengan dinamika pengembangan masyarakat partisipatif. Bahasan tema memang menarik karena langsung terkait dengan pokok per⁷alan nasional bagaimana upaya yang perlu dilakukan secara partisipatif untuk mencapai kelayakan hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan.

Buku ini disusun dalam enam bagian yang saling melengkapi. Keenam bagian tersebut merupakan cakupan bahasan teori dan konsep yang diperkaya temuan beberapa hasil penelitian terkait. Pada bagian pertama diuraikan mengenai ragam kondisi yang melatarbelakangi eksistensi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek strategis pembangunan. Bertolak dari kesadaran eksistensi tersebut maka pengembangan masyarakat mempunyai nilai urgensi tinggi yang penuh dinamika dan tantangan. Pada bagian kedua diuraikan tentang sederet fungsi strategis pengembangan masyarakat dengan cakupan ruang lingkup luas sehingga perlu dispesifikkan agar tepat tujuan dan tepat sasaran. Pada bagian ketiga dikemukakan uraian tangkai tujuan pengembangan masyarakat. Beberapa kriteria penentu juga dikaji guna kepentingan penilaian pencapaian tujuan. Bagian keempat diperuntukkan bagi bahasan prinsip dan etika sebagai suatu hal penting yang perlu dicermati oleh berbagai pihak khususnya perencana dan pengembang saat menggerakkan dinamika pengembangan masyarakat berbasis komunitas. Ragam permasalahan dan solusi pengembangan masyarakat termasuk bahan kajian yang disajikan pada bagian kelima dari buku ini. Bahasan mengenai perencanaan sosial yang merupakan titik tolak pengembangan masyarakat partisipatif akhirnya dikaji runtut pada bagian keenam sekaligus sebagai penutup. Beberapa bahasan penting lain yang terkait kelengkapan makna dinamika pengembangan masyarakat partisipatif akan dituangkan dalam karya buku berikutnya.

Berbagai pihak telah memberikan dorongan dan motivasi yang berarti kepada penulis agar tetap bersemangat menyelesaikan buku yang

sederhana ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan sejawat di Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada para rekan sesama peneliti dan pengabdian khususnya di lingkungan LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan LPPM Universitas Jenderal Soedirman yang bersedia memberikan ragam kritik dan saran bagai air mengalir. Tentu semua itu menjadi pemicu bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini tanpa patah semangat. Terimakasih juga juga dipersembahkan untuk suami tercinta Prof. Dr. Imam Santosa, M.Si dan putra tersayang Baginda Khalid Hidayat Jati serta kedua putri terkasih Dinda Dewi Aisyah bersama Anggita Chairiah, yang selalu setia mendampingi dengan sabar. Mereka selalu hadir menjadi reviewer, editor, motivator dan sumber inspirasi yang tak tak pernah kering bagi penulis.

Penulis menyadari, karya ini masih belum sempurna. Dengan demikian, saran, kritik dan masukan yang membangun selalu dinantikan datang dari sidang pembaca yang terhormat untuk bahan pertimbangan **3**erharga bagi penyempurnaan di kemudian hari. Penullis berharap semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak yang tertarik dengan permasalahan dinamika pengembangan masyarakat partisipatif.

54

Purwokerto, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
Eksistensi Masyarakat.....	1
Urgensi Pengembangan Masyarakat.....	9
Dinamika Pengembangan Masyarakat.....	13
BAB II. FUNGSI STRATEGIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT	22
Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat.....	22
Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat.....	28
BAB III. TANGKAI TUJUAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	37
Tangkai Tujuan Umum dan Khusus.....	37
Kriteria Pencapaian Tangkai Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	46
BAB IV. PRINSIP DAN ETIKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT	55
Prinsip Pengembangan Masyarakat.....	55
Etika Pengembangan Masyarakat.....	62
BAB V. RAGAM PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT	71
Identifikasi Permasalahan Pengembangan Masyarakat.....	71
Ragam Jenis Permasalahan dan Solusi Pengembangan Masyarakat.....	77
BAB VI. PERENCANAAN SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF	96
Memahami Perencanaan Sosial.....	96
Mekanisme Perencanaan Sosial.....	99
Berbagai Ciri Perencanaan Sosial Partisipatif.....	110

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2009-2013..... 12
2. Tangkai Tujuan Umum dan Khusus Pengembangan
Masyarakat melalui Pengelolaan Agribisnis Ramah
Lingkungan..... 42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Eksistensi Beberapa Kelompok Masyarakat.....	3
2. Trend Daya Adaptasi Pergeseran Pola Nafkah dari Pertanian ke Non Pertanian (Diolah dari Dumasari dan Watemin 2006).	6
3. Tiga Kriteria Masyarakat Sesuai Pemikiran Conyers (1994)...	8
4. Tahapan Pengembangan Masyarakat.....	20
5. Keterkaitan Hubungan Antar Komponen Inti Pengelola.....	23
6. Transformasi Sosial pada Proses Pengembangan Masyarakat (Freire, 1984)	28
7. Fungsi Pengembangan Masyarakat dalam Tiga Tahap Pemberdayaan (Wrihatnolo dan Didjowijoto, 2007).....	30
8. Proses Pengembangan Masyarakat secara Mandiri (Diolah Dari Dumasari, <i>et all.</i> , 2008).....	35
9. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat dalam Pembangunan Nasional.....	36
10. Beberapa Kriteria Pokok Pedoman Pencapaian Tangkai Tujuan Umum Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Agribisnis Ramah Lingkungan.....	49
11. Beberapa Kriteria Pendukung Pencapaian Tangkai Tujuan Pendukung Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Agribisnis Ramah Lingkungan.....	50
12. Lingkup Tangkai Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	52
13. Beberapa Etika dalam Peran Seorang Pengembang Masyarakat.....	69
14. Hubungan Permasalahan dengan Pencapaian Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	77
15. Jenis Permasalahan Berdasarkan Sumber Kejadian.....	80
16. Jenis Permasalahan Berdasarkan Kekuatan Dampak yang Ditimbulkan.....	83
17. Jenis Permasalahan Berdasarkan Sifat dengan Berbagai Ciri.....	85
18. Jenis Permasalahan Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Ragam Dimensi.....	88
19. Beberapa Permasalahan Rawan Terjadi pada Masyarakat....	90

20. JenisPermasalahan Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Sektor.....	94
21. Mekanisme Perencanaan Sosial Diadaptasi dari Burger and Duvel (1981).....	105
22. Mekanisme Perencanaan Sosial Diadaptasi dari Conyers (1994).....	109
23. Perencanaan Partisipatif dengan Teknik Belajar Arus Balik (Chambers, 1987).....	114
24. Siklus Perencanaan Pengembangan Masyarakat Partisipatif.....	115

BAB I. PENDAHULUAN

Eksistensi Masyarakat

¹ Pengembangan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk menolong anggota masyarakat yang sedang menghadapi beragam permasalahan dalam pencapaian taraf hidup layak dan berkualitas. Warga masyarakat yang potensial diaktifkan dalam pengembangan masyarakat terutama berasal dari kalangan yang sudah memiliki kesadaran, niat, tujuan, sikap keterbukaan, partisipasi aktif dan kesediaan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kemauan berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan masyarakat berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai kondisi dan kebutuhan riil dengan alternatif solusi yang tepat sasaran.

¹² Pengembangan masyarakat (*community development*) mencakup dua konsep penting yakni pengembangan dan masyarakat. Jika ditelusuri, ¹⁴ konsep pengembangan merupakan usaha atau upaya yang dilakukan bersama secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti: ekonomi, budaya, politik, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pertanian, pangan, kesehatan dan sebagainya. Pengembangan sebagai suatu proses bertujuan untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik, layak, beradab, bermartabat dan bermakna. Oleh karena itu, proses pengembangan ¹ memiliki dinamika dan kontinuitas dengan beragam faktor pengaruh disertai sederet konsekuensi bernilai positif berbentuk keberhasilan atau negatif berupa kegagalan.

¹ Pada setiap proses pengembangan perlu dilakukan langkah pengoptimalisasian berbagai potensi sumberdaya yang tersedia sehingga memunculkan keadaan baru lebih baik dan berkualitas dari sebelumnya. Pelaksanaan proses pengembangan juga memerlukan dukungan moril dan material yang integratif dari berbagai pihak. Tujuan pengembangan masyarakat perlu diperinci dengan jelas dan spesifik hingga terukur secara kualitatif dan kuantitatif. Sebelum membahas lebih jauh mengenai seluk beluk permasalahan pengembangan masyarakat maka terlebih dahulu dipaparkan eksistensi masyarakat dengan ragam kebermaknaan.

Penjelasan tentang batasan konsep masyarakat (*community*) telah dijelaskan oleh berbagai ahli. Soekanto (2007) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan ¹ kelompok warga yang terdapat di sebuah desa, kota dengan suku atau bangsa tertentu. Pada hakekatnya, masyarakat mulai terbentuk ketika sekumpulan orang dalam jumlah kecil atau besar hidup bersama memenuhi ragam kebutuhan di suatu wilayah dengan batas geografis yang jelas.

Pada kelompok masyarakat terdapat jalinan hubungan sosial (*social relationship*) yang lebih dekat hingga antara warga yang satu dengan lain akan saling mengenali. Interaksi antar sesama anggota masyarakat lebih tinggi dibanding dengan warga dari luar batas wilayah. Kekuatan interaksi ini disebutkan Soemardjan (1962) menjadi faktor utama dasar pembentukan masyarakat. Mayo (1998) mengartikan konsep masyarakat dalam dua pengertian berikut: (1) Masyarakat sebagai tempat bersama dan (2) Masyarakat sebagai kepentingan bersama. Eksistensi masyarakat dengan berbagai kepentingan di beberapa wilayah dapat teramati pada Gambar 1.



Gambar 1. Eksistensi Beberapa Kelompok Masyarakat

Hasil penelitian Santosa (2004) menunjukkan eksistensi masyarakat dapat diidentifikasi melalui karakteristik lokasi wilayah mukim sehingga dikenal masyarakat tepian hutan yang memiliki berbagai ciri sosial budaya dan ekonomi tertentu. Mayoritas anggota masyarakat tepian hutan mempunyai pola nafkah utama sebagai petani pembudidaya tanaman pangan. Pada awalnya sebelum terkena penetrasi pasar komersil, warga masyarakat tepian hutan mentaati nilai kearifan lokal yang bertujuan melindungi kelestarian sumberdaya hutan dari tekanan eksploitasi tindak keserakahan pihak tertentu. Akan tetapi setelah terpengaruh efek pasar komersil, kepedulian warga tepian hutan terhadap kelestarian sumberdaya hutan berkurang hingga seolah membiarkan dan membolehkan lingkungan hutan di sekitarnya desa dirambah dengan berbagai tindakan seperti:

penebangan kayu liar, penggundulan hutan, pemburuan satwa dan alih fungsi hutan ke kepentingan lain. Tak jarang, masyarakat tepian hutan turut menjadi tenaga kerja dalam berbagai jenis pekerjaan yang trawan merusak sumberdaya hutan. Santosa (2004) selanjutnya membedakan masyarakat tepian hutan dalam tiga kategori yakni: masyarakat tepian hutan negara, masyarakat tepian hutan swasta dan masyarakat tepian hutan adat. Berdasarkan lokasi mukim, ditemukan pula komunitas masyarakat tepian pantai, masyarakat tepian gunung, masyarakat pinggir danau, masyarakat desa, masyarakat sekitar perkebunan, masyarakat pinggiran kota, masyarakat kota, masyarakat bantaran sungai dan lainnya. Kesemuanya menunjukkan karakteristik tersendiri khususnya ditinjau dari sisi sosial, budaya dan ekonomi.

Identifikasi terhadap eksistensi masyarakat dilakukan juga berdasarkan konsentrasi mata pencaharian yang ditekuni mayoritas warga. Masyarakat petani merupakan salah satu kelompok warga yang memiliki kesamaan mata pencaharian di bidang pertanian. Ketergantungan masyarakat petani pada lingkungan alam sekitar relatif tinggi. Lahan menjadi aset pokok dalam pengelolaan usahatani didukung berbagai jenis sarana produksi lain. Masyarakat petani cenderung menetap bersama di wilayah pedesaan yang bercorak agraris. Meski demikian, ada masyarakat petani yang berada di perkotaan.

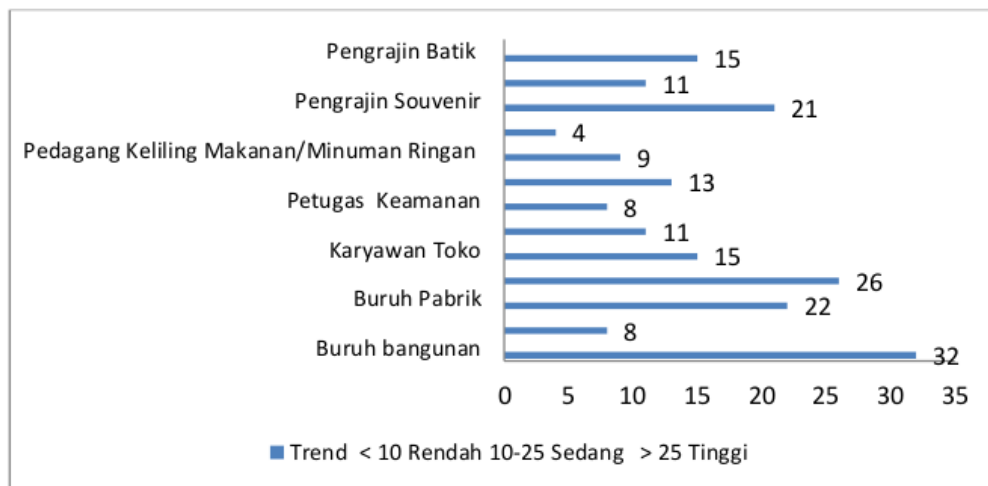
Eksistensi masyarakat sewaktu ketika bisa mengalami perkembangan baik berupa kemajuan ataupun kemunduran akibat berbagai hal yang erat kaitannya dengan perubahan yang berlangsung di lingkungan sekitar. Keterdesakan ekonomi dan tekanan sosial seringkali menuntut anggota masyarakat melakukan berbagai hal sebagai bentuk *coping strategies*. Sudrajat (2006) menyatakan *coping strategies* dilakukan seseorang atau

sebuah rumahtangga dalam mengatasi permasalahannya, yang diwujudkan dalam berbagai cara atau bentuk sesuai kemampuan, aksesibilitas terhadap sumberdaya lokal bersama dukungan lain. Oleh karenanya, *coping strategies* merupakan kekuatan yang berpotensi besar dengan berbasis pada sumberdaya lokal, sehingga patut diperhitungkan sebagai modal dasar dalam setiap upaya pengembangan masyarakat. Hasil penelitian Dumasari, *et all.*, (2007) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat petani yang melakukan penganekaragaman usaha produktif misalnya selain menekuni usahatani sekaligus mengelola usaha mikro *tourism souvenir goods* berbahan limbah hasil pertanian pada akhirnya dikenal sebagai kalangan masyarakat petani pengrajin.

Kekhasan ciri masyarakat petani sewaktu-waktu dapat mengalami pemudaran akibat pergantian mata pencaharian ke pekerjaan bidang non pertanian. Hasil penelitian Dumasari dan Watemin (2006) menunjukkan realitas *trend* pergeseran kerja produktif dari pertanian ke non pertanian yang berlangsung secara perlahan di wilayah pedesaan Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Akibat terkena berbagai tekanan ekonomi mendorong masyarakat petani beralih mata pencaharian ke kegiatan produktif di lain seperti buruh bangunan, supir ojek, buruh pabrik, pembantu rumahtangga, karyawan toko, pelayan restoran/hotel, petugas keamanan, petugas kebersihan, penjaja makanan/minuman ringan, petugas parkir, pengrajin souvenir, pengrajin sulam bordir, pengrajin batik dan lainnya. Deretan dampak pergeseran mata pencaharian tersebut memberi kontribusi bermakna terhadap eksistensi rumahtangga petani (buruh tani). Masyarakat petani yang melakukan alih nafkah pada

gilirannya dikenal sebagai masyarakat desa dengan keragaman status mata pencaharian di bidang non pertanian.

Anggota masyarakat dalam tata struktur sosial tertentu mempunyai daya adaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan yang terjadi. Daya adaptasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor sumberdaya yang tersedia. Beberapa sumberdaya yang turut menentukan kekuatan daya adaptasi ialah: potensi dan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya finansial (kapital), sumberdaya sosial, sumberdaya informasi dan sumberdaya transportasi. Bentuk daya adaptasi anggota masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya bermacam misalnya melakukan pergeseran pola nafkah dari pertanian ke non pertanian atau mengembangkan diversifikasi nafkah produktif. Setiap daya adaptasi tersebut memiliki trend tertentu. Pada Gambar 2 terlihat trend pergeseran produktif dari pertanian ke non pertanian sesuai hasil penelitian Dumasari dan Watemin (2006).



Gambar 2. Trend Daya Adaptasi Pergeseran Pola Nafkah dari Pertanian ke Non Pertanian (Diolah dari Dumasari dan Watemin 2006)

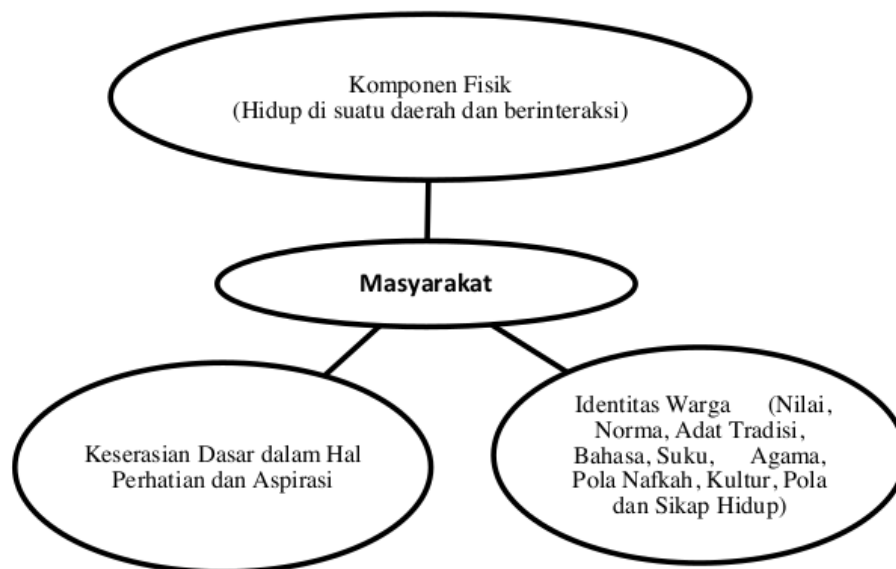
Awal kemunculan eksistensi sekelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu didasari beragam faktor. Beberapa faktor potensial yang melatarbelakangi bersumber dari hubungan seketurunan/ kekerabatan, ikatan perkawinan, kesamaan etnis, kesamaan tujuan hidup, kedekatan lokasi mukim dan kesamaan keyakinan. Dari eksistensi masyarakat lahir berbagai produk kolektif seperti budaya dan sentimen komunitas (*community sentiment*). Menurut MacIver and Page unsur sentimen komunitas yakni seperasaan dan sepenanggungan menunjukkan kebudayaan sekaligus identitas sosial (Soekanto, 2007). Unsur seperasaan menumbuhkan dan menguatkan pengidentifikasian diri dengan wujud kekamian. Perasaan kekamian muncul setiap ada kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan. Pada unsur seperasaan terdapat *altruism* yang mengedepankan solidaritas. Agar unsur seperasaan terjaga, individu perlu menyesuaikan perasaan pribadi dengan kepentingan kelompok agar terbentuk *image* diri sebagai bagian penting dari tatanan struktur sosial masyarakat.

Unsur sepenanggungan erat kaitannya dengan kesadaran individu sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peranan tersendiri. Sesuatu masalah yang dialami anggota masyarakat mempengaruhi peranan anggota lain hingga sesama warga saling peduli berusaha menyelesaikan persoalan bersama-sama. Unsur sepenanggungan menguatkan ikatan yang menyatukan masyarakat dalam kebersamaan saat mengalami ragam kejadian. Unsur sepenanggungan menimbulkan suasana kekompakan dalam menghadapi pengaruh dari luar sistem sosial.

Pada setiap kelompok masyarakat juga terdapat unsur saling memerlukan. Unsur ini dibutuhkan ketika memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang bersifat fisik (jasmani) dan rohani. Karakter manusia sebagai

makhluk sosial mendukung unsur saling memerlukan satu dengan lain. Pemenuhan kebutuhan fisik: pangan, sandang, papan dan kebutuhan psikologis: pertemanan, persaudaraan, saling menolong, saling melindungi, saling menghormati dan sebagainya berlangsung dalam struktur sosial masyarakat secara alamiah tanpa perlu direkayasa permanen. Gotong royong, kerja bakti, toleransi, tolong menolong *tepo seliro* termasuk deretan contoh konkrit kegiatan masyarakat yang memiliki sentimen komuniti.

Selain memiliki sentimen komuniti, kemudian Conyers (1994) mengemukakan pemikiran tentang konsep masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh Soekanto (2007) dan Mayo (1998). Conyers (1994) menegaskan saat mencari definisi masyarakat maka minimal harus dipikirkan tentang tiga kriteria yang saling berkaitan seperti teramati pada Gambar 3.



Gambar 3. Tiga Kriteria Masyarakat Sesuai Pemikiran Conyers (1994)

Pemikiran Conyers (1994) mengenai tiga kriteria masyarakat pada hakekatnya mengacu konsep PBB yang menyatakan masyarakat sebagai komunitas organis dan fisik secara implisit merupakan ²⁵ suatu kelompok yang mengadakan kontak secara langsung (*face to face*) dipersatukan atau diikat nilai dan objektivitas masing-masing dengan suatu keselarasan dasar (*basic harmony*) dalam minat dan aspirasi. Jika dikaitkan dengan pengembangan masyarakat maka sudah tentu istilah masyarakat lebih ditekankan pada tersedianya sistem pelayanan sosial kemasyarakatan yang bekerja tanpa pamrih atau imbalan ekonomis komersil dan tidak berciri birokratis. Hal inilah yang membedakan dengan unit pelayanan sosial kelembagaan komersil yang lebih mengarah pada imbalan ekonomis berciri birokratis seperti pada pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan keuangan, pelayanan informasi dan sebagainya.

Urgensi Pengembangan Masyarakat

¹ Penggabungan kedua konsep penting antara pengembangan dengan masyarakat sesungguhnya telah memberi makna berarti terhadap keberlangsungan proses atau dapat berupa metoda yang memungkinkan orang mampu meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat pengaruh terhadap ragam faktor penentu kehidupan yang dijalani (AMA, 1993). Makna pengembangan masyarakat dapat berupa upaya pelayanan yang menggunakan berbagai pendekatan dengan nuansa pemberdayaan (*empowerment*) secara serius memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan (Suharto, 1997).

Urgensi konsep pemberdayaan pada prinsipnya ¹ terlahir dari kemunculan ide untuk menempatkan manusia sebagai subjek dalam

dunianya sendiri bukan semata objek. Pengembangan masyarakat yang berorientasi pemberdayaan mempunyai dua kecenderungan yang perlu diperhatikan dengan seksama dengan fokus perhatian terletak eksistensi masyarakat. Kedua kecenderungan yang dimaksud adalah kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder.

Kecenderungan primer menunjukkan bahwa proses pengembangan masyarakat mengutamakan pengalihan atau pemberian sebagian dari kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada warga yang membutuhkan agar bisa lebih mandiri, produktif dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan. Kecenderungan ini tepat bila diterapkan pada masyarakat yang telah mempunyai kesadaran, kesiapan, kemauan, kebutuhan dan dukungan aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengembangan masyarakat yang direncanakan. Jika kondisi masyarakat belum siap maka pencapaian tujuan pengembangan masyarakat dengan kecenderungan primer akan sulit terlaksana. Sederet program pembangunan di bidang industrialisasi pedesaan mengalami kegagalan merealisasikan tujuan akibat ketidaksiapan masyarakat berpartisipasi sebagai subjek pengelola usaha produktif misal program pengolahan buah dan sayuran menjadi aneka pangan bergizi sebagai produk unggulan ekspor.

Pengembangan masyarakat dengan kecenderungan sekunder diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik melalui proses dialog. Kecenderungan sekunder perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sekaligus mengontrol alokasi fungsi sumberdaya yang tersedia untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan.

Pada pengembangan masyarakat dengan kecenderungan primer, sejak awal perencanaan kegiatan senantiasa membutuhkan kondisi warga tidak hanya siap secara teknis dan non teknis namun juga memiliki kemandirian dan keberanian mengelola potensi sumberdaya secara maksimal. Otonomi yang dipunyai warga harus lebih kuat pada kecenderungan primer dibanding sekunder. Pada kecenderungan sekunder, pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat belum dapat diserahkan langsung sepenuhnya kepada warga. Pendampingan tetap masih diperlukan untuk memunculkan kemandirian dan rasa memiliki dalam pencapaian tujuan.

Realisasi proses pengembangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang memprioritaskan unit rumahtangga sebagai sumber utama secara kolektif lebih efektif menghimpun beberapa kekuatan berikut: kekuatan sosial budaya, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan psikologis dan kekuatan fisik. Oleh karena itu, Twelvetreets (1991) mendefenisikan pengembangan masyarakat sebagai *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”* Lebih spesifik lagi, pengertian pengembangan masyarakat diartikan sebagai keragaman bentuk upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, status ekonomi, suku (etnis), budaya, gender, jenis kelamin, teknologi, ilmu pengetahuan, keamanan, keterjaminan pangan, kerawanan, kemarginalan, perlindungan hukum, usia, kecacatan, moral, kekayaan dan lainnya.

Salah satu ilustrasi dari hakekat pengembangan masyarakat terungkap dari kegiatan pemberdayaan masyarakat petani miskin di

pedesaan berlahan marginal melalui penerapan teknologi intensifikasi pertanian padi gogo di lahan kering dengan sistem tumpangsari. Hasil penelitian Santosa, *et al.*, (2009) menemukan bahwa penguatan mekanisme *livelihood diversification* pada masyarakat desa di Kawasan Wisata Banyumas dan Purbalingga termasuk bentuk *community development* yang efektif untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat ketunakayaan petani karena fungsi lahan pertaniannya yang sempit dikonversi untuk kepentingan pariwisata. Penguatan mekanisme *livelihood diversification* yang dilakukan beragam: mempekerjakan semua anggota keluarga (anak dan dewasa), memanfaatkan ³kesempatan kerja di bidang pertanian dan non pertanian, memanfaatkan potensi sumberdaya alam sebagai aset produktif, memanfaatkan potensi adat budaya sebagai produk bernilai ekonomis dan sebagainya.

Semakin diyakini, ¹²proses pengembangan masyarakat merupakan suatu model pembangunan yang bergantung pada aspek kemampuan manusia didukung ¹²potensi sumberdaya alam. Pernyataan ini sangat mendasar mengingat ¹²posisi manusia pada pengembangan masyarakat adalah sebagai pusat, titik pangkal dan sasaran akhir dari pembangunan sehingga tepat menempatkannya sebagai subjek pengelola utama (Cernea, 1988). Upaya pengembangan masyarakat dibutuhkan guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Pada setiap proses pengembangan ¹masyarakat diperlukan kejelasan dan kesesuaian antara tujuan dan kegiatan dengan permasalahan beserta ¹kebutuhan khalayak sasaran. Oleh karenanya, motor penggerak rangkaian kegiatan pengembangan masyarakat ialah masyarakat dengan segala keterbatasan dan potensi yang ada. ³Midgley (1995) mendefenisikan

pembangunan sosial sebagai proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan. Upaya pengembangan masyarakat termasuk pembangunan sosial yang dilaksanakan untuk melengkapi proses pembangunan nasional secara utuh terpadu dan terintegrasi. Untuk itu, upaya mengembangkan masyarakat senantiasa menuntut keseriusan dalam menyeimbangkan pemanfaatan beragam sumberdaya secara sinergis.

Dinamika Pengembangan Masyarakat

Pengkajian terhadap konsep dasar pengembangan masyarakat dapat dilakukan berdasarkan tinjauan teoritis dan praktis. Dari tinjauan sisi teoritis, dipahami bahwa dinamika pengembangan masyarakat berawal dari kegiatan pembangunan berorientasi ekonomi yang secara natural menjadi cita-cita bernegara dalam mencapai masyarakat sejahtera, aman, sentosa, adil, makmur dan merata. ¹ Wrihatnolo dan Didjowijoto (2007) mengemukakan pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ditandai dengan pencapaian tujuan peningkatan pendapatan, yang merupakan efek dari peningkatan produksi usaha. Keduanya menjelaskan beberapa asumsi pembangunan yang perlu diperhatikan berikut:

- (1) ²³ Kesempatan kerja dan partisipasi termfaatkan secara maksimal (*full employment*).
- (2) Setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh kesempatan bekerja secara produktif (*equal productivity*).
- (3) Setiap pelaku usaha mampu berperan dengan rasional dan efisien.

Dalam realitas sosial, beberapa asumsi pembangunan diatas tidak dapat terpenuhi dengan mudah. Banyak faktor kendala yang menghadang untuk mencapai kondisi *full employment*, *equal productivity* dan perilaku produktif yang rasional dan efisien. Beberapa faktor yang dinilai berpotensi menjadi kendala adalah:

- (1) Perbedaan potensi sumberdaya alam.
- (2) Ketidaksamaan kualitas, kinerja, produktivitas dan kreativitas sumberdaya manusia.
- (3) Aksesibilitas dan respon sumberdaya manusia terhadap kegiatan produktif berbeda.
- (4) Fasilitas informasi untuk kesempatan kerja produktif antar daerah diwarnai kesenjangan.
- (5) Daya adopsi teknologi berbeda.
- (6) Pelayanan pendidikan dan pelatihan kerja (*life skill*) bagi kepentingan peningkatan perilaku produktif sumberdaya manusia minim terutama di daerah marginal.
- (7) Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata antar wilayah.
- (8) Kesadaran, kemauan dan kesiapan (materi sekaligus non materi) antara kelompok masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan berbeda.
- (9) Akses terhadap fasilitas informasi pasar, harga dan modal cenderung rendah.
- (10) Keberpihakan pasar pada pemegang modal besar.
- (11) Koordinasi lintas sektor, antar bidang dan antar daerah dalam menangani pembangunan secara merata belum optimal.

- (12) Kemampuan menjalin hubungan kerjasama dan jaringan kemitraan berbeda antar kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya.
- (13) Dukungan dari lingkungan sosial yang berbeda antar wilayah baik yang bersumber dari masyarakat lokal, aparat pemerintah daerah, tokoh nonformal, pihak swasta maupun pihak pendukung lain.

Sebagai konsekuensi, terjadi distorsi pada pertumbuhan ekonomi dan pasar yang memungkinkan muncul permasalahan kesenjangan sosial ekonomi, kerawanan, keterisoliran, kemarginalan, pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ini mengancam kehidupan masyarakat di semua lini termasuk di sektor: perindustrian, perdagangan, pertambangan, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pariwisata dan sebagainya. Kesenjangan sosial ekonomi yang melebar pada struktur sosial masyarakat rentan dihadapi tidak hanya oleh warga pedesaan juga perkotaan. Kelompok masyarakat kaum gelandangan, kaum pengemis, kaum cacat, kaum tuna karya, kaum tuna kisma, kelompok anak jalanan yang tinggal wilayah kumuh muncul dalam jumlah yang tidak sedikit diantara kelompok warga elite yang tinggal di pemukiman mewah.

Para ahli mengklaim rangkaian permasalahan tersebut merupakan produk gagal dari pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi. Ketika era 1960-an, pembangunan Indonesia secara serius juga ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (*growth strategy*) yakni Produk Domestik Bruto. Konsep pembangunan yang dominan mengejar target pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Keadaan ini mengingatkan kita pada pemikiran Todaro (1994) yang mengemukakan bahwa pembangunan

merupakan proses multi dimensional dengan melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial dan institusi nasional. Oleh karenanya, setiap pembangunan tidak dapat dilakukan bila hanya diorientasikan pada pencapaian satu target misal diprioritaskan pertumbuhan ekonomi saja. Todaro (1994) menegaskan fungsi pertumbuhan ekonomi sebagai akselerasi pembangunan nasional perlu diiringi upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

Kelemahan lain dari pembangunan yang ditekankan pada pertumbuhan bidang ekonomi terkait masalah ketidakmerataan hasil sehingga dalam rentang waktu tertentu baru dinikmati sebagian elite masyarakat. Pernyataan ini senada dengan hasil penelitian Hayami dan Ruttan (1985) yang menemukan pembangunan berarus modernisasi seperti yang berlangsung di pedesaan Jawa membawa perluasan perekonomian uang dan pertumbuhan penduduk di atas sumberdaya pertanian yang terbatas. Sebagai konsekwensi, terjadi perubahan kelembagaan desa baik masalah hak milik lahan maupun kontrak kerja antara petani dengan buruh tani dan akhirnya memunculkan dilema ekonomi. Kedua peneliti ini kemudian menjelaskan temuan lain bahwa pembangunan ekonomi di pedesaan belum sampai menyebabkan terjadi proses polarisasi sosial namun baru mengakibatkan realitas stratifikasi sosial yakni pertambahan jumlah lapisan atau strata masyarakat sesuai kriteria ekonomi.

Polarisasi sosial berarti pengkutuban masyarakat di pedesaan menjadi dua yakni lapisan petani kaya (petani pemilik lahan luas) dan lapisan petani miskin (buruh tani/petani tunakisma). Pemilikan lahan pertanian subur di pedesaan makin kian terkonsentrasi pada segelintir elite dalam atau luar desa. Penyelesaian ragam permasalahan

pembangunan ekonomi dengan konsep *growth strategy* secara empiris telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan dan distribusi (*growth with distribution*), pembangunan dengan pendekatan teknologi (*appropriate technology*) dan *basic need development*.

Pembangunan dengan konsep *appropriate technology* pada awalnya dinilai lebih mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam. Akibat tekanan biaya teknologi yang tinggi, *appropriate technology* akhirnya mengarah pada pembangunan padat modal bukan padat karya. Pada masyarakat petani di pedesaan terjadi kerawanan sosial berupa peningkatan jumlah tenaga kerja yang menganggur. Beberapa kegiatan bertani diganti dengan teknologi yang serba mekanik. Hasil yang dicapai kurang memuaskan sehingga pendekatan pembangunan diarahkan ke penggunaan konsep pengembangan sektor informal dan *basic need development*.

Pembangunan dengan konsep *basic need development* menyediakan bantuan bagi pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat miskin. Kebutuhan minimum yang diberikan tidak hanya pangan, sandang dan papan melainkan juga kemudahan akses pelayanan fasilitas: pendidikan, kesehatan, transportasi, sanitasi, penerangan, air bersih, modal usaha dan lainnya.

Pembangunan *basic need development* berlangsung pada Tahun 1980-an. Model pembangunan ini dikenal sebagai motor penggerak pembangunan pedesaan. Kelemahan dari pendekatan pembangunan *basic need development* ialah tekanan khalayak sasaran yang terfokus pada masyarakat miskin di pedesaan. Hal tersebut menyebabkan hasil yang dicapai kurang efektif bagi masyarakat miskin di perkotaan. Demikian

juga keterjagaan kelestarian sumberdaya alam terabaikan. Di berbagai kawasan pedesaan, gejala kerusakan sumberdaya alam meningkat. Dalam rentang waktu yang tidak lama, kondisi yang memprihatinkan ini berpotensi mengancam keberlangsungan hidup generasi di masa mendatang. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut lalu muncul ide pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembaharuan berencana yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian. Sampai sekarang pendekatan pembangunan dengan konsep berkelanjutan relevan digunakan dalam mendukung berbagai bentuk program pembangunan nasional pada berbagai bidang. Keberpihakan yang pro pada kelestarian sumberdaya alam mendorong pendekatan ini ke penerapan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dari pengembangan beberapa konsep pembangunan yang dipaparkan, ternyata upaya pencapaian hasil yang ditargetkan khususnya untuk mereduksi angka kemiskinan tidak mudah mencapai keberhasilan memuaskan. Dalam beberapa dekade terakhir jumlah persentase masyarakat miskin tetap relatif tinggi. Pada Tabel 1 terlihat informasi jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2009-2013.

72

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun	Wilayah		Keterangan	
	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
2009	11,91	20,62	32,53	14,15
2010	11,10	19,92	31,02	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	12,49
2012	10,65	18,48	29,13	11,96
2013	10,33	17,74	28,07	11,37

Sumber: Diolah dari Data Biro Pusat Statistik Tahun 2009-2013

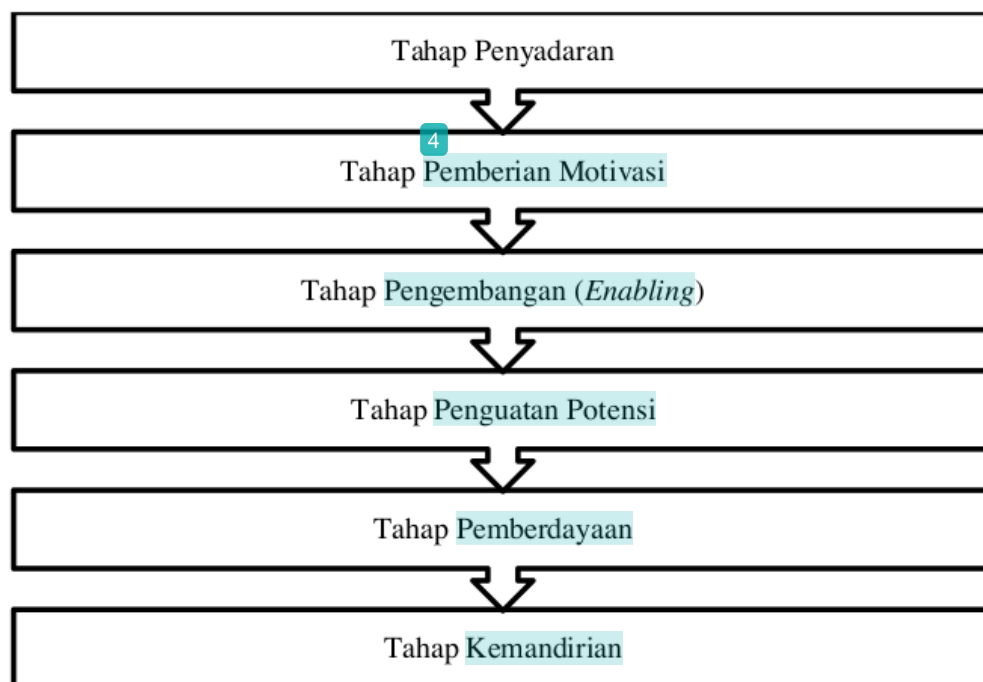
Laju penurunan jumlah penduduk miskin seperti terlihat pada Tabel 1 berlangsung lambat. Kalangan warga miskin yang terbesar diketahui berasal dari masyarakat petani kecil di pedesaan agraris dan nelayan tradisional yang bermukim di pedesaan pesisir pantai. Kualitas sumberdaya manusia dari kelompok masyarakat petani kecil dan nelayan tradisional rendah baik dalam hal: pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, daya saing, motivasi bekerja, pemilikan modal usaha, teknologi produksi, pemilikan lahan, kewirausahaan, kinerja, kreativitas, produksi, produktivitas, akses terhadap informasi harga dan pasar dan sebagainya. Untuk mengantisipasi permasalahan nasional yang serba kompleks ini akhirnya pembangunan diorientasikan pada konsep pemberdayaan (*empowerment*) atau disebut dengan istilah lain pengembangan masyarakat.

Konsep pemberdayaan atau pengembangan masyarakat secara teoretis dikembangkan dari dua perspektif yang sesungguhnya kontradiktif. Kedua perspektif tersebut antara pemikiran sosialis dari kaum Marxis dengan pemikiran kapitalis dari kaum demokratis. Seiring tuntutan zaman, pengembangan masyarakat dalam konteks penguatan sistem ekonomi pasar bebas dan “swastanisasi” ditekankan pada swadaya dan dukungan partisipasi informal bagi strategi penanganan masalah sosial baik ketertinggalan, kebodohan, keterbelakangan, keterisoliran, kemarginalan, kemiskinan maupun penindasan masyarakat tak beruntung.

Pengembangan masyarakat berintikan pemberdayaan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk menolong orang lemah tak berdaya (*powerless*) agar memiliki kekuatan dan keberdayaan melakukan perilaku

produktif kreatif untuk mencapai kondisi yang lebih layak, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup.

⁴ Pelaksanaan upaya pengembangan masyarakat umumnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai yang direncanakan secara sistematis dan partisipatif dengan khalayak sasaran. Beberapa tahap pengembangan masyarakat yang dimaksud tampak pada Gambar 4



Gambar 4. Tahapan Pengembangan Masyarakat

¹ Dari sisi praktis dipahami bahwa proses pengembangan masyarakat senantiasa diprioritaskan pada penanganan masalah keterbelakangan pendidikan, ketidakterjaminan kesehatan, kemerosotan moral, pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penggalangan

konsensus untuk mengatasi konflik sosial politik termasuk SARA diberbagai daerah. Masalah sosial lain yang secara praktis menjadi sorotan utama pengembangan masyarakat terkait dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah, korupsi, kerawanan pangan pada kaum *grass root*, konflik, perilaku menyimpang dan lainnya. Pada masa Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap dinamika pengembangan masyarakat mulai meningkat pesat khususnya saat memasuki Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam dan Ketujuh (1993/1998 hingga sekarang). Pada Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, secara praktis pengembangan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan bertumpu pada pencapaian tiga tujuan utama yaitu:

- (1) Penanggulangan kemiskinan.
- (2) Membangun bangsa yang mandiri.
- (3) Membentuk masyarakat sejahtera.

Upaya pengembangan masyarakat yang bersifat praktis perlu diarahkan agar partisipatif. Dari sisi praktis, pengertian pengembangan masyarakat lebih menuju pada suatu proses pemecahan masalah, pendewasaan dan pemandirian agar memiliki daya terlepas dari segala bentuk kebodohan, ketertinggalan, kekurangmampuan, kemarginalan, keterisoliran, ketakberdayaan dan kemiskinan.

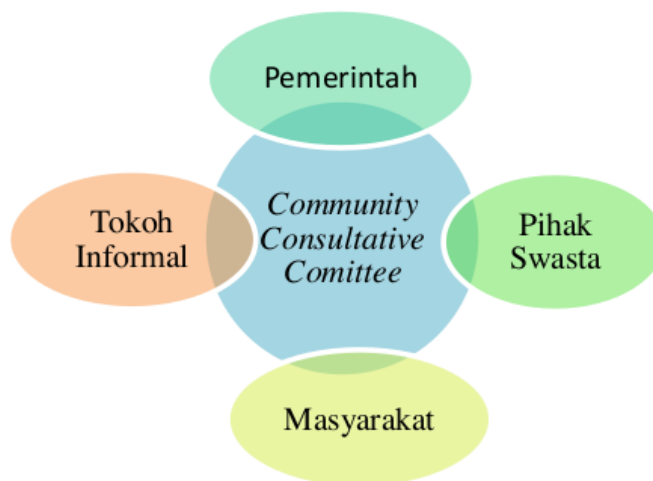
BAB II. FUNGSI STRATEGIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1 Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat

Cakupan ruang lingkup pengembangan masyarakat dapat dibahas pada tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro lingkup pengembangan masyarakat menyangkut kebutuhan dan permasalahan individu, kelompok, komunitas dan warga di wilayah regional tertentu dengan spesifikasi yang lebih sempit dan cenderung berciri homogen. Misalnya mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah pendapatan masyarakat petani di daerah pedesaan berlahan agraris dan nelayan di pedesaan pesisir pantai yang relatif rendah. Ilustrasi lain tercermati dari *bargaining position* petani tanaman pangan dan sayuran di daerah dataran tinggi tertentu yang lemah sehingga harus rela menjual hasil panen pada tingkat harga berapapun jua yang dipatok pedagang pengumpul. Realitas sosial ini sudah tentu tak mampu meringankan beban biaya produksi petani yang kian berat. Kenaikan pendapatan petani setiap panen bergerak lambat *nyaris* konstan tak bergerak atau malah menanggung rugi.

1 Berbeda dengan jangkauan bahasan pada tingkat makro, tentu menyangkut pemenuhan kebutuhan dan permasalahan masyarakat pada wilayah yang lebih luas, bercorak heterogen dan lebih kompleks. Umpama, kategorisasi kebutuhan dan perumusan alternatif strategi penanganan kerawanan pangan yang melanda masyarakat miskin di berbagai daerah pedesaan minus berlahan marginal dan tentu saja persoalan ini menjadi isu nasional.

Ruang lingkup bahasan pengembangan masyarakat sebagai suatu disiplin ilmu pada hakekatnya ¹ memusatkan perhatian tidak terbatas pada kajian masalah, kebutuhan, nilai dan norma sosial, modal sosial, kearifan lokal, pendekatan serta model yang berfungsi sebagai solusi bagi komunitas di wilayah tertentu. Akan tetapi, ruang lingkup pengembangan masyarakat juga menyinggung tentang berbagai upaya yang potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan strategi perubahan terencana, yang didisain sistematis dan profesional bersama dengan berbagai pihak ²⁴ terkait. Komponen pengelola pengembangan masyarakat mempunyai ²⁴ hubungan kerjasama yang erat dalam memberikan gagasan, ide, perhatian, dukungan, pendampingan yang saling melengkapi. ²⁴ Keterkaitan hubungan antar komponen inti pengelola pengembangan masyarakat dapat dicermati seperti yang tercantum pada Gambar 5.



²⁴ Gambar 5. Keterkaitan Hubungan antar Komponen Inti Pengelola Pengembangan Masyarakat

Ruang lingkup setiap proses pengembangan masyarakat juga mengedepankan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam gerakan atau upaya yang dilakukan untuk membantu warga keluar dari belitan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan atau ketidakadilan.

Pengembangan masyarakat termasuk pembangunan sosial yang *pro poor*. Midgley (1995) mendefenisikan pembangunan sosial sebagai proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan. Pelaksanaan pembangunan sosial khususnya pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk melengkapi keberlangsungan proses pembangunan ekonomi. Midgley (1995) selanjutnya menjabarkan ruang lingkup pembangunan sosial terkait pengembangan masyarakat sebagai berikut:

- (1) Proses pembangunan sosial termasuk pengembangan masyarakat tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi.
- (2) Pembangunan sosial termasuk proses pengembangan masyarakat mempunyai fokus kajian interdisipliner yang bersumber dari beragam bidang ilmu sosial. Gabungan dari berbagai disiplin ilmu sosial penting bagi pengembangan masyarakat karena disadari tujuannya bukan sekedar menangani masalah yang dihadapi masyarakat secara insidental kasus per kasus (*case by case*) namun lebih khusus lagi ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan taraf hidup masyarakat.
- (3) Dalam konsep pembangunan sosial yang mencakup pengembangan masyarakat tercermin dari gerakan alur keberlangsungan proses yang dinamis sehingga selalu ada perubahan berupa pembaharuan.

- (4) Setiap pembangunan sosial tak terkecuali pengembangan masyarakat merupakan proses yang bersifat progresif.
- (5) Pembangunan sosial termasuk proses pengembangan masyarakat memiliki target utama yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (kualitas sumberdaya manusia). Oleh karenanya, terdapat ciri *interventionist* atau diartikan perbaikan mutu kehidupan masyarakat hanya dapat tercapai bilamana pelaku perubahan melaksanakan beragam bentuk perubahan terencana berupa intervensi sosial.
- (6) Tujuan pembangunan sosial termasuk pengembangan masyarakat dapat tercapai melalui berbagai strategi yang langsung ataupun tak langsung berhubungan dengan intervensi kebijakan dan pembangunan ekonomi.
- (7) Pembangunan sosial tak terkecuali upaya pengembangan masyarakat lebih memusatkan perhatian pada populasi sebagai satu kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik. Pengembangan masyarakat tidak hanya memusatkan perhatian pada warga (individu) tertentu yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, realisasi pendekatan pengembangan masyarakat juga memberikan perhatian bagi warga yang tertinggal hingga kurang beruntung menikmati hasil pembangunan ekonomi seperti masyarakat petani miskin di pedesaan dan masyarakat pengangguran di perkotaan.
- (8) Tujuan dari pembangunan sosial ialah mencapai kondisi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau dikenal dengan istilah *promotion of social welfare*.

Upaya realisasi berbagai program pembangunan sosial yang menyerap pendekatan makro (*top down*) berbasis komunitas di berbagai level misal: lokal, regional, nasional dan internasional rawan mengalami penyimpangan tujuan dan sasaran. Hal ini dimungkinkan karena rangkaian kegiatan tak relevan dengan kondisi, kebutuhan dan permasalahan konkrit yang mewarnai struktur sosial masyarakat yang tengah menjadi khalayak sasaran strategis. Disamping pendekatan makro digunakan juga pendekatan mikro (*bottom up*) yang lebih berciri spasial umpama: masyarakat pedesaan (*rural communities*) yang dominan berpola nafkah sebagai petani.

¹ Pengembangan masyarakat diakui memiliki ruang lingkup luas. Menurut Freire (1984) salah satu inti dari pengembangan masyarakat sebagai usaha mengangkat rakyat dari kelemahan, kesempitan, kemiskinan, keterpencilan, kekumuhan dan ketidakberdayaan menuju keinsyafan, kemauan, kesadaran untuk bergerak berubah ke keadaan perilaku yang lebih berkualitas ialah melalui fase penyadaran diri (*conscienzazione*). Ife (1995) menjelaskan ruang lingkup pengembangan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan sosial meliputi tiga hal berikut:

- (1) Tingkatan atau derajat.
- (2) Sampai seberapa banyak kebutuhan masyarakat terpenuhi.
- (3) Sampai seberapa kesempatan meningkatkan kelayakan dan taraf hidup diperluas pada berbagai lapisan masyarakat.
- (4)

Tak terelakkan, bahasan ruang lingkup pengembangan masyarakat juga tidak terlepas dari keberhasilan perencanaan sosial yang

membutuhkan konsentrasi khusus pada tahap awal untuk kepentingan identifikasi tujuan riil yang mendesak dicapai. Beberapa faktor pengaruh baik yang berfungsi sebagai pendukung maupun penghambat termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari kajian pengembangan masyarakat. Beberapa faktor pengaruh yang dimaksud dapat berdimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, ideologi, lingkungan alam dan lainnya.

Partisipasi yang menyangkut kesertaan aktif warga khususnya dari kalangan *grass roots* (masyarakat termiskin) merupakan bagian penting dari bahasan ruang lingkup pengembangan masyarakat. Alasan yang melatarbelakangi pentingnya diadakan upaya pengembangan masyarakat beserta serangkaian dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan warga setelah kegiatan selesai menjadi salah satu bahan kajian yang tidak terlupakan termasuk cara pengukuran tujuan yang tercapai. Bagian lain dari ruang lingkup lain meliputi kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat diakui memiliki ruang lingkup luas. Meskipun demikian, perlu disadari sejak perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi dan monitoring kegiatan pengembangan masyarakat membutuhkan penetapan ruang lingkup yang lebih terfokus. Hal tersebut memudahkan bagi proses penetapan ¹ tujuan dan sasaran strategis yang lebih tepat. Freire (1984) menjelaskan salah satu inti dari keberlangsungan proses pengembangan masyarakat sebagai usaha mengangkat rakyat dari kondisi lemah ke kondisi kuat melalui transformasi sosial berupa pencerahan. Dinamika dari proses transformasi sosial tersebut teramati pada Gambar 6.



Gambar 6. Transformasi Sosial pada Proses Pengembangan Masyarakat (Freire, 1984)

Proses transformasi sosial yang berlangsung seiring pelaksanaan pengembangan masyarakat seperti tertera pada Gambar 6 bukanlah hal yang mudah dilakukan dalam waktu sekejap. Pengembangan masyarakat yang berfungsi sebagai jembatan penyeberang dari kondisi awal dengan berbagai kelemahan menuju ke kondisi baru yang lebih kuat perlu didasari seni dan sistem manajemen strategis. Pemanfaatan seni dalam pengembangan masyarakat erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung alamiah, humanistik dan kreatif menyenangkan berbagai pihak. Dengan sentuhan seni yang ditata sedemikian rupa mendorong tahap penyadaran dan pencerahan lebih mudah terlaksana karena terkesan tidak menggurui dan tanpa perlu tindak koersif.

Pengembangan masyarakat yang dikelola dengan manajemen strategis bermanfaat bagi optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia sebagai aset vital guna melangsungkan proses penyadaran, pencerahan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan. Dengan memanfaatkan manajemen strategis, pengembangan masyarakat terlaksana lebih sistematis dan logis bukan semata hanya sebagai rekayasa sosial yang kerap menimbulkan gegar budaya.

Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

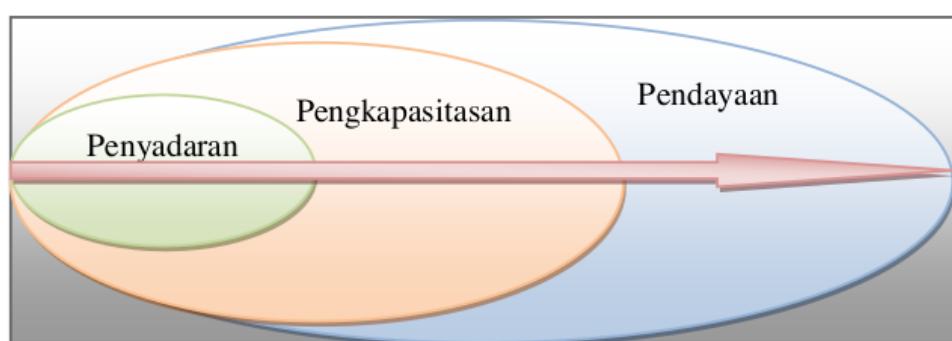
Pengembangan masyarakat mempunyai ragam fungsi strategis dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pendekatan pengembangan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti penting karena manusia ditempatkan pada posisi sebagai pengelola (subjek) sekaligus penerima manfaat hasil pembangunan. Pengembangan masyarakat merupakan paradigma baru dari pembangunan sosial yang meletakkan keberpihakan pada kaum lemah tak berdaya.

Tercapainya tujuan peningkatan taraf hidup dengan kemandirian dan keswadayaan menjadi kunci penentu bagi keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses pembangunan yang berpihak pada rakyat khususnya dari kalangan *grass roots*. Dengan menerapkan pengembangan masyarakat, ketertutupan berbagai masalah yang selama ini disembunyikan warga dapat diungkap untuk kepentingan penemuan solusi tepat. Warga tidak perlu lagi merasa berbagai masalah yang dihadapi sebagai suatu aib memalukan diketahui orang lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Santosa, *et al.*, (2007) menemukan realitas sosial bahwa pada awalnya tindakan warga miskin di desa mengganti beras yang kian mahal dengan singkong dan jagung

sebagai pangan pokok keluarga dilakukan secara tersembunyi karena malu dicap sebagai orang melarat (*wong mlarat*) sesuai persepsi masyarakat lokal. Setelah diadakan upaya pencegahan kerawanan pangan melalui pendidikan nonformal partisipatif untuk diversifikasi pangan berbahan baku non beras baru warga sadar makan singkong dan jagung ternyata termasuk bentuk strategi survival bernilai kearifan lokal hingga bukan lagi sebagai hal yang tabu. Dengan demikian, diyakini upaya pengembangan masyarakat memang memiliki fungsi yang urgen dalam mengembalikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam memecahkan masalah sendiri. Kesadaran masyarakat untuk bangkit menyelesaikan berbagai persoalan dengan potensi sumberdaya lokal dapat ditumbuhkan dengan memanfaatkan ragam pendekatan pengembangan masyarakat.

Wrihatnolo dan Didjowijoto (2007) mengemukakan bahwa proses pengembangan masyarakat berupa pemberdayaan merupakan sebuah proses berkelanjutan dan terencana bukan proses instan. Keduanya menjelaskan sebagai suatu proses berkelanjutan, pemberdayaan mempunyai fungsi strategis dalam membangun tiga tahapan pengembangan masyarakat seperti terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Fungsi Pengembangan Masyarakat dalam Tiga Tahap Pemberdayaan (Wrihatnolo dan Didjowijoto, 2007)

Berdasarkan informasi yang tersirat pada Gambar 7, semakin disadari ¹ pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity building*) hingga warga berdaya keluar dari jerat kondisi ketertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketakberdayaan dan kemiskinan. Pengembangan masyarakat bukan hanya berupa proses yang berfungsi menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat agar lebih mampu meningkatkan potensi menuju kemandirian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Beberapa fungsi strategis lain dari pengembangan masyarakat menurut Suharto (1997) ialah:

- ³ (1) Memberikan pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- (2) Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- (3) Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.
- (4) Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan

termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam dan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan diskriminasi dan ketelantaran melalui strategi-strategi pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, fungsi strategis pengembangan masyarakat juga menjadi jembatan bagi pencapaian tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam kehidupan di berbagai bidang pembangunan misal sektor: ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan hukum dan sosial budaya.

Beberapa fungsi strategis tersebut terlaksana sewaktu proses pengembangan masyarakat berlangsung secara natural dan relatif tanpa hambatan walau memerlukan waktu panjang. Pengembangan masyarakat yang efektif bukanlah sebagai proses instan yang dapat dilaksanakan secara mendadak tanpa persiapan. Payne (1995) mengutarakan rangkaian dari beragam kegiatan pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk: (a) ragam proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan berbagai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggungjawab.

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi mendorong dan melindungi tumbuh berkembangnya kekuatan ekonomi lokal, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pada kekuatan rakyat (Mahmudi, 1999). Fungsi tersebut tidak hanya terkait untuk mendayagunakan dan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya lokal untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat melainkan juga untuk melindungi hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam sesuai kebutuhan ekonomi dan kepentingan sosial.

Setiap proses keberlangsungan pengembangan masyarakat senantiasa membutuhkan kerjasama yang integratif antar beberapa pihak terkait dalam melaksanakan berbagai fungsi strategis. Meskipun demikian, pengembangan masyarakat perlu berlangsung secara alamiah dengan manajemen profesional tanpa rekayasa berlebihan hingga rawan menimbulkan gegar budaya. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan pemenuhan fungsi upaya pengembangan masyarakat seyogyanya sesuai dengan indeks campuran atau ukuran rata-rata prestasi yang distandarisasi oleh *Human Development Index* (HDI) yang mencakup tiga dimensi dasar berikut:

- (1) ³ *A long and healthy life*.
- (2) Pengetahuan (*knowledge*).
- (3) Kelayakan standar hidup (*a decent standard of living*).

Sifat dari serangkaian kegiatan pengembangan masyarakat senantiasa mencerminkan beberapa ciri berikut: konsistensi, holistik, preventif, tidak bias gender ⁵³ dan anti diskriminatif yang dibingkai semangat partisipatif dan pemberdayaan. Masih ada beberapa fungsi khusus lain dari pengembasnagan masyarakat yang perlu diperhatikan. Pengembangan masyarakat berfungsi efektif bagi pengendalian persoalan kemerosotan moral dan perilaku menyimpang, yang kemungkinan bisa terjadi suatu ketika menimpa sekelompok masyarakat di wilayah tertentu. Dari sisi kepentingan pengarusutamaan gender, kegiatan pengembangan

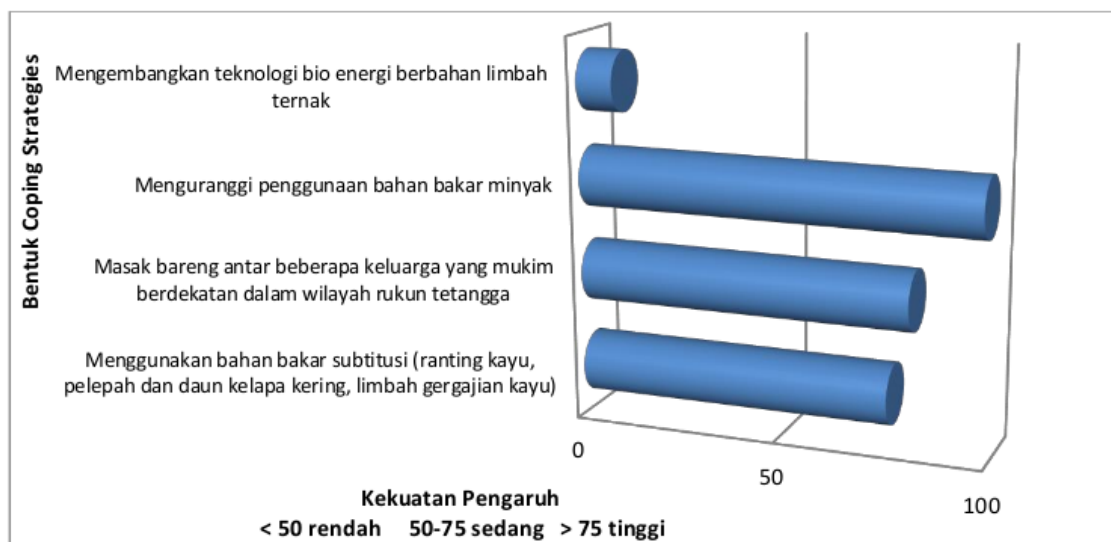
masyarakat minimal mempunyai enam fungsi strategis yang penting dicermati secara seksama yakni:

- (1) Menumbuhkan kesadaran bagi anggota masyarakat untuk hidup produktif dan kreatif dalam memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya lokal dengan berbagai kegiatan berbasis gender.
- (2) Menolong masyarakat agar memiliki akses dalam memanfaatkan sumberdaya guna mampu mengembangkan diri dengan tetap memperhatikan pengarusutamaan gender.
- (3) Memberi kesempatan dan peluang lebih merata bagi warga untuk berpartisipasi atas pemanfaatan sumberdaya tanpa bias gender.
- (4) Menyediakan ruang bagi warga untuk mengontrol ragam kegiatan pengembangan masyarakat berbasis gender atas segala pemanfaatan sumberdaya guna peningkatan kemandirian.
- (5) Kesetaraan gender dapat terpenuhi di berbagai bidang kehidupan tanpa menimbulkan konflik dan proses sosial yang cenderung bersifat kontradiktif khususnya dengan nilai kearifan lokal.
- (6) Menyediakan fasilitas pendampingan bagi masyarakat yang terkena perbuatan kesenjangan gender.
- (7) Mengajak masyarakat menghormati eksistensi gender sesuai kodrat Illahi.
- (8) Memberi pendampingan intensif terhadap anggota masyarakat yang sedang bermasalah dalam berbagai bidang kehidupan akibat bias gender.

Bertolak dari uraian berbagai fungsi strategis pengembangan masyarakat menunjukkan pentingnya *how to* untuk proses pelaksanaan di

berbagai bidang kehidupan termasuk hukum, politik, sosial, budaya, keamanan, ideologi dan ekonomi. Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dinamis berkelanjutan memiliki beberapa fungsi strategis untuk mengurangi bahkan sampai membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketergantungan yang sering berupa program bantuan sementara.

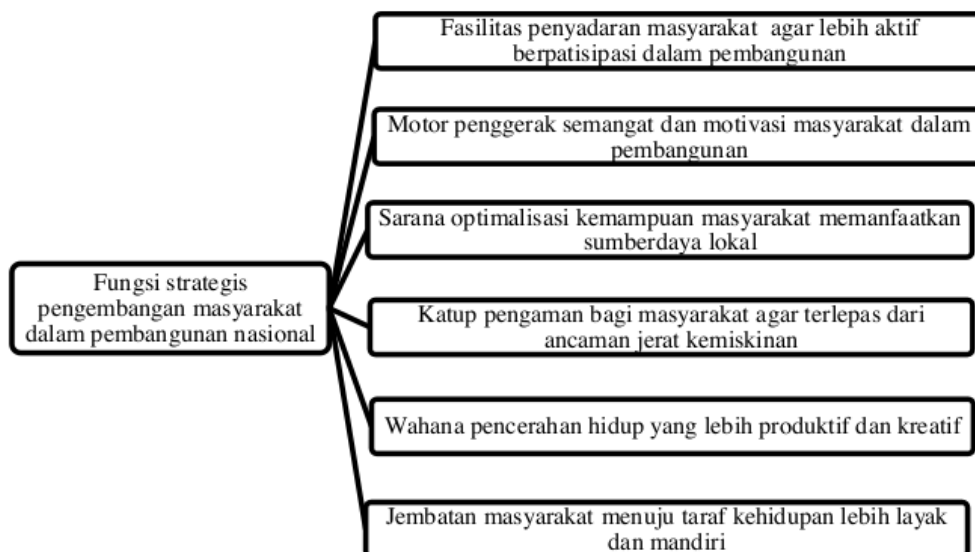
Hasil penelitian Dumasari, *et all.*, (2008) anggota masyarakat di pedesaan Banyumas ternyata menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak untuk memenuhi kepentingan hidup melalui beberapa bentuk *coping strategies* yang dilaksanakn secara mandiri. Menurut tim peneliti ini berbagai bentuk *coping strategies* yang dikembangkan responden merupakan realitas pengembangan masyarakat berarus bawah. Pada Gambar 8 terlihat beberapa bentuk *coping strategies* dan kekuatan pengaruh sebgaiian bagian dari pengembangan masyarakat secara mandiri.



Gambar 8. Proses Pengembangan Masyarakat secara Mandiri (Diolah dari Dumasari, *et all.*, 2008)

Pada kegiatan pengembangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan, teknik sosial yang diterapkan untuk memenuhi beragam fungsi strategis adalah lebih baik memberikan kail atau pancing daripada ikan. Pepatah tersebut tepat menjadi prinsip bagi pengembangan masyarakat karena kail atau pancing berupa pengetahuan/ ketrampilan/teknologi dapat digunakan membangun potensi diri dengan ragam aktivitas produktif kreatif. Sementara ikan (misal berupa dana atau barang bantuan) akan habis terpakai sekejap untuk dikonsumsi tanpa meninggalkan bekas apapun guna memenuhi kebutuhan selanjutnya.

Pengembangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk menjadi tonggak penguat bangunan kapasitas kemandirian warga. Beberapa fungsi strategis lain pengembangan masyarakat yang penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional tertera pada Gambar 9.



Gambar 9. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat dalam Pembangunan Nasional

BAB III. TANGKAI TUJUAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Tangkai Tujuan Umum dan Khusus

¹ Pengembangan masyarakat memiliki berbagai tangkai tujuan yang menjadi target capaian dalam selang waktu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian tangkai tujuan yang ditetapkan sejak awal kegiatan pengembangan masyarakat merupakan indikator terpenting untuk menentukan apakah pelaksanaan berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pengembangan masyarakat, rumusan tujuan menjadi petunjuk bagi penentuan arah dan tahapan langkah yang akan dilakukan.

Tangkai tujuan pengembangan masyarakat dibedakan berdasarkan berbagai dimensi yang melatarbelakangi atau hal yang menjadi sudut pandang masing-masing pihak penelaah. ⁷ Secara garis besar, tujuan pengembangan masyarakat dapat diperinci dalam kategori tujuan umum dan tujuan khusus.

Penjabaran tangkai tujuan umum cenderung bersifat universal dan menyangkut kepentingan bersama masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Pencapaian tangkai tujuan umum ditarget dapat terealisasi pada tahap akhir kegiatan pengembangan masyarakat. Upaya pencapaian tujuan umum merupakan suatu tolok ukur dari keberhasilan keseluruhan pelaksanaan rangkaian kegiatan pengembangan masyarakat. Setiap tangkai tujuan umum mengandung rincian beberapa tujuan khusus yang lebih spesifik terkait kegiatan tertentu. Tangkai tujuan umum disebut juga tangkai tujuan pokok atau inti.

Penetapan tujuan khusus dari pengembangan masyarakat bersifat spesifik dengan rentang waktu pencapaian lebih cepat dibanding tujuan umum. Rumusan tujuan khusus meliputi beberapa butir target yang direncanakan secara bertahap. Pada tujuan khusus, perincian target sasaran lebih jelas dan terfokus sehingga mudah ⁶⁸ diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan khusus menggambarkan kondisi pembaharuan yang diinginkan masyarakat yang tengah bermasalah untuk setiap kegiatan pendukung agar permasalahan dan kebutuhan teratasi secara bijak.

Penilaian terhadap keberhasilan pencapaian tangkai tujuan umum dan tujuan khusus dari pengembangan masyarakat boleh dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif atau kombinasi keduanya. Penilaian atau evaluasi terhadap pencapaian tangkai tujuan pengembangan masyarakat tidaklah mudah dilakukan oleh sembarang orang. Dalam upaya mendapatkan hasil penilaian yang objektif dan terpercaya sebaiknya evaluasi dilakukan oleh pihak independen bersama dengan masyarakat dan fasilitator.

Realisasi tangkai ⁹ tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tangkai tujuan umum dari pengembangan masyarakat ialah:

- Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.

- Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
- Meningkatkan kesempatan wajib belajar sermbilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
- 1 • Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumberdaya lokal.
- Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- Mengurangi angka pengangguran.
- Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.

- Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak tergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

1

Pencapaian tangkai tujuan umum pada hakekatnya dapat diperoleh setelah terlebih dahulu menyelesaikan tujuan khusus. Beberapa tujuan khusus yang bersifat spesifik dari kegiatan pengembangan masyarakat antara lain:

- ❖ Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di pedesaan.
- ❖ Memperkuat akses dan kontrol masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya lokal yang ramah lingkungan di kawasan tertentu.
- ❖ Meningkatkan pelayanan berbagai fasilitas seperti: pendidikan, kesehatan, sanitasi, modal kerja, air minum, penerangan listrik, teknologi produksi, pemasaran, transportasi, konservasi lahan dan air serta yang lainnya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermasalah.
- ❖ Mendampingi masyarakat yang bermasalah dalam pemenuhan kebutuhan.
- ❖ Membantu masyarakat dalam menemukan beragam alternatif solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

- ❖ Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) petani, nelayan dan pedagang kecil lain.
- ❖ Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produksi berkualitas yang sesuai dengan *trend* pasar.
- ❖ ¹Memperbaiki perilaku masyarakat ke kondisi yang lebih empati dan adaptif dalam menghadapi beragam masalah.
- ❖ Meningkatkan produktivitas kerja masyarakat di pedesaan.
- ❖ Meningkatkan kreativitas kerja masyarakat di pedesaan.

Beberapa tangkai tujuan umum yang diperinci di atas berorientasi pada pelaksanaan pengembangan masyarakat yang berpihak pada rakyat. Kesemua tangkai tujuan umum pengembangan masyarakat memiliki keterkaitan erat satu dengan lainnya. Artinya, pencapaian satu tangkai tujuan umum dapat memberi pengaruh langsung yang sangat berarti bagi terwujudnya tangkai tujuan umum yang lain.

Perumusan tangkai tujuan umum dan khusus dari setiap pengembangan masyarakat untuk tiap komunitas tidak serupa. Penetapan tujuan memerlukan spesifikasi yang khas sesuai permasalahan dan kebutuhan serta potensi yang tersedia. Tujuan tidak boleh menyimpang dari kondisi yang perlu dicapai untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Jika tidak berhati-hati dalam penyusunan tangkai tujuan maka dikhawatirkan akan terjadi bias atau penyimpangan hingga dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat mubazir karena tidak sesuai dengan harapan. Sebagai ilustrasi, pada Tabel 2 diuraikan ilustrasi sederhana perincian tujuan umum dan tujuan khusus dari kegiatan pengembangan masyarakat di pedesaan melalui pengelolaan agribisnis ramah lingkungan.

Tabel 2. Tangkai Tujuan Umum dan Khusus Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Agribisnis Ramah Lingkungan

Tahapan Kegiatan	Tujuan Umum	Tujuan Khusus
1. Penyadaran masyarakat desa pentingnya pengelolaan agribisnis ramah lingkungan 2. Pengadaan diskusi bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa untuk pengelolaan usahatani berbasis agribisnis ramah lingkungan 3. Pelatihan berbagai usahatani agribisnis ramah lingkungan 4. Pendampingan (advokasi) terhadap masyarakat dalam pengelolaan berbasis agribisnis ramah lingkungan	Memberdayakan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui pengelolaan agribisnis ramah lingkungan (Mengingat jangka waktu kegiatan pengembangan masyarakat desa ini berlangsung selama satu tahun maka pencapaian tujuan umum ditarget berhasil pada bulan keduabelas)	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa pentingnya pengelolaan agribisnis ramah lingkungan (Tercapai bulan kedua) 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan untuk pengelolaan berbasis agribisnis ramah lingkungan (Tercapai bulan kelima) 3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa mengelola berbagai jenis berbasis agribisnis ramah lingkungan (Tercapai bulan kedelapan) 4. Menumbuhkan kemandirian masyarakat mengelola agribisnis ramah lingkungan (Tercapai bulan keduabelas)

Ketika pengembangan masyarakat yang dikaitkan dengan pemberdayaan petani melalui pengelolaan agribisnis ramah lingkungan, maka tujuan yang ditetapkan harus konsisten dari awal hingga akhir kegiatan. Kinerja sistem agribisnis yang sangat menonjol pada situasi perekonomian baik normal maupun krisis telah mengukuhkan keyakinan para ahli ekonomi pertanian bahwa sistem tersebut tepat dijadikan sebagai strategi besar (*grand strategy*) pembangunan ekonomi nasional (Sitorus, *et al.*, 2001). Keyakinan para ahli ekonomi pertanian tersebut selintas memang rasional karena konsep agribisnis yang digunakan melewati batas

bidang pertanian primer. Agribisnis dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dipandang sebagai sistem yang saling terkait antara industri, perdagangan dan jasa. Untuk itu, tanpa ragu Saragih (2001) menyatakan agribisnis berpotensi besar sebagai penghela pembangunan nasional.

Saragih (2001) mengemukakan upaya pengembangan agribisnis bertujuan untuk ⁶ mentransformasikan perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian (*agricultural based economy*) dengan produk utama *natural resources and unskill labor intensive* kepada perekonomian berbasis pertanian industri (*agroindustry based economy*) dengan produk utama bersifat *capital and skill labor intensive* dan kepada perekonomian yang berbasis inovasi (*innovation based economy*) dengan produk utama bersifat *innovation and skill labor intensive*. Dengan rincian tujuan umum yang demikian menunjukkan pengembangan agribisnis sebagai lokomotif pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian hanya terfokus pada transformasi pembangunan pertanian yang mengedepankan modal (*capital driven*) dan inovasi (*innovation driven*).

Pemusatan perhatian pada unsur ekonomi dan teknologi sebagai wujud inovasi tetap mendominasi pengembangan agribisnis merupakan kelemahan karena kurang menaruh perhatian pada pentingnya penyertaan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama (*human driven*). Selain itu, para sosiolog memandang pengembangan agribisnis secara bertahan bersifat elitis dalam arti cenderung memihak pada kepentingan pengusaha pertanian elit yang menguasai modal besar. Menurut Sajogyo (1989) implikasi yang demikian telah terjadi pada saat Revolusi Hijau, dimana dalam proses pembangunan pertanian sistem agribisnis kemungkinan besar akan meninggalkan mayoritas masyarakat petani yang miskin.

Dalam merespon permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dikedepankan oleh para sosiolog adalah pengembangan agribisnis berbasis komunitas atau dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk pengembangan masyarakat melalui pengelolaan agribisnis ramah lingkungan. Jika dikaitkan dengan ilustrasi pembangunan agribisnis maka terdapat ¹ beberapa tujuan umum lain dari pengembangan masyarakat yakni:

- Mengentaskan kemiskinan masyarakat petani khususnya di pedesaan.
- Meningkatkan mutu sumberdaya manusia pada masyarakat petani.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat petani.
- Membangun ekonomi berwatak sosial dan bermotif kerakyatan seperti: koperasi, usaha kecil menengah, usaha mikro di tingkat rumah tangga dan sebagainya.
- Peningkatan kemampuan dan produktivitas sumberdaya agribisnis yang dimiliki atau dikuasai rakyat.
- Peningkatan keorganisasian ekonomi rakyat berbasis sumberdaya lokal.
- Penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan agribisnis untuk membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan komparatif.

Pengembangan masyarakat dan dunia usaha yang menjadi isu kunci dalam pelaksanaan program pembangunan di semua sektor semestinya berjalan beriringan dengan tujuan yang tidak jauh berbeda. Jika diterapkan secara sistematis maka bangunan sistem agribisnis yang ramah lingkungan mempunyai peranan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang memihak petani tanpa membedakan strata. Melalui pengembangan sistem agribisnis, petani lebih mudah mencapai efisiensi pengelolaan usahatani. Dari hasil penelitian Dumasari dan

Sulistyani (2001) diketahui bahwa beberapa tujuan khusus dari pengembangan masyarakat melalui pengelolaan agribisnis ramah lingkungan ialah:

- Mengembangkan peran agribisnis sebagai organisasi dan manajemen yang dirancang secara rasional agar mampu meningkatkan kemampuan petani dalam mendapatkan nilai tambah komersil yang maksimal dalam menghasilkan barang atau jasa pertanian yang diminta pasar.
- Memudahkan proses transformasi material dalam sistem agribisnis yang tidak terbatas pada budidaya proses biologik dari biota (ternak, tanaman dan ikan) namun juga pra usahatani, penanganan pascapanen, pengolahan dan memperpendek jaringan tataniaga.
- Memperkuat posisi petani dalam tawar menawar dengan mitra transaksi di pasar.
- Membantu masyarakat petani dalam penerapan teknologi tepat guna dan berbiaya murah.
- Mendorong sektor prioritas dan mengembangkan komoditas unggulan spesifik lokasi.
- Merubah pola pertanian tradisional menuju pertanian modern yang tidak merusak kelestarian lingkungan.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat petani.
- Menyediakan lapangan pekerjaan di pedesaan.
- Memberi berbagai alternatif solusi berupa kegiatan produktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat petani di pedesaan.

Berdasarkan ilustrasi pembangunan agribisnis tersebut, disadari beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan termasuk pada pengembangan masyarakat di sektor lain. Beberapa komponen penting yang dimaksud terkait erat dengan permusan tujuan pengembangan masyarakat partisipatif. Uraian beberapa komponen penting itu meliputi:

- Komponen pendekatan kemandirian masyarakat.
- Komponen keswadayaan masyarakat agar mencapai tujuan *self help*.
- Komponen pemberian jaminan perlindungan bagi warga sehubungan dengan tujuan berisiko diluar dugaan.
- Komponen penyeimbang untuk mengurangi dominasi dampak dari tujuan tertentu yang tak direncanakan.
- Komponen penggerak partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai tujuan.
- Komponen pemantau hasil capaian tujuan pengembangan masyarakat baik yang terealisasi maupun yang gagal dicapai.
- Komponen evaluasi untuk hasil tujuan akhir dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sepanjang proses pengembangan masyarakat berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Kriteria Pencapaian Tangkai Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pencapaian tangkai tujuan pokok dan khusus pengembangan masyarakat selain memerlukan perhatian serius juga waktu, tenaga, biaya dan pengorbanan lain. Pada suatu komunitas selalu terdapat keragaman

pendapat dalam merespon setiap pengembangan masyarakat atau dengan kata lain ada yang pro dan kontra. Dengan demikian, pihak perencana dan pengembang sosial perlu bersikap hati-hati sewaktu menetapkan keputusan yang menyangkut hasil pencapaian tujuan akhir apakah berhasil atau tidak. Pengambilan keputusan ini sensitif karena kemungkinan setiap orang memberi penafsiran berbeda terhadap pencapaian tujuan pengembangan masyarakat.

Bebagai kritik yang muncul terhadap pencapaian tangkai tujuan dapat dimanfaatkan sebagai masukan berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan pengembangan masyarakat berikutnya. Agar pengambilan keputusan tentang pencapaian tujuan tidak simpang-siur maka ¹ sejak awal perencanaan sosial perlu ditetapkan pedoman, standar, patokan atau acuan yang jelas dan terinci serta terukur sesuai batasan tujuan umum dan tujuan khusus. Pedoman merupakan dasar penetapan tingkat pencapaian tangkai tujuan pengembangan masyarakat yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Beberapa kriteria dibutuhkan guna menjelaskan pedoman ketentuan pencapaian tangkai tujuan umum dan tujuan khusus dari pengembangan masyarakat. Kriteria yang dimaksud juga berfungsi sebagai rambu pembatas untuk mengungkap sampai dimana tujuan yang ditarget terealisasi. Oleh karenanya, kriteria dari dasar atau pedoman pencapaian tujuan pengembangan masyarakat perlu bersifat spesifik dan berbeda antara satu tujuan dengan tujuan lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain meski berada di suatu wilayah yang jaraknya secara geografi berdekatan. Tidak menutup kemungkinan, kriteria dilengkapi jumlah persentase perubahan yang terjadi. Misalnya, pengembangan masyarakat dinyatakan berhasil untuk mencapai tujuan peningkatan

produksi pengelolaan usahatani sayuran berbasis agribisnis ramah lingkungan bilamana minimal memenuhi beberapa kriteria berikut:

- (1) Terjadi perubahan perilaku pada anggota masyarakat petani untuk budidaya sayuran dengan konsep agribisnis setelah mengikuti kegiatan pengembangan masyarakat selama setahun (dari yang semula hanya 10 persen menjadi 50 persen).
- (2) Setelah mengikuti kegiatan pelatihan pengolahan pupuk organik selama tiga bulan terjadi kenaikan jumlah petani yang bersedia menggunakan pupuk organik untuk pengelolaan usahatani sayuran berbasis agribisnis (dari 15 persen menjadi 55 persen).
- (3) Setelah mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan pestisida alami selama tiga bulan terjadi kenaikan jumlah petani yang bersedia menggunakan pestisida alami untuk pengelolaan usahatani sayuran berbasis agribisnis (dari 15 persen menjadi 55 persen).
- (4) Setelah mengikuti berbagai kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi berbagai produk yang lebih awet selama dua bulan terjadi kenaikan jumlah petani yang mampu mengolah hasil usahatani sayuran (dari 5 persen menjadi 40 persen).

Kriteria pencapaian tangkai tujuan pengembangan masyarakat menggambarkan realitas yang mewakili kondisi perubahan. Kriteria yang baik perlu dipersiapkan sejak awal kegiatan pengembangan masyarakat mulai dilaksanakan atau pada tahap perencanaan setelah perumusan tangkai tujuan. Jenis kriteria yang dipersiapkan sejak awal dikategorikan sebagai kriteria pokok dan kriteria pendukung. Beberapa contoh kriteria pokok dari pencapaian tujuan pengelolaan agribisnis ramah lingkungan terlihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Beberapa Kriteria Pokok Pedoman Pencapaian Tangkai Tujuan Umum Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Agribisnis Ramah Lingkungan

Jenis kriteria lanjutan yang dikembangkan sesuai keadaan dikategorikan sebagai kriteria pendukung. Penetapan kriteria pendukung tidak boleh dilakukan seketat (rigid) kriteria pokok karena dapat berkembang setiap saat sesuai keadaan yang berlangsung ditengah struktur sosial masyarakat. Kriteria pendukung bersifat fleksibel lebih mudah dimanfaatkan untuk mengikuti arah dan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Hanya saja yang perlu diperhatikan, penetapan kriteria pendukung yang bersifat lanjutan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan tapi tetap berorientasi pada tujuan semula.

Kriteria utama dan pendukung saling melengkapi untuk menentukan batasan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat. Akan tetapi, kedua jenis kriteria tidak harus selalu digunakan secara bersamaan.

Kriteria pendukung kadangkala tidak dibutuhkan sebab dengan kriteria pokok penetapan tujuan sudah dapat ditentukan dengan jelas.

Beberapa kriteria pendukung pengembangan masyarakat melalui pengelolaan agribisnis ramah lingkungan dapat tercermati dari informasi yang tertera pada Gambar 11.



Gambar 11. Beberapa Kriteria Pendukung Pencapaian Tangkai Tujuan Pendukung Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Agribisnis Ramah Lingkungan

Penetapan kriteria tujuan pengembangan masyarakat melalui beberapa tahapan yang tidak selalu harus berurutan. Antar satu tahapan dengan tahapan lain bisa saling mendahului. Beberapa tahapan yang dimaksud:

Penetapan Kriteria Pokok

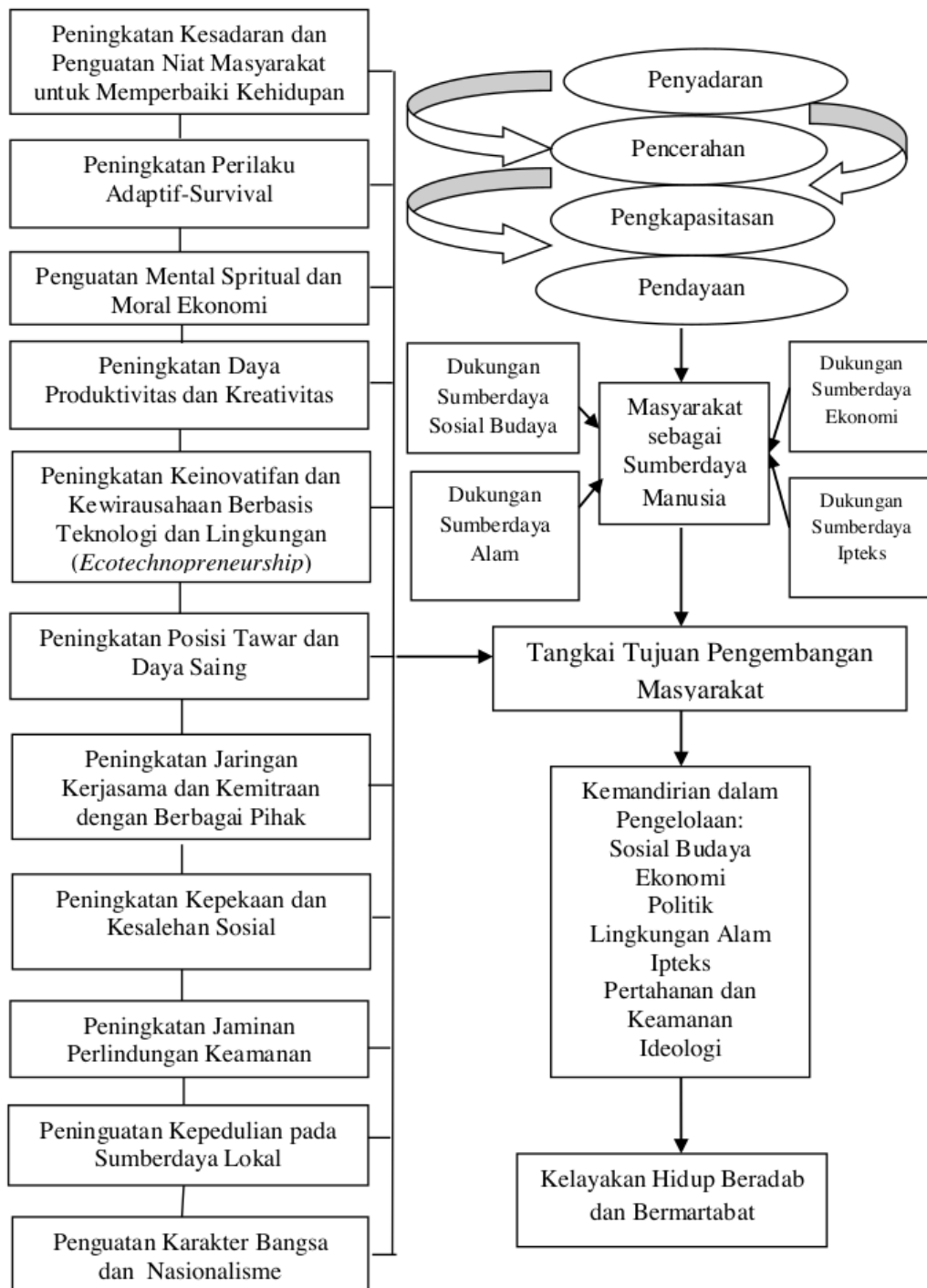
- ❖ Pahami kebutuhan dan permasalahan yang akan diselesaikan dengan pemanfaatan serangkaian kegiatan pengembangan masyarakat yang hendak dilakukan.
- ❖ Pelajari cakupan tujuan umum dan tujuan khusus dengan teliti.
- ❖ Susun jenis, skala prioritas/kategori, target usaha dan prospek keberhasilan dari berbagai kegiatan pengembangan masyarakat sesuai tujuan yang dirumuskan.
- ❖ Pertimbangkan faktor waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan pengembangan masyarakat.
- ❖ Jika merasa kesulitan dalam menetapkan kriteria maka pemikiran harus dikembalikan kepada berbagai sudut pandang. Jika dianggap perlu gunakan analisis prioritas untuk mempermudah penetapan kriteria pokok.
- ❖ Diskusikan beberapa kriteria dengan pihak terkait apakah sudah mencerminkan keseluruhan tujuan pengembangan masyarakat yang hendak dicapai.
- ❖ Matangkan susunan kriteria dengan berdasarkan pertimbangan masukan dari berbagai pihak sebagai hasil diskusi.
- ❖ Yakinkan bahwa kriteria pokok yang tersusun bersifat fleksibel dan apabila perlu dilengkapi kriteria pendukung.

Penetapan Kriteria Pendukung

- Kembangkan terus pemikiran dan intuisi sesuai realitas kebutuhan dan permasalahan yang mendasari mengapa kegiatan pengembangan masyarakat perlu dilakukan.
- Pahami kembali tujuan umum dan tujuan khusus yang perlu dicapai.

- Pahami batas rentang waktu pelaksanaan pengembangan masyarakat dari awal hingga akhir.
- Pelajari rangkaian kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sehubungan dengan tahapan proses pencapaian tujuan pengembangan masyarakat secara sistematis.
- Amati dan rekam setiap perubahan yang terjadi pada komunitas sosial khususnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan tujuan pengembangan masyarakat.
- Amati dan rekam respon, persepsi, harapan, kritik dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat sejak awal sampai akhir.
- Identifikasi perubahan kegiatan pengembangan yang terjadi dengan seksama.
- Susun beberapa kriteria penunjang untuk melengkapi kejelasan dan keterperincian kriteria pokok.
- Diskusikan beberapa kriteria dengan pihak terkait apakah sudah mencerminkan keseluruhan tujuan pengembangan masyarakat yang hendak dicapai atau masih perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kondisi riil.
- Matangkan susunan kriteria dengan berdasarkan pada pertimbangan masukan dari berbagai pihak sebagai hasil diskusi.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai kriteria yang dijelaskan, tangkai tujuan pengembangan masyarakat baik yang bersifat umum maupun khusus lebih mudah dinilai secara objektif oleh berbagai pihak. Lingkup uraian tangkai tujuan pengembangan masyarakat tidak terlepas dari beberapa hal penting yang terinci pada Gambar 12.



Gambar 12. Lingkup Tangkai Tujuan Pengembangan Masyarakat

Lingkup tangkai tujuan yang tertera pada Gambar 12 merupakan kunci pembuka pintu keberhasilan pengembangan masyarakat. Kesemua tangkai tujuan memiliki keterkaitan erat antara satu dengan lain. Penetapan prioritas tujuan yang hendak dicapai tidak dapat diseragamkan pada semua kalangan masyarakat karena bersifat spesifik sesuai permasalahan dan kebutuhan riil. Untuk mencapai semua lingkup tujuan secara lengkap, proses pengembangan masyarakat perlu dilaksanakan secara kontinu dan terencana.

BAB IV. PRINSIP DAN ETIKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Prinsip Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat meliputi berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan berkesinambungan dari awal hingga akhir. Tuntutan konsistensi penting dijaga agar tak menyimpang dari tujuan yang direncanakan sejak semula. Oleh karenanya, dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat penting memperhatikan beberapa prinsip yang mewarnai orientasi tujuan dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang tengah dihadapi warga.

Pengenalan berbagai prinsip pengembangan masyarakat merupakan suatu yang penting untuk dilakukan oleh pihak yang tertarik dan terlibat mendukung pelaksanaan kegiatan berwatak sosial ini. Secara konseptual, Mathews menjelaskan prinsip merupakan suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melakukan kegiatan secara konsisten (Mardikanto, 1992). Dengan demikian, dapat dinyatakan prinsip adalah sesuatu kebijakan yang diakui bersama tentang kebenarannya hingga berlaku secara umum meski dalam kondisi dan situasi berbeda.

Prinsip memiliki fungsi penting dalam berbagai kegiatan pembangunan termasuk pengembangan masyarakat. Salah satu fungsi penting dari prinsip terletak pada posisinya sebagai landasan pokok atau acuan dasar yang memberikan arah yang benar bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Tanpa memperhatikan dan berpegang pada prinsip yang berlaku, seorang kader/agen pembaharu/fasilitator/motivator/penyuluh dari pengembangan masyarakat akan mengalami kesulitan

dalam pelaksanaan ragam kegiatan yang direncanakan semula. Pencapaian tujuan terhambat akibat prinsip pengembangan masyarakat tidak diikuti dengan baik. Tanpa memperhatikan prinsip pengembangan masyarakat, proses pelaksanaan bisa terganggu bahkan kemungkinan besar keluar dari rambu yang direncanakan hingga menimbulkan penyimpangan tujuan.

⁷ Prinsip pengembangan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir. Prinsip tidak dapat muncul begitu saja tanpa sebab dan latar belakang yang jelas. Keberadaan prinsip bersumber dari pengalaman dan hasil: praktek percobaan, uji coba, kaji tindak, validasi, penelitian dalam kurun waktu yang tidak singkat. Prinsip dikembangkan untuk guna menemukan jawaban pertanyaan mengapa sesuatu penting dilakukan. Selain itu juga dimaksudkan untuk mencari mana yang sebaiknya dilaksanakan dan mana yang sebaiknya tidak dilaksanakan guna memenuhi kepentingan pengembangan masyarakat.

Bagi para ahli, prinsip pengembangan masyarakat bisa saja berbeda sesuai pemikiran dan pengalaman yang dicatat secara khusus dalam agenda masing-masing. Akan tetapi, di balik perbedaan prinsip tersebut akan ditemukan jalinan benang merah yang menunjukkan persamaan rambu pengembangan masyarakat secara garis besar. Chambers (1996) menguraikan ⁶ beberapa prinsip pengembangan masyarakat dengan pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai berikut:

- ❖ ⁶⁶ Suatu pembalikan pemahaman, belajar dari masyarakat desa secara langsung.

- ❖ Belajar tentang masyarakat ⁴⁵ secara cepat dan progresif melalui eksplorasi terencana dengan penggunaan metode yang fleksibel diwarnai improvisasi dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap permasalahan warga.
- ❖ Menyeimbangkan bias bukan mengkurui tapi justru mendengarkan. Tidak memaksakan namun memprioritaskan pokok perhatian warga.
- ❖ Optimalisasi ⁶ pertukaran. Cara ini dapat dilalui dengan mengkaitkan antara biaya pemahaman dengan informasi yang benar-benar bermanfaat dan akurat.
- ❖ Membuat jaringan titik-titik pengukuran.
- ❖ Mencari keanekaragaman untuk kelengkapan informasi dan kedalaman informasi

Khusus bagi kepentingan pelaksanaan PRA terdapat beberapa prinsip tambahan. Chambers (1996) menguraikan beberapa prinsip tambahan yang perlu diperhatikan secara serius dalam pelaksanaan PRA yakni:

- Pemberian fasilitas.
- Kesadaran dan tanggungjawab yang kritis.
- Saling berbagai informasi dan gagasan antar warga dengan warga, warga dengan perencana dan pengembang, sesama perencana dan pengembang masyarakat.

Beberapa prinsip lain mewarnai pelaksanaan pengembangan masyarakat dan berfungsi penting sebagai pertimbangan berharga khususnya bagi para pihak pengelola dan fasilitator kegiatan. ¹ Beberapa prinsip penting lain yang dimaksud mencakup:

- (1) **Berbasis** sumberdaya **lokal** (sumberdaya manusia dan sumberdaya alam).

Setiap pengembangan masyarakat yang dilakukan diupayakan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya lokal. Prinsip ini mempunyai dua efek: pertama mengurangi kemubaziran sumberdaya lokal yang selama ini belum terpakai dan kedua mengurangi ketergantungan pada sumberdaya dari luar.

- (2) Kesesuaian antara kegiatan pengembangan masyarakat dengan kebutuhan dan permasalahan yang riil. Berbagai bentuk bias yang kemungkinan terjadi dapat dihindari bila figur seorang kader/agen pembaharu/fasilitator/motivator/ perencana/pengembang masyarakat menerapkan prinsip kesesuaian antara kebutuhan dan permasalahan dengan kegiatan yang diselenggarakan.
- (3) Proses pembaharuan perilaku yang adaptif bukan sebagai rekayasa sosial (Santosa, 2004).

Prinsip ini penting dipegang karena menyangkut penetapan subjek dan objek pengembangan masyarakat. **Pencapaian pembaharuan perilaku masyarakat yang lebih adaptif termasuk salah satu prinsip terpenting dalam pengembangan masyarakat.** Tanpa terjadi pembaharuan perilaku niscaya masyarakat tergerak untuk berubah menjadi kreatif, produktif dan mandiri.

- (4) **Proses transformasi sosial** (Santosa, 2004). **Pengembangan masyarakat termasuk proses transformasi sosial yang memberi warna perubahan pada berbagai bentuk kehidupan warga agar lebih berkualitas. Beberapa bentuk kehidupan warga yang perlu diperbaharui antara lain: peningkatan kepekaan dan respon terhadap inovasi, peningkatan mutu kinerja produktif, kemajuan dalam pola**

pikir, komunikatif, peningkatan daya tawar, kemudahan akses terhadap ragam aset produksi dan informasi. Dengan menerapkan prinsip transformasi sosial, masyarakat tidak mengalami gegar budaya dalam berpartisipasi aktif mengikuti kedinamikaan kegiatan pengembangan masyarakat.

- (5) Mendudukan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama pengembangan masyarakat (Suharto, 1997; Wrihatnolo dan Didjowijoto, 2007).

Prinsip menempatkan masyarakat sebagai subjek atas pengembangan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri membalik arah paradigma pembangunan lama yang memposisikan warga hanya sebagai objek sasaran. Prinsip ini erat kaitannya untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari warga terhadap kegiatan pengembangan masyarakat. Tindakan ketidaksetujuan, protes dan kritik terhadap pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh segelintir warga yang tidak setuju dapat ditekan dengan menerapkan prinsip menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama yang berhak melaksanakan kegiatan pembaharuan.

- (6) Asosiatif.

Dengan memegang prinsip asosiatif akan menyadarkan semua pihak bahwa antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat saling terkait. Kelemahan atau keunggulan dari suatu kegiatan selalu berhubungan dengan kelemahan dan keunggulan dari kegiatan lain misal pencapaian peningkatan produksi secara langsung berkaitan dengan partisipasi aktif warga dalam penerapan inovasi.

(7) Konsistensi.

Dalam pengembangan masyarakat dikenal juga tentang penerapan prinsip konsistensi. Prinsip ini penting dalam mengarahkan gerak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat agar tetap berada dalam koridor yang benar sesuai rencana sejak semula. Dengan tetap menjaga konsistensi, pelaksanaan pengembangan masyarakat lebih mudah karena berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari. Pencapaian tujuan cenderung lebih bebas dari hambatan ⁶⁵berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Saat tidak menjaga konsistensi, diprediksi kegagalan pencapaian tujuan akan semakin besar.

(8) Kerjasama dan partisipasi.

Prinsip kerjasama dan partisipasi merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan masyarakat. Sejak awal perencanaan, kerjasama dan partisipasi antar komponen masyarakat beserta para kader/agen pembaharu/fasilitator/motivator/ perencana/pengembang sudah digerakkan dalam suasana kekeluargaan. Pengembangan ¹masyarakat akan efektif bilamana kerjasama dan partisipasi memanfaatkan pendekatan persuasif bukan melalui pendekatan koersif atau rekayasa sosial. Dalam kerjasama dan partisipasi, semua warga diberi hak dan kewajiban yang tidak jauh berbeda agar tidak melebarkan kesenjangan sosial.

(9) Kesamaan tujuan. Pada hakekatnya disadari tujuan antar individu berbeda.

Meski demikian, dalam pengembangan masyarakat berbagai tujuan yang bersifat heterogen seyogyanya dirumuskan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesamaan tujuan yang menyangkut

dan mewakili semua kepentingan individu/rumahtangga. Prinsip kesamaan tujuan penting bagi sesama warga agar terwujud keharmonisan dalam pengembangan masyarakat. Kesamaan tujuan menjadi suatu titik acuan dalam mempersiapkan dan mengemas kegiatan yang lebih mendahulukan kepentingan umum dari mayoritas warga. Kesamaan tujuan bermanfaat untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat sesuai khalayak sasaran. Selain itu, kesamaan tujuan juga merupakan prinsip pengembangan masyarakat yang efektif memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan.

(10) Fleksibel.

Prinsip fleksibel pada pengembangan masyarakat menunjukkan keluwesan untuk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah perubahan yang berlangsung. Tahap demi tahap kegiatan pengembangan masyarakat selalu membutuhkan penyesuaian agar tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah.

(11) Objektif. Setiap pengembangan masyarakat memiliki prinsip objektif. Artinya, tidak ada kegiatan untuk kepentingan individu tertentu yang dikedepankan. Semua kegiatan dilakukan untuk kepentingan bersama. Keberpihakan pada suatu kelompok juga perlu dihindari sejak dini. Susunan prioritas kegiatan ditetapkan sesuai kesepakatan dengan warga atau minimal yang mewakili. Bentuk kegiatan pengembangan masyarakat yang berupa pengadaan fasilitas informasi harga hasil pertanian di pedesaan diberlakukan untuk melayani kepentingan semua petani dengan ragam komoditas yang dibudidayakan.

(12) Memiliki akibat.

Prinsip pengembangan masyarakat ini menunjukkan setiap pengembangan masyarakat akan menghasilkan suatu akibat baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Penerapan prinsip akibat tidak terlepas dari keberanian menanggung risiko. Berbagai bentuk akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan pengembangan masyarakat sebaiknya sudah diperhitungkan sejak semula agar tidak menimbulkan reaksi kekagetan bagi warga masyarakat dan para kader/agen pembaharu/fasilitator/motivator/perencana/ pengembang.

Beberapa prinsip yang dijelaskan diatas terkait erat dengan pemikiran Chambers (1987) yang mengutarakan pembangunan masyarakat desa harus dimulai dari belakang dengan melakukan arus balik keruangan. Pandangan Chambers ini mengkritik pembangunan yang cenderung diperuntukkan bagi elit tertentu.

Etika Pengembangan Masyarakat

Salah satu ciri penting dari pengembangan masyarakat yang perlu disimak ialah menyangkut hubungan erat antara praktek dengan di lapang dengan refleksi oleh seluruh pelakunya. Pola hubungan yang sederhana tersebut mengikat kesepakatan para pelakunya sehingga menyetujui kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan. Sebelum lebih jauh membahas etika pengembangan masyarakat, ada baiknya terlebih dahulu mengkaji pengertian dan pemahaman etika beserta keterkaitannya dengan moral. Hal ini penting mengingat perlu kesamaan pengertian dan pemahaman tentang etika sehingga mempermudah mengulas berbagai permasalahan yang erat hubungannya dengan kepentingan moral warga.

10
 Dari sudut etimologi diketahui etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos* atau *ta etha* yang bermakna kebiasaan atau adat istiadat. Oleh karenanya, menurut Keraf (2006) etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia atau ajaran yang berisi perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku hidup manusia yakni perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Secara luas, etika berarti pedoman, 64 bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam kehidupan sebagai orang yang baik.

7
 Etika berfungsi memberi arah, batasan petunjuk, dan orientasi bagaimana tata krama yang sebaiknya dilakukan agar hidup manusia lebih bermakna. Bertolak dari pengertian etika tersebut dapat dimaklumi dalam menata hubungan sosial yang terjalin, para pelaku pengembangan masyarakat perlu mempunyai etika.

Dalam tata krama pergaulan, etika dikenal sebagai ciri perilaku khas mencerminkan keluhuran moral yang sebaiknya dilakukan sewaktu beraktivitas, berproduksi dan berprestasi. Pada masa sekarang, etika sering luput dari perhatian karena yang lebih dipentingkan adalah pesona kebendaan, kekuasaan dan materi. Padahal etika berperan penting dalam mendukung perwujudan ide, cita, tujuan dan prestasi baik dari seseorang maupun kelompok serta masyarakat.

Etika dapat mengharmonisasikan jalinan hubungan sosial sehingga dibutuhkan dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dalam pengembangan masyarakat, etika diperlukan untuk memberi suasana yang lebih menyenangkan dimana sesama warga saling menghormati, saling menghargai, saling bantu dan saling peduli dan tidak saling mengusik atau saling mengganggu. Etika menjadi barometer dalam berperilaku sesuai

nilai moral yang dikehendaki dan disepakati bersama oleh warga masyarakat.

Keberadaan etika tidak bisa diserupakan dengan peraturan. Dengan menjaga eksistensi etika, kesadaran dan kemauan untuk beretikad baik dapat dibangkitkan. Akan tetapi, bila etika dilanggar maka seseorang atau sekelompok orang tercemar karena dinilai merusak tatanan nilai moral. Dalam pengembangan masyarakat, etika yang perlu melekat pada perilaku mencakup:

- ❖ Perilaku sebagai manusia utuh ⁴⁰ ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ⁶³
Etika ⁶³ berkenaan dengan perilaku manusia secara utuh ⁶³ sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tidak terlepas dari keimanan, kejujuran, ketaatan, rasa syukur, kedisiplinan. Beberapa etika tersebut menjadi penuntun untuk selalu berbuat tindakan lurus termasuk menjaga segala anugerah pemberian Tuhan. Dalam upaya pengembangan masyarakat, etika berperilaku utuh sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa penting untuk menjadi modal dalam upaya meningkatkan kemampuan diri agar tidak terikat lagi dengan sikap mental ketidakberdayaan, kemalasan, ketidaktaatan, kecurangan, kelaliman, ketidabersyukuran dan keterpurukan serta kemerosotan moral.
- ❖ Perilaku sebagai manusia sosial yang tidak individualis. ⁶²
Artinya, setiap warga tentu memiliki kesadaran ⁶² lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi/kelompok. Tidak bersifat egois namun berwatak sosial. Kemauan bekerjasama dan ketulusan termasuk gambaran dari

etika yang menandakan seseorang memiliki perilaku sebagai manusia sosial.

❖ Perilaku humanis.

Kesadaran warga dalam hal kemanusiaan termasuk menghormati hak azasi sebagai hak dasar pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dalam pengembangan masyarakat, perilaku humanis antara lain tergambar dari sikap diri yang tidak diskriminatif, rela berkorban, tidak menyinggung perasaan, toleran dan mempunyai kepekaan terhadap permasalahan yang dialami oleh orang lain.

❖ Perilaku sebagai warga yang berkepribadian dinamis.

Watak dari warga masyarakat memang berbeda khususnya antara individu yang satu dengan lainnya. Pada masyarakat yang berciri konservatif atau kaum kolot (*laggard*) cenderung kurang menyukai perubahan. Meskipun demikian, harus disadari, keberadaan kalangan *laggard* tetap harus diperhitungkan dalam pengembangan masyarakat. Etika yang menunjukkan warga berperilaku dinamis dalam pengembangan masyarakat menunjukkan kesiapan dan keterbukaan dalam menerima pembaharuan atau penguatan sistem sosial yang inovatif. Kedinamisan masyarakat memberi dorongan dalam berperilaku ulet, giat, tekun, kerja keras, semangat tinggi, tidak putus asa dan berusaha mencerdaskan diri untuk mencapai peningkatan kualitas.

❖ Perilaku sebagai warga yang partisipatif.

Berperilaku partisipatif dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat merupakan tuntutan etika yang perlu dipenuhi dalam memperlancar pencapaian tujuan. Partisipasi aktif menunjukkan

kemauan untuk aktif ikut serta dalam kegiatan tanpa merasa ditekan atau dipaksa.

Secara teoritis diketahui pihak pengembang masyarakat atau yang dikenal sebagai kader/agen pembaharu/fasilitator/ motivator memiliki etika dalam menjalankan fungsi secara profesional. Agusta (2006) menguraikan dalam pengembangan masyarakat para pengembang mempunyai peran strategis yang dilandasi etika berikut:

✓ Fasilitatif.

Para perencana dan pelaksana pengembang masyarakat dapat melakukan animasi untuk membangkitkan inspirasi, antusiasme, semangat, energi dan motivasi agar warga bersedia melaksanakan kegiatan secara partisipatif. Pengembang juga bisa melakukan mediasi, konsensus dan negoisasi untuk menengahi pertentangan kepentingan atau konflik diantara warga. Selain itu, pengembang memberi penguatan terhadap struktur sosial yang telah terbentuk. Peran strategis lain dalam hal ini termasuk mengkoordinir pembentukan kelompok atau organisasi dalam pencapaian tujuan.

✓ Pendidikan.

Pengembang masyarakat perlu berusaha untuk meningkatkan keingintahuan warga terhadap lingkungan struktural sekitar. Berbagai informasi dari dalam dan luar sistem sosial penting disampaikan kepada warga sehubungan dengan penyelenggaraan pengembangan masyarakat. Berbagai bentuk pendidikan tak formal dirancang oleh pengembang masyarakat bersama warga guna meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan.

Beberapa bentuk pendidikan tak formal yang biasa dimanfaatkan dalam proses pengembangan masyarakat ialah: penyuluhan, pelatihan, pendampingan/ advokasi dan sekolah lapang. Materi pendidikan tak formal bisa disampaikan sendiri oleh pengembang masyarakat atau jika warga menginginkan bisa dari luar maka pihak pengembang menghubungkan aspirasi tersebut kepada pihak yang dipandang berwenang atau kompeten di bidangnya. Materi juga dapat bersumber dari kalangan warga sendiri yang telah dipandang berpengalaman dalam hal yang disampaikan. Apabila diperlukan, pengembang masyarakat memberi pendampingan untuk memunculkan keadaan konfrontatif khususnya sewaktu tujuan suatu kegiatan diperkirakan melemahkan kekuatan sumberdaya lokal.

✓ *Representative.*

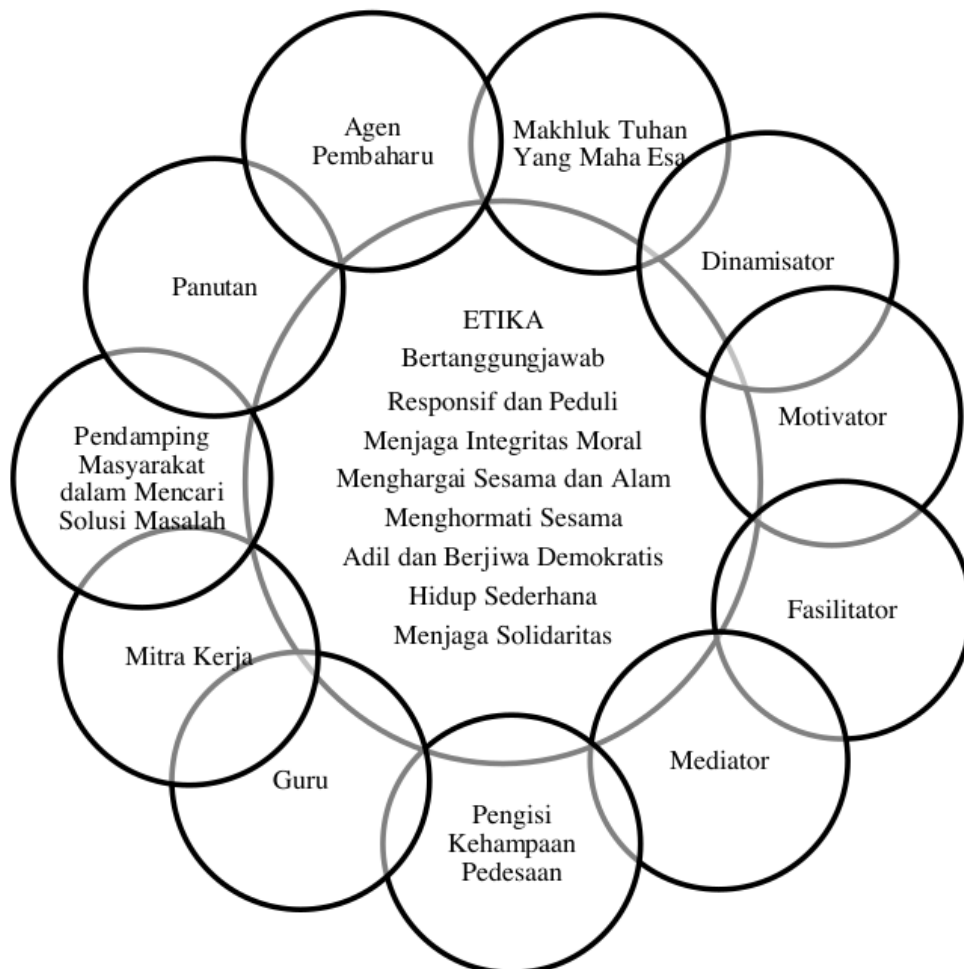
Peran yang *representative* dibutuhkan terutama ketika masyarakat tengah berhubungan dengan pihak luar. Pengembang masyarakat berusaha menggali beragam informasi penting dari pihak luar untuk kepentingan masyarakat. Peran pihak pengembang masyarakat diharapkan mampu sebagai *public relation*, yang bertugas mempublikasikan hal ihwal keberadaan dan perkembangan masyarakat ke luar sistem sosial baik melalui media massa maupun saluran komunikasi lain. Publikasi ditujukan terutama bagi pencaharian dukungan pihak luar bagi kelancaran pencapaian tujuan kegiatan pengembangan masyarakat. Pengembang masyarakat mempunyai peran penting lain yakni membangun jaringan sosial yang mempermudah masyarakat mengadakan akses dan kontak dengan pusat informasi dan

berhubungan dengan pihak luar misalnya untuk mengetahui: *trend* komoditas pertanian, teknologi tepat guna dan tepat sasaran, tingkat harga dan pasar serta penawaran modal produksi. Bagi seorang pengembang masyarakat disyaratkan mampu memainkan peran berbagi pengalaman sebagai bagian dari kemampuan *representative*. Berbagi pengalaman dimaksudkan dalam rangka belajar bersama. Pengembang dalam hal ini tidak boleh mendominasi atau seolah mengetahui segala sesuatu.

✓ Pelaksana peran teknis.

Peran sebagai pelaksana teknis dapat dilakukan pengembang dengan mengajak masyarakat untuk mengumpulkan dan menganalisis data agar tahu kemampuan dan potensi internal. Berdasarkan data yang dianalisis, masyarakat dilatih mengembangkan kegiatan produktif kreatif termasuk bagaimana cara menggunakan komputer untuk menjalankan fasilitas internet dalam rangka memperluas jangkauan informasi pasar atau promosi produk.

Peran pelaksana teknis lain umpama: menggerakkan masyarakat aktif mempelajari teknik manajemen organisasi, menyusun laporan usaha dan teknik peningkatan kedinamisan kelompok lokal. Dalam melaksanakan berbagai peran, seorang pengembang masyarakat perlu dibekali beberapa etika. Pada Gambar 13 terinci beberapa etika penting yang dimaksud.



Gambar 13. Beberapa Etika dalam Peran Seorang Pengembang Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, sewaktu-waktu prencana dan pengembang sosial boleh belajar menggunakan etika yang dimiliki warga dalam menghadapi perubahan. Etika yang terdapat dalam

tatanan sosial misalnya masyarakat adat terhimpun dalam nilai kearifan tradisional. Menurut Keraf (2006) kearifan tradisional ialah mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan dan adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis. Seluruh nilai kearifan tradisional dibangun, dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga membentuk pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia, alam dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kearifan tradisional merupakan produk kolektif warga yang bersifat praksis, holistik, arif dan bernilai moral.

BAB V. RAGAM PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Identifikasi Permasalahan Pengembangan Masyarakat

Pembahasan terinci tentang keberadaan permasalahan pengembangan masyarakat dalam berbagai literatur masih langka. Padahal pengidentifikasian dan pengenalan secara mendalam terhadap ragam permasalahan merupakan salah satu hal menarik yang menentukan kelancaran dalam pencapaian tangkai tujuan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman berbagai permasalahan tersebut menjadi hal penting diperhatikan dan dipahami berbagai pihak perencana, pengelola, evaluator dan masyarakat sendiri. Tanpa mengenali terlebih dahulu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat maka sulit merumuskan tujuan yang akan dicapai sesuai keadaan dan kebutuhan khalayak sasaran. Pemahaman utuh tentang sederet permasalahan berfungsi sebagai modal bagi penetapan keputusan ke arah mana proses pengembangan masyarakat akan digerakkan secara partisipatif.

Pengetahuan tentang permasalahan seringkali dianggap tidak perlu diungkap secara mendetail. Hal ini disebabkan fokus kajian lebih tertuju pada dinamika dan proses pengembangan masyarakat dilengkapi uraian dari tahap awal perencanaan hingga tahap akhir evaluasi pencapaian hasil. Kalkulasi biaya dan waktu serta tenaga justru menjadi pokok bahasan yang dianggap penting dalam pengembangan masyarakat sehingga pengungkapan permasalahan riil yang mendesak diselesaikan terabaikan. Tentu hal ini menjadi kekeliruan yang perlu dihindari semenjak dini.

Pemaparan kajian kedinamikaan pengembangan masyarakat terasa kurang mendalam karena minim menyentuh berbagai aspek permasalahan

baik tentang dari kepentingan sosial budaya, ekonomi, teknologi maupun lingkungan. Tak dapat disangkal, identifikasi dan analisis ragam permasalahan merupakan suatu tahap terpenting dalam setiap proses pengembangan masyarakat. Pada bab ini, pembahasan tentang permasalahan pengembangan masyarakat diketengahkan beserta ragam ilustrasi berdasarkan hasil penelitian para ahli yang dirangkai dengan kajian teori sebagai cakupan materi yang semakin menarik untuk dikaji dengan serius.

Potret pengembangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia ditunjukkan oleh sederetan aktivitas yang sarat dengan berbagai kepentingan. Diantara berbagai aktivitas tersebut ada yang terkait dengan kepentingan penggerakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif kreatif dan penguatan kelembagaan lokal. Sebagian aktivitas menaruh perhatian terhadap pemetaan potensi sumberdaya lokal, penggalangan dana pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, difusi teknologi serta manajemen pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai institusi terkait. Kesemua aktivitas tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat berkeadilan. Meskipun demikian, implementasi pengembangan masyarakat khususnya di tingkat *grass roots* yang tertuang dalam ragam bentuk program dan proyek tidaklah mudah dilakukan karena sepanjang waktu senantiasa menghadapi berbagai kendala atau hambatan yang berpotensi mempersulit pencapaian tujuan sesuai rencana. Segala macam kendala, rintangan atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan sekaligus sasaran inilah yang disebut sebagai permasalahan pengembangan masyarakat.

Permasalahan pengembangan masyarakat memang telah diakui berdimensi luas dan dilatarbelakangi pengaruh/tekanan beragam faktor.

Dimensi permasalahan pengembangan masyarakat dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang: sosial, budaya, ekonomi, politik, ideologi, ilmu pengetahuan, teknologi, sumberdaya manusia, sumberdaya informasi dan sumberdaya alam. Permasalahan pengembangan masyarakat yang berdimensi tunggal sangat jarang ditemukan karena mayoritas permasalahan cenderung berdimensi jamak. Misalnya permasalahan kemiskinan muncul akibat tekanan berbagai faktor penyebab berdimensi ekonomi dengan sosial dan budaya. Ketiga faktor dengan dimensi berbeda tersebut saling terkait erat menjebak anggota masyarakat dalam perangkap kemiskinan.

Proses pengidentifikasian ragam permasalahan pengembangan masyarakat memerlukan keseriusan, ketelatenan, kecermatan dan kehati-hatian. Pengidentifikasi berbagai permasalahan pengembangan masyarakat semestinya diawali dari upaya penelusuran sumber masalah atau yang sering diistilahkan akar permasalahan. Akar permasalahan inilah nantinya yang menyebabkan kemunculan permasalahan primer kemudian pada gilirannya melahirkan permasalahan sekunder dan tertier. Dalam memulai kegiatan pengembangan masyarakat, sebaiknya ragam akar permasalahan terlebih dahulu ditemukan dan dikenali sebelum diidentifikasi sesuai deretan masalah dengan skala prioritas yang mendesak diselesaikan.

Tahap pengenalan dan identifikasi akar permasalahan pengembangan masyarakat dapat dikerjakan sejak dini yakni pada tahap pra perencanaan oleh pihak perencana/pengembang/kader/agen pembaharu/fasilitator/motivator bersama masyarakat secara partisipatif. Kerjasama ini penting karena teknik pengungkapan akar permasalahan beserta serangkaian permasalahan lanjutan atau rentetan yang tepat ialah langsung bersumber dari informasi yang diberikan masyarakat sendiri.

Semakin terbuka dan jujur masyarakat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi maka kian mudah merumuskan tujuan beserta solusi yang ditetapkan hingga peluang tepat sasaran lebih tinggi. Akan tetapi, jika warga bersikap tertutup dan enggan memberikan segala hal ikhwal mengenal permasalahan termasuk yang mendasar maka kemungkinan harapan membangun solusi atau *problem solving* yang tepat sasaran makin menipis. Tentu situasi tersebut berpotensi membatasi ruang gerak kegiatan pengembangan masyarakat dan rawan mengakibatkan salah arah pada perumusan tujuan yang ditargetkan. Berbagai bentuk penyimpangan pelaksanaan pengembangan masyarakat cenderung terjadi karena ketidaktahuan, kesalahan dan kekeliruan sewaktu menjalani tahap pengenalan juga pengidentifikasian permasalahan riil.

Hasil penelitian Dumasari dan Suwarsito (2011) menunjukkan bahwa identifikasi permasalahan secara partisipatif yang berlangsung pada masyarakat petani petambak di pedesaan Purbalingga dan Banyumas ternyata mampu menghasilkan solusi yakni adopsi teknologi pengolahan pakan berprotein bagi ikan organik yang berbahan limbah pertanian. Teknologi ini efektif untuk menyelesaikan persoalan ketika terjadi penurunan efisiensi usaha budidaya ikan air tawar akibat harga pakan buatan pabrik makin mahal tak terjangkau daya beli petani petambak.

Bagi pengembang junior sering bersikap tergesa-gesa dalam menemukan dan mengidentifikasi masalah. Hal ini mungkin dikarenakan ada perasaan terdesak dan terburu-buru harus segera mencapai target selesai menyusun permasalahan untuk penetapan tujuan pengembangan masyarakat dalam waktu singkat. Pada situasi tersebut, hasil kerja yang dicapai sering diistilahkan 'produk kejar tayang'. Para junior acapkali belum berpengalaman hingga melupakan fungsi penting

pengungkapan permasalahan sebagai kunci keberhasilan pengembangan masyarakat. Lebih fatal, tak jarang junior berpandangan bahwa permasalahan hanya merupakan informasi pelengkap sehingga sering ditambahkan saat kegiatan berlangsung atau bahkan disertakan menjelang akhir proses pengembangan masyarakat.

Secara garis besar, terdapat beberapa alasan penting yang mendasari pentingnya mengenal ragam permasalahan pengembangan masyarakat. Beberapa alasan yang dimaksud mencakup:

- Manfaat permasalahan mampu membuka tabir yang melatarbelakangi mengapa kegiatan pengembangan masyarakat penting dan mendesak dilakukan di suatu wilayah/daerah tertentu. Permasalahan merupakan *blueprint* masyarakat dalam mengedepankan harapan memperoleh rumusan *problem solving* yang tepat. Permasalahan bermanfaat sebagai pembuka jalan untuk meluruskan tujuan pengembangan masyarakat agar terhindar dari segala penyimpangan dan bias sasaran.
- Fungsi permasalahan berupa informasi berharga yang patut dan layak diperhitungkan pada setiap awal perencanaan pengembangan masyarakat. Fungsi lain dari permasalahan adalah sebagai barometer penentu tingkat keparahan *problem* warga yang perlu dan mendesak ditangani. Permasalahan juga berfungsi sebagai kompas penunjuk arah dalam menetapkan jenis dan bentuk kegiatan pengembangan masyarakat yang sesuai untuk dijadikan alternatif solusi terbaik.
- Eksistensi permasalahan dapat dijadikan sebagai potret riil masyarakat yang hendak dikembangkan. Tidak terpungkiri,

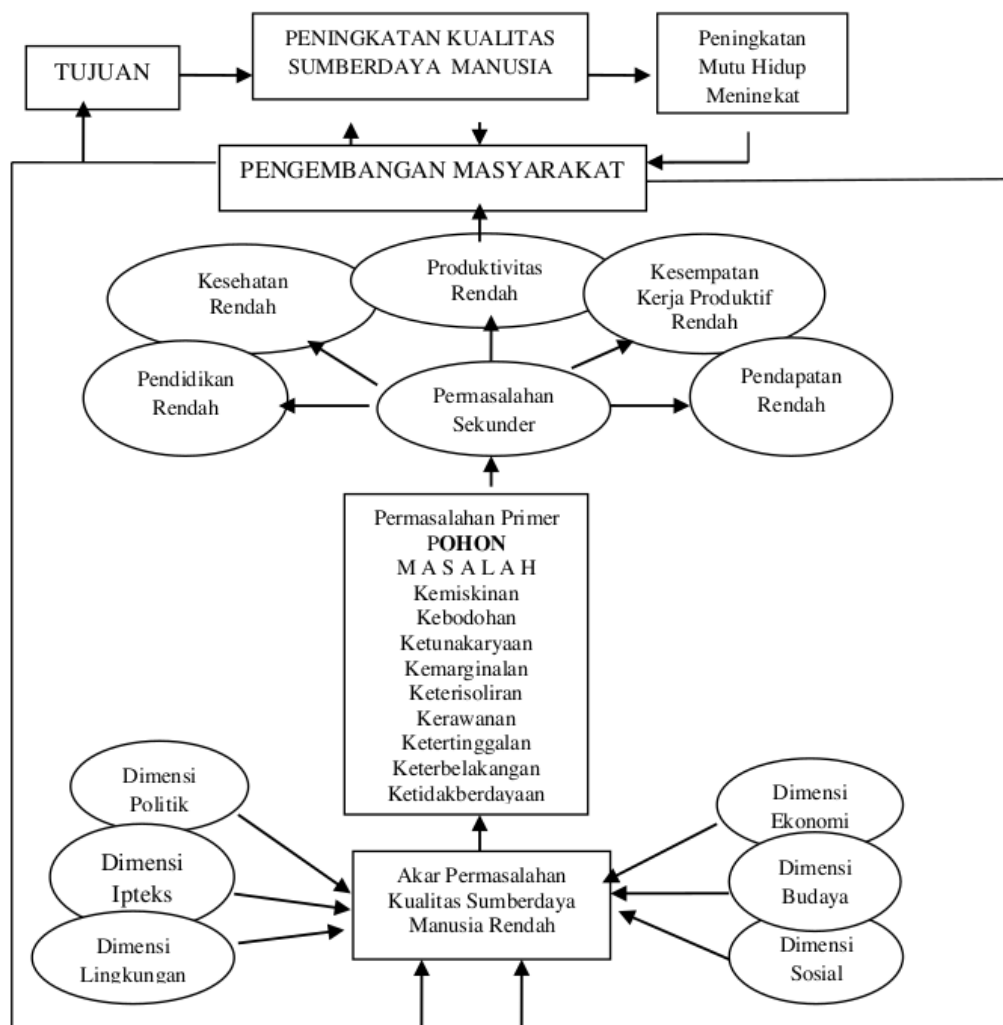
eksistensi ragam permasalahan memberikan gambaran yang jelas dari berbagai kondisi dan situasi kerawanan warga dalam menghadapi segala ancaman belenggu ketertinggalan, kebodohan, keterbelakangan, ketakberdayaan, ketunakaryaan, kemarginalan, keterisolasian, ketunakismaan, kemiskinan dan sebagainya.

- Eksistensi permasalahan juga menjadi bukti keterbukaan warga untuk turut aktif berpartisipasi dalam beragam kegiatan pengembangan masyarakat.

Permasalahan pengembangan masyarakat memang kompleks. Keragaannya perlu diperinci sesuai prioritas yang paling mendesak diselesaikan sesegera mungkin. Dalam menyikapi lingkup permasalahan yang ditemukan pada sekelompok masyarakat maka perlu dikenai terlebih dahulu akar permasalahan. Hal ini penting mengingat akar permasalahan memiliki fungsi sebagai sumber dari semua persoalan yang ada. Akar permasalahan dapat diidentifikasi sekaligus dikenali setelah dilaksanakan kontruksi berdasarkan informasi riil yang ditemukan pada struktur sosial masyarakat di wilayah tertentu. Untuk mendiagnosa keberadaan akar permasalahan, para perencana dan pengembang bersama masyarakat perlu berdiskusi secara interaktif guna mengidentifikasi dan mengenali dengan peka dan cermat. Hal ini penting mengingat seringkali keberadaan akar permasalahan tidak tampak muncul di permukaan sehingga sulit terdeteksi.

Keberadaan akar permasalahan cenderung tersembunyi mengakibatkan pihak terkait tidak mampu memperhitungkan sebagai problem yang paling prioritas diselesaikan sesegera mungkin dengan bijak. Dari hasil kontruksi dapat dibedakan tipe permasalahan yakni

antara akar permasalahan dengan permasalahan primer, permasalahan sekunder dan permasalahan tertier sebagai dampak lanjutan. Pada Gambar 14 terlihat hubungan erat antara permasalahan dengan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dinamis.



Gambar 14. Hubungan Permasalahan dengan Pencapaian Tujuan Pengembangan Masyarakat

Kategorisasi setiap tipe permasalahan ini memiliki kadar pengaruh yang berbeda dalam menentukan tingkat keparahan yang dialami masyarakat. Tipe permasalahan primer mempunyai tingkat keparahan yang lebih dari sekunder dan tertier. Akan tetapi, keberadaan tipe permasalahan primer menjadi sesuatu yang penting diperhatikan dalam proses pengembangan masyarakat karena keragaannya paling mudah diamati dan bila tidak hati-hati sering justru dipandang sebagai faktor penyebab utama atau akar permasalahan.

Ragam Jenis Permasalahan dan Solusi Pengembangan Masyarakat

Penelusuran terhadap permasalahan pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dalam tempo waktu singkat. Jenis dan bentuk permasalahan yang dihadapi warga masyarakat dimanapun berada dan kapanpun menunjukkan ciri beragam. Akan tetapi, jika dianalisis dari sudut pandang yang melatarbelakangi maka jenis permasalahan pengembangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Sumber Permasalahan

Ditinjau dari sumbernya maka permasalahan pengembangan masyarakat dikategorikan dalam dua jenis yakni: permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Kedua jenis permasalahan ini bisa bekerja secara bersamaan merintangi proses pelaksanaan pengembangan masyarakat. Permasalahan internal bersumber dari dalam sistem sosial masyarakat sendiri. Sementara, jenis permasalahan eksternal bersumber dari luar lingkungan sistem sosial masyarakat yang tengah dikembangkan sebagai khalayak sasaran.

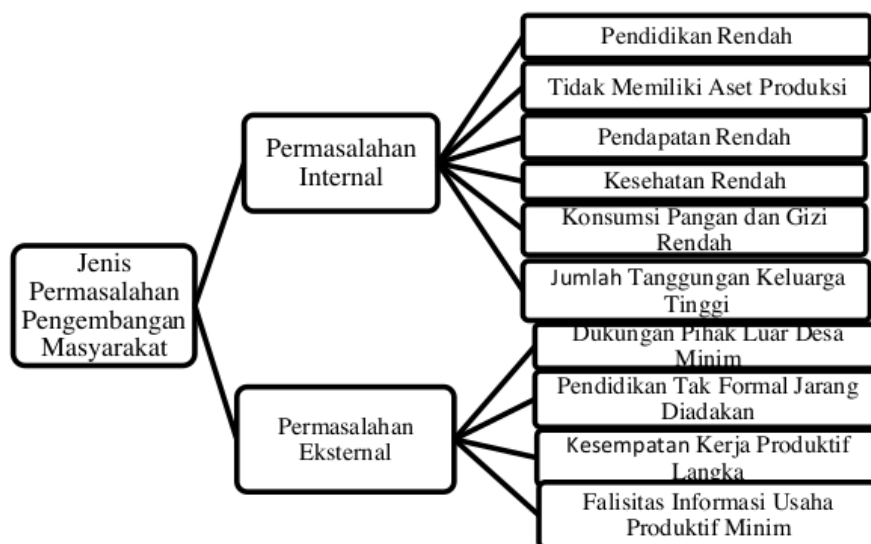
Permasalahan internal erat kaitannya dengan kondisi dan potensi sumberdaya lokal. Kekuatan dan keunggulan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang terdapat di sekitar lingkungan lokal turut menentukan tingkat pengaruh permasalahan internal dalam menghalangi pencapaian tujuan pengembangan masyarakat. Bagi sebagian anggota masyarakat, permasalahan internal sulit terdeteksi. Hal tersebut terutama dikarenakan rasa keengganan warga mengungkapkan sederetan permasalahan yang membelenggu dalam selang waktu lama. Permasalahan yang dari hari ke hari dihadapi telah melekat menjadi bagian dari kehidupan seolah merasa tak perlu lagi keluar dari kemelut kebodohan, kemiskinan, kemarginalan, ketunakaryaan, keterbelakangan, kerawanan, kemerosotan moral dan lainnya.

Bagi masyarakat di daerah tertentu, terdapat opini yang menyatakan kesediaan membuka permasalahan yang dihadapi dianggap sama saja dengan membuka aib sendiri. Tentu hal itu tidaklah benar karena tanpa mengungkap liputan permasalahan yang menghadang akan sulit menentukan orientasi kegiatan dan tujuan pengembangan masyarakat secara spesifik agar tepat sasaran. Harus diakui, ketika tengah melakukan tahap pengidentifikasian ragam permasalahan terdapat serangkaian tantangan berat bagi para pelaksana atau kader pengembang dalam menjalankan peran sebagai *agent of change*, penggugah kesadaran, pendamping, dinamisator dan motivator.

Permasalahan eksternal berhubungan dengan keberadaan jaringan bersama dengan pihak luar yang kurang memadai bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Masyarakat dalam pengembangan kapasitas dan keberdayaan membutuhkan berbagai dukungan baik yang bersifat moril dan material dari pihak lain terkait luar sistem sosial.

Kesulitan dan keterbatasan pihak luar dalam menyampaikan berbagai ide dan gagasan pengembangan masyarakat di suatu wilayah yang secara geografis jauh dari jangkauan fasilitas transportasi termasuk kategori permasalahan eksternal.

⁷³ Dari penelitian yang dilakukan oleh Santosa, *et al.*, (2005) dan Santosa, *et al.*, (2006) dikemukakan bahwa pengembangan perilaku survival masyarakat petani tepian hutan dalam pengelolaan hutan sebagai cadangan pangan dirintangi masalah eksternal berupa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak luar desa yang belum optimal untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan nonformal partisipatif dalam upaya penanganan kerawanan pangan di beberapa desa Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Beberapa ilustrasi yang menunjukkan perbedaan antara permasalahan internal dan eksternal tersebut tertera pada Gambar 15.



Gambar 15. Jenis Permasalahan Berdasarkan Sumber Kejadian

(2) Kekuatan Dampak yang Ditimbulkan

Jika ditelusuri dari segi kekuatan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai permasalahan terhadap segala bentuk gangguan ketidakberhasilan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat maka jenis permasalahan dapat dibedakan sebagai berikut: permasalahan berdampak parah (akut/kronis), permasalahan berdampak sedang dan permasalahan berdampak ringan. Permasalahan berdampak parah biasanya sudah berlangsung lama bahkan sampai menahun. Tidak jarang, karena masyarakat tertentu sudah menahkannya sampai tahunan, akhirnya tidak menyadari lagi sedang berada dalam belitan persoalan yang kompleks. Belenggu permasalahan berdampak parah sering dianggap sebagai *suratan nasib*, jalan hidup dan takdir yang harus dijalani dengan kepasrahan.

Keadaan miskin bagi sebagian orang dari sisi ekonomi akan terpotret sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam mencukupi ragam kebutuhan hidup. Akan tetapi, bagi warga yang telah menderita kemiskinan dalam selang waktu cukup lama, kemiskinan tak disadari lagi sebagai masalah yang perlu segera dipecahkan karena merasa sudah terbiasa dengan kondisi serba kekurangan. Walau demikian, hasil penelitian Santosa, *et al.*, (2002) menunjukkan fakta sosial bahwa di balik kepasrahan warga miskin khususnya di pedesaan yang tengah menghadapi permasalahan berdampak parah rawan pangan ternyata tak jarang terdapat berbagai bentuk strategi survival keluarga yang diandalkan untuk bertahan hidup sehari-hari.

Permasalahan sosial yang berdampak sedang seperti kerawanan pangan yang bersifat insidental akibat tekanan kenaikan harga bahan pangan pokok beras mendorong warga desa untuk memilih strategi

survival sesuai logika lokal antara lain dengan cara membuka dapur umum dari beberapa keluarga lalu memasak *bareng* nasi dan lauk pauk demi pengiritan. Sebagian memilih mengurangi frekuensi pola makan dari tiga kali sehari menjadi dua kali sehari. Ada juga yang menggunakan strategi survival mengganti beras dengan bahan pangan lain misal: singkong dan jagung. Permasalahan lain yang berdampak sedang terlihat dari tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak yang memotivasi warga petani miskin di beberapa desa yang berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas untuk menerapkan beberapa bentuk strategi survival yang unik. Salah satu strategi survival untuk mengatasi permasalahan ini dengan memanfaatkan bahan bakar non minyak yang bersumber dari sumberdaya lokal. Dumasari, *et al.*, (2006) menunjukkan warga petani di pedesaan Banyumas menyelesaikan permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak dengan menggunakan strategi survival yang telah lama ditinggalkan yakni kembali memanfaatkan bahan bakar non minyak seperti: ranting dan cabang pohon yang kering, sabut kelapa, tempurung kelapa, sekam padi, bambu kering dan sisa gergajian kayu. Bentuk strategi survival ini dilakukan secara konservatif tapi berdampak positif terhadap pengurangan jumlah limbah hasil pertanian sebagai polutan pencemar lingkungan.

Permasalahan yang berdampak ringan seperti kekurangan modal untuk pengembangan usaha produktif dapat diatasi dengan melakukan pinjaman kepada debitur potensial. Ada juga yang menyelesaikannya dengan cara meminjam pada koperasi/usaha simpan pinjam dan lainnya yang memberlakukan pengembalian dengan sistem cicilan dan bunga ringan. Jenis permasalahan berdasarkan kekuatan dampak yang diakibatkan dapat dicermati melalui informasi pada Gambar 16.



Gambar 16. Jenis Permasalahan Berdasarkan Kekuatan Dampak yang Ditimbulkan

(3) Sifat Permasalahan

Dalam masyarakat terdapat perbedaan jenis permasalahan menurut sifat yang melekat padanya. Permasalahan yang bersifat manifest bisa teramati dengan pancaindra karena terwujud nyata dalam berbagai bentuk dan langsung bekerja secara mekanis memperlambat atau menghambat proses pengembangan masyarakat. Sebagai ilustrasi secara jelas digambarkan dari keadaan rumah tangga dengan yang diwarnai keterdesakan ekonomi akibat pendapatan rendah sehingga anak putus sekolah. Anggota keluarga rentan terserang penyakit menular dan mengakibatkan status kesehatan menurun.

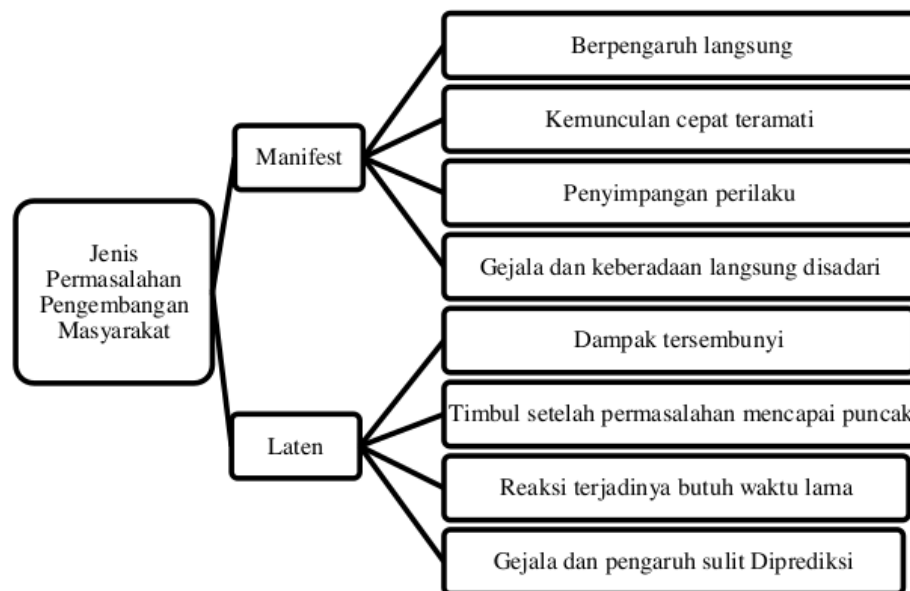
Rangkaian permasalahan pengembangan masyarakat ibarat penyakit sosial yang perlu ⁶⁰ segera disembuhkan dengan obat yang tepat dan manjur. Pada masyarakat sering ditemukan permasalahan sosial berupa kerawanan tindak kriminal, kerusakan lingkungan alam, gangguan transportasi umum (jalan rusak) dan pemutusan hubungan kerja. Pada masyarakat petani, permasalahan ini dicontohkan antara lain dari peristiwa kenaikan harga

dan kelangkaan pupuk/obat pengendali hama penyakit tanaman, keterbatasan lahan garapan, harga hasil produksi pertanian rendah, akses petani terhadap pasar pertanian lemah dan keterbatasan modal produksi. Keberadaan jenis permasalahan yang tergolong manifest cenderung secara langsung disadari pihak yang mengalami. Pihak luar juga dapat melihat jelas gejala permasalahan manifest karena terjadi konkrit hingga mudah dibuktikan secara riil. Penyebaran pengaruh dari permasalahan ini langsung dirasakan masyarakat meski baru terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Permasalahan manifest yang banyak terjadi justru berkaitan dengan unsur penyimpangan perilaku masyarakat. Jenis permasalahan ini muncul akibat kesenjangan dalam masyarakat yang disebabkan ketidaksesuaian antara tindakan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat. Faktor penyebab lain ialah anomie atau kekaburan norma yang dialami masyarakat terutama yang sedang menghadapi masa transisi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Berbeda dengan jenis permasalahan yang bersifat manifest, ternyata permasalahan laten sulit terdeteksi. Permasalahan ini membutuhkan waktu yang relatif lama menunggu sampai tampak muncul ke permukaan. Pihak yang mengalami juga sering memendam permasalahan laten karena memperhitungkan berbagai alasan. Berbagai alasan penting yang menyebabkan warga menyimpan permasalahan ini: ada rasa malu, enggan berterus-terang, sikap sabar, saling pengertian, *tepo seliro*, toleransi, sikap memaafkan dan toleransi. Beberapa ilustrasi jenis permasalahan laten adalah: konflik batin antar saudara, sengketa batas tanah antar tetangga, hutang piutang tanpa surat transaksi legal (resmi), kecemburuan sosial, kesenjangan budaya (*cultural lag*), kekaburan norma sosial (anomie),

sempitnya kesempatan kerja, peralihan fungsi lahan (konversi dari kepentingan produktif untuk rekreatif) dan penambahan kepadatan penduduk di suatu wilayah tertentu. Pengaruh dari permasalahan yang bersifat laten tidak secara langsung tampak namun kemunculannya lama seiring perputaran waktu hingga warga yang mengalami mencapai puncak kejenuhan yang ditunjukkan dengan berkurang atau hilangnya kesabaran. Pada Gambar 17 terlihat pengkategorian jenis permasalahan menurut sifat dengan berbagai ciri.



Gambar 17. Jenis Permasalahan Berdasarkan Sifat dengan Berbagai Ciri

(4) Dimensi Permasalahan

Kategori jenis permasalahan pengembangan masyarakat dapat dibedakan menurut dimensi yang melingkupi permasalahan tersebut.

Beberapa jenis permasalahan yang dikenal berdasarkan dimensi ini antara lain: budaya, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketertiban dan keamanan, agama/keyakinan, ideologi, keadilan serta perlindungan hukum (*justice*) dan keterjaminan pangan/pendidikan/kesehatan.

Setiap permasalahan bisa berpeluang memiliki dimensi tunggal dan jamak (multi dimensi). Permasalahan dengan ragam dimensi sering mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Jarang sekali ditemukan permasalahan pengembangan masyarakat yang berdimensi tunggal. Oleh karenanya, penetapan solusi untuk mengatasi permasalahan dari analisis dimensi membutuhkan ketelitian dan kejelian yang lebih tinggi.

Sesuai dimensi permasalahan pengembangan masyarakat diketahui corak umum selalu menyertai. Dengan demikian, jenis permasalahan ini mempunyai kemungkinan besar diperinci lagi dalam berbagai bentuk permasalahan yang lebih mengkhhusus. Sebagai ilustrasi dapat diketengahkan permasalahan pengembangan masyarakat berdimensi ekonomi terperinci dalam permasalahan yang lebih spesifik seperti: produksi rendah, pendapatan rendah, produktivitas rendah, kelangkaan kesempatan kerja produktif, kredit macet, inflasi, usaha produktif rugi, kebangkrutan, keterbatasan modal usaha, ketidakterjaminan harga dan pasar, daya saing lemah, produk berkualitas rendah, kreativitas kerja rendah dan sebagainya.

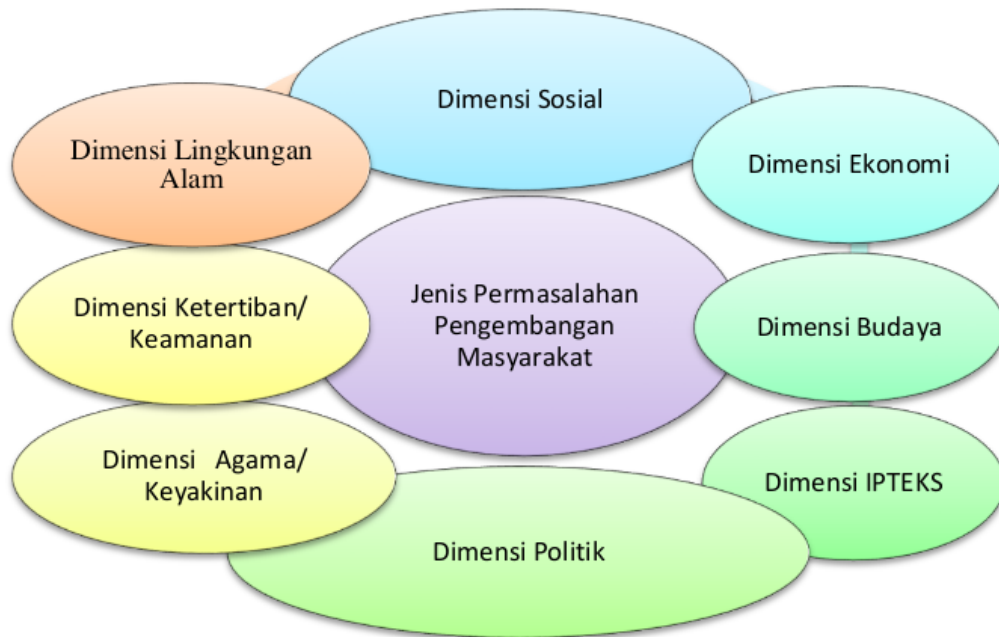
Semua elemen masyarakat menghadapi permasalahan dalam ragam dimensi. Hanya saja, kadar kekuatan pengaruh dari permasalahan berbeda untuk setiap elemen masyarakat atau bahkan bagi individu. Untuk itu, strategi mengatasinya juga tidak sama. Bagi kelompok masyarakat nelayan tangkap di desa pesisir, suatu permasalahan yang dihadapi multi

dimensi. Demikian juga warga masyarakat buruh tani di pedesaan berlahan marginal dan kaum gelandangan di kawasan kumuh (*slum area*) senantiasa menghadapi permasalahan dengan multi dimensi.

Sungguh menarik menyimak hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Kusnadi (2004) tentang pengungkapan seputar polemik kemiskinan nelayan di pedesaan pesisir pantai Jawa Timur. Ia mengemukakan permasalahan bentrokan antar nelayan di Paciran dipicu oleh pengoperasian peralatan tangkap *mini trawl* oleh sebagian nelayan setempat. Pendapatan nelayan tradisional di Paciran terancam menurun karena penggunaan alat tangkap ikan tersebut sangat intensif hingga memungkinkan terjadinya kelangkaan sumberdaya dan kerusakan lingkungan laut setempat. Permasalahan berupa bentrokan ini berlangsung lama. Namun ketegangan sosial antar nelayan akhirnya mereda akibat nelayan tradisional apatis dan putus asa menghadapi jumlah nelayan pemakai *mini trawl* yang terus meningkat. Untuk mempertahankan pendapatan, nelayan tradisional Paciran mengalihkan wilayah tangkapan ke Ujung Pangkah yang kebetulan nelayan tradisional.

Kusnadi (2004) melanjutkan ternyata tidak hanya nelayan tradisional yang masuk ke wilayah perairan Ujung Pangkah, nelayan pengguna *mini trawl* ikut melakukan ekspansi hingga terjadi kondisi 'tangkap lebih'. Ditambahkannya, sebagai reaksi akhirnya antara nelayan tradisional Ujung Pangkah dengan nelayan *mini trawl* Paciran bentrokan dan hal ini tidak dapat dihindari. Bagi nelayan tradisional Ujung Pangkah penggunaan *mini trawl* tidak disukai karena keuntungan besar yang diperoleh hanya untuk sesaat saja tetapi merugikan untuk jangka panjang karena rawan merusak lingkungan dan berdampak terhadap penurunan pendapat di kemudian hari.

Polemik permasalahan nelayan yang diutarakan Kusnadi (2004) tersebut bermulti dimensi khususnya ekonomi, teknologi, sosial dan ketertiban/keamanan. Agar lebih jelas, pada Gambar 18 tertera informasi jenis permasalahan berdasarkan dimensi.



Gambar 18. Jenis Permasalahan Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Ragam Dimensi

Permasalahan sosial merupakan peristiwa yang sering tidak dikehendaki masyarakat. ¹⁵ Permasalahan sosial adalah gejala abnormal yang mengakibatkan berbagai unsur masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga memunculkan serangkaian dampak berikut: kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, penderitaan, ketidakpuasan, kekecewaan, kemarginalan, keterisoliran dan kemiskinan. ¹⁵ Dampak permasalahan sosial dalam selang waktu yang tidak lama

berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan yang berkenaan dengan degradasi kualitas sumberdaya manusia terutama pengembangan kepribadian, karakter dan moral.

Permasalahan sosial termasuk perilaku menyimpang yang dilakukan sebagian warga dipandang tidak sesuai dengan tata nilai dan norma sosial serta moral. Untuk mengetahui kadar kekuatan permasalahan sosial dalam menimbulkan keresahan masyarakat (*social unrest*) dibutuhkan petunjuk yang berfungsi sebagai alat pengukur. Beberapa petunjuk penting terjadinya permasalahan sosial antara lain:

- (1) Perubahan komposisi penduduk.
- (2) Frekuensi perilaku menyimpang.
- (3) Tingkat partisipasi sosial.
- (4) *Simple rates*.
- (5) Nilai *composite indexes*.
- (6) Tingkat intensitas *social distance*.

Petunjuk pengukuran kadar kedalaman atau keparahan permasalahan sosial dalam pengembangan masyarakat paling efektif bila ditetapkan sendiri oleh warga yang bersangkutan. Titik tolak petunjuk tidak terlepas dari kesesuaian antara ukuran nilai dan norma sosial serta moral dengan tindakan atau perilaku yang dianggap menyimpang. Jika terdapat perbedaan maka timbul kesenjangan, ketimpangan, ketidaksesuaian, ketidakharmonisan dan ketidakselarasan yang kemudian dalam frekuensi tertentu mengakibatkan gejala abnormal pertanda terjadinya permasalahan sosial. Beberapa contoh permasalahan sosial yang

rawan ditemukan dalam pengembangan masyarakat tercantum pada Gambar 19.



Gambar 19. Beberapa Permasalahan Rawan Terjadi pada Masyarakat

Dalam proses pengembangan masyarakat biasa ditemukan ragam jenis permasalahan berdasarkan sektor yang membidangi. Beberapa jenis permasalahan sesuai sektor yang penting diperhatikan antara lain: sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor komunikasi, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor perhubungan, sektor pertambangan, sektor lingkungan hidup, sektor kesehatan, sektor ketenagakerjaan, sektor perumahan dan lain-lain. Permasalahan antar sektor yang satu sering terkait dengan permasalahan sektor lain. Permasalahan pengembangan masyarakat pada sektor pertanian selalu memiliki keterkaitan erat dengan

tekanan dari sektor lain misal: sektor perhubungan, sektor perdagangan, sektor komunikasi dan sektor ketenagakerjaan.

Upaya pengembangan perilaku kewirausahaan petani subsisten di suatu desa terpencil dalam pengelolaan usahatani berbasis agribisnis cenderung menghadapi kendala berat bila permasalahan jalan penghubung desa-kota belum terealisasi dengan layak. Hasil peningkatan produksi pertanian yang dipetik petani di desa terpencil akan mubazir bila tidak segera diangkut ke pasar akibat sarana jalan sulit dilalui kendaraan pengangkut. Tidak hanya itu, permasalahan sektor pertanian dalam hal akses masyarakat tani yang lemah terhadap fasilitas pelayanan informasi pasar dan harga produk pertanian juga terkait permasalahan komunikasi yang belum berjalan efektif. Daya tawar petani juga lemah dalam setiap transaksi dengan pedagang atau pihak lain.

Pada setiap sektor, ragam permasalahan pengembangan masyarakat masih bersifat umum. Lebih khusus apabila permasalahan dijabarkan lagi ke sub sektor yang lebih spesifik. Permasalahan di level sektor menjadi akar bagi lahirnya permasalahan lanjutan baik di level sub sektor maupun level yang lebih mikro misalnya kesulitan menghadapi ancaman longsor lahan pada kelompok masyarakat pembudidaya tanaman sayuran organik di desa dataran tinggi. Permasalahan pada setiap sektor makin kompleks bilamana penanganan tidak segera dilakukan. Tingkat keakuratan dan kejelasan dari berbagai permasalahan di setiap sektor dapat memberikan sinyal awal tentang kemungkinan kelancaran pencapaian tujuan.

Sewaktu menganalisis permasalahan pengembangan masyarakat maka perlu disadari pentingnya kepastian dari sudut mana analisis dilakukan. Pengenalan ragam permasalahan dalam proses pengembangan

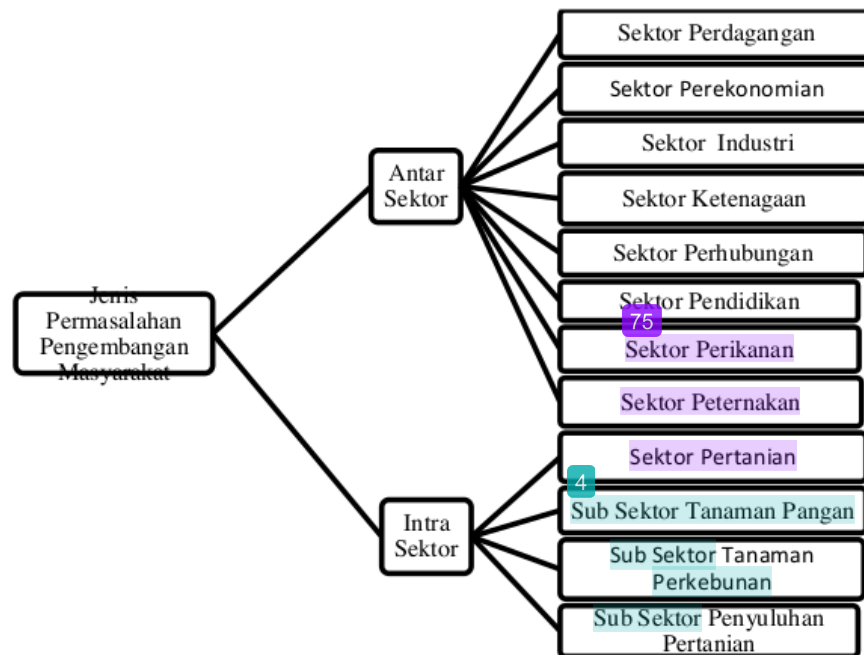
masyarakat membantu dan memudahkan pihak pengembang merumuskan alternatif *problem solving* yang lebih tepat sasaran. Pada permukaan struktur sosial masyarakat, suatu permasalahan yang menonjol bisa saja mengecoh seolah memerlukan solusi yang paling mendesak. Padahal dibaliknya, justru terdapat permasalahan yang lebih urgen dan krusial untuk segera dipecahkan tapi tak terlihat karena bersifat laten. Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan dari lingkup permasalahan masyarakat petani di desa yang kebetulan lokasi geografis berdekatan dengan kawasan industri. Pada masyarakat ini terdapat kerawanan anak putus sekolah. Diduga permasalahan yang paling kuat menyebabkan anak putus sekolah karena keterdesakan ekonomi keluarga yang sampai tidak mampu membayar biaya perlengkapan baju seragam, peralatan tulis, buku pelajaran tas dan uang jajan. Akan tetapi, setelah diteliti ternyata realitas sosial yang ditemukan berbeda dengan dugaan sebelumnya. Ancaman anak putus sekolah bukan dominan dikarenakan keterdesakan ekonomi keluarga namun faktor ketertarikan masuk ke dunia kerja dalam usia dini untuk ikut mencari nafkah agar dapat membantu ekonomi keluarga

12 mempunyai pengaruh yang lebih besar. Oleh karena itu, Endang dan Santosa (2007) mengutarakan pekerja anak dari keluarga petani miskin yang mukim di desa kawasan industri perlu mempunyai *coping strategies* untuk mengatasi permasalahan putus sekolah yakni salah satu solusi yang diterapkan melalui kepandaian si anak membagi waktu; pagi sekolah dan siang sampai sore bekerja. Anak bagi keluarga yang berada di lingkungan industri bukan hanya penerus keturunan saja melainkan padanya juga melekat status sebagai aset bernilai ekonomi untuk masa sekarang dan masa mendatang.

Hasil penelitian Dumasari dan Suwarsito (2011) menunjukkan realitas permasalahan kenaikan harga pakan buatan pabrik telah mengakibatkan petani petambak kesulitan mencapai efisiensi ekonomi dalam pengelolaan usaha budidaya ikan air tawar di pedesaan Purbalingga dan Banyumas. Setelah ditelusuri lebih lanjut, permasalahan tersebut bukan hanya disebabkan kenaikan harga pakan namun erat juga hubungannya dengan ketidakmampuan petani petambak mengolah pakan organik berprotein ikan air tawar. Permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah timbul kesadaran dan kemauan petani petambak mengadopsi teknologi pengolahan pakan organik berprotein berbahan ragam jenis limbah hasil pertanian yang tersedia melimpah di lingkungan desa sekitar. Kemandirian petani petambak dalam mengelola **usaha mikro pakan ikan air tawar** yang **organik** dan **berprotein** timbul setelah dilakukan berbagai metode partisipatif untuk kepentingan penerapan teknologi yang sesuai permasalahan dan kebutuhan. ⁸ **Demikian juga fakta sosial yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Dumasari dan Watemin (2004) menunjukkan responden yang terdiri dari para pengrajin gula kelapa di pedesaan agraris Banyumas memiliki beberapa strategi bertahan untuk menyelesaikan persoalan harga produk yang rendah dan ketergantungan tinggi terhadap pedagang pengepul. Strategi bertahan tersebut termasuk proses pengembangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.**

Kategorisasi jenis permasalahan berdasarkan sektor dipilah dalam dua bagian yakni: intra sektor dan antar sektor. Permasalahan intra sektor merupakan himpunan permasalahan yang berkaitan pada sektor tertentu dan terlihat setelah dijabarkan terinci ke sub sektor berlevel lebih rendah. Adapun permasalahan antar sektor merupakan serangkaian permasalahan

yang muncul akibat tekanan beberapa sektor lain baik secara bersamaan maupun tidak. Pada Gambar 20 diuraikan jenis permasalahan pengembangan masyarakat berdasarkan beberapa sektor dan gejala keterkaitan hubungan satu dengan lainnya.



Gambar 20. Jenis Permasalahan Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Sektor

Ragam jenis permasalahan pengembangan masyarakat memerlukan metode pemecahan. Sederet metode dan pendekatan telah dilakukan selama ini untuk memecahkan permasalahan pengembangan masyarakat. Akan tetapi, hasil yang diperoleh belum maksimal. Setelah permasalahan yang satu dianggap terselesaikan, tiba-tiba muncul permasalahan lain yang tidak kalah penting. Hal ini jangan dipandang sebagai sesuatu ketakwajaran karena disadari dalam pengembangan masyarakat selalu diwarnai permasalahan yang tiada putus.

Solusi atau pemecahan permasalahan pengembangan masyarakat penting dipersiapkan dengan berbagai metode dan pendekatan. Suatu konsensus bersama dengan masyarakat dibutuhkan setiap kali hendak menerapkan suatu metode atau pendekatan pemecahan permasalahan. Secara garis besar dikenal beberapa sifat dari metode atau pendekatan pemecahan permasalahan masyarakat. Beberapa metode atau pendekatan tersebut cenderung bersifat: pencegahan (*preventive*), pembujukan (*persuasive*), penekanan (*repressive*), kekerasan (*coercive*) dan penyembuhan (*curative*). Berbagai pendekatan ini efektif untuk misal: meningkatkan kemandirian, menguatkan posisi tawar dan daya saing, meningkatkan keyakinan, meningkatkan kapasitas diri dan kelompok, perbaikan sarana dan prasarana pendukung, revitalisasi permodalan dan refungsionalisasi kelembagaan lokal.

Hasil penelitian Dumasari, *et al.*, (2008); Dumasari dan Mulia (2009); Dumasari dan Oetami (2013) membuktikan bahwa solusi ragam permasalahan pengembangan masyarakat termasuk dalam menghadapi kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak, biaya adopsi teknologi produksi tinggi, kerawanan pangan rumah tangga petani miskin perlu bersifat adaptif dengan sumberdaya lokal. Mekanisme pengembangan ragam bentuk *coping strategies* dibutuhkan agar mampu meningkatkan kemandirian anggota masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan tepat sasaran. Pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat tanpa diiringi kegiatan penyadaran cenderung akan percuma sebagai solusi bijak. Untuk itu, alternatif solusi strategis yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan masyarakat semestinya berawal dari penyadaran, penguatan kapasitas, pencerahan dan pemberdayaan partisipatif.

BAB VI. PERENCANAAN SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF

Memahami Perencanaan Sosial

Semua kegiatan pengembangan masyarakat yang partisipatif merupakan proses dinamis yang tidak dapat dilakukan secara spontan tanpa perencanaan matang sebelumnya. Tujuan pengembangan masyarakat yang diharapkan tercapai pada rentang waktu tertentu dapat mengalami hambatan yang sulit bilamana dilaksanakan tanpa perencanaan di tahap awal. Mengingat fokus dari pengembangan yang dilakukan adalah masyarakat maka jenis perencanaan yang lebih tepat dilangsungkan sedari dini ialah perencanaan sosial.

Perencanaan termasuk tahap terpenting dari serangkaian kegiatan pengembangan masyarakat, yang perlu dipersiapkan secara sistematis dan matang. Pada hakekatnya, setiap proses perencanaan dilakukan secara sadar tanpa tekanan dan dilangsungkan kontinu dalam suasana kondusif, terorganisir secara sistematis guna memilih dan menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Meskipun demikian, harus disadari perencanaan sosial bukanlah hanya menyangkut keputusan tentang pemilihan dan penetapan kegiatan yang terbaik untuk pengembangan masyarakat. Lebih jauh lagi, perencanaan sosial juga berkenaan dengan proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya dan alokasinya secara optimal. Sumberdaya yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan sosial mencakup: sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal berbentuk materi dan non material seperti bangunan, lahan, sistem

pengairan, sarana transportasi, pasar, pusat pelayanan informasi, kendaraan angkutan, teknologi, sarana pendidikan dan peralatan lain.

Berdasarkan telaah teoritis diketahui bahwa pengertian perencanaan sosial ialah suatu perencanaan dari serangkaian kegiatan terorganisir, ²⁸ yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, dan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri, menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam berbagai tugas pembangunan (Conyers, 1994). Perencanaan sosial diartikan juga sebagai tahap awal dari sederetan kegiatan yang secara sadar dibentuk secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada individu, kelompok dan masyarakat guna turut berpartisipasi menetapkan alternatif solusi bagi upaya mengatasi ragam masalah sosial yang disebabkan ragam perubahan sehingga nantinya keadaan yang baru sesuai kebutuhan dan tujuan yang dikehendaki.

Makna perencanaan sosial sering diartikan orang awam sebagai desain pembangunan yang memuat keputusan tentang penentuan skala prioritas kegiatan yang penting didahulukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam setiap bentuk perencanaan sosial selalu memuat implikasi yang menunjukkan arahan sisi sosial pengembangan masyarakat yang dituju. Penekanan hubungan yang membedakan urutan antar kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan termasuk materi yang diperhitungkan dalam setiap perencanaan sosial.

Perlu disadari, perencanaan sosial muncul karena ketidakpuasan akan hasil pengembangan masyarakat yang kurang optimal sebab sebelumnya telah menggunakan perencanan ekonomi, perencanaan teknologi dan jenis perencanaan pembangunan lain sebagai desain kerja

dominan. Jenis perencanaan ekonomi cenderung diorientasikan untuk pencapaian: kenaikan produksi, pendapatan maksimal, keuntungan ekonomis, produk optimum, pasar strategis, harga terlayak hingga kurang langsung menghiraukan pertalian dengan peningkatan kualitas kehidupan individu pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Banyak program pengembangan masyarakat mubazir tak sampai mencapai tujuan karena perencanaannya belum menyentuh langsung permasalahan dan kebutuhan riil. Oleh sebab itu, para penyusun perencanaan sosial untuk pengembangan masyarakat memerlukan keahlian khusus sebagai *planner of social development*. Tanpa berbekal profesionalisme, planner hanya mampu menyusun perencanaan sosial yang berupa dokumen rencana yang sulit direalisasikan untuk kepentingan warga.

Perencanaan sosial memberi makna luas terhadap keleluasaan waktu yang bersifat kontinu. Prosedur implementasi pengembangan masyarakat yang terdapat dalam perencanaan sosial tidak boleh hanya dilakukan sepotong-sepotong karena mengganggu pencapaian tujuan. Sebuah perencanaan sosial perlu menggunakan sistem rolling plans (rencana berkesinambungan, yang menunjukkan kegiatan pengembangan masyarakat tidak pernah terputus ⁵⁸ dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan dinamika yang berjalan.

Perencanaan sosial mempunyai nilai esensial dalam pengembangan masyarakat. Dalam perencanaan sosial termuat informasi rinci mengenai diagnosa sosial dari masyarakat yang dikembangkan. Penyusunan perencanaan sosial membutuhkan ketelitian dan keluasan wawasan dalam memandang berbagai faktor penentu terkait. Segala kemungkinan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pengembangan masyarakat turut diperkirakan dalam perencanaan sosial. Dengan demikian pengertian

perencanaan sosial berdimensi luas. Namun secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pengertian perencanaan sosial adalah proses awal hasil diagnose permasalahan dan kebutuhan yang sistematis dan terus-menerus diorganisir untuk memberikan arah pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pengembangan masyarakat berdasarkan keputusan terbaik dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya, setiap perencanaan sosial mempunyai fungsi penting sebagai bagian yang melekat pada keutuhan proses pengembangan masyarakat sehingga tidak boleh ditinggalkan.

Metri isi perencanaan sosial perlu disesuaikan dengan tema kebijakan pembangunan masyarakat. Untuk itu, materi dalam perencanaan sosial semestinya disusun fleksibel tapi tetap menjaga konsistensi agar kegiatan berurutan sesuai prioritas. Dalam penyusunan perencanaan sosial dibutuhkan pengorbanan baik waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Mekanisme Perencanaan Sosial

Beberapa aktivitas penting terdapat dalam mekanisme perencanaan sosial. Sebelum memulai tahap penyusunan draft rencana sosial, para perencana sosial sudah memastikan terlebih dahulu melakukan pemantauan (monitoring) dan analisis perubahan sosial. Dari kedua kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh berbagai informasi tentang: eksistensi masyarakat, pergeseran nilai dan norma sosial, migrasi, gerak mobilitas sosial, keberfungsian keluarga, akses warga terhadap pelayanan kesehatan, kesempatan warga dalam memperoleh peluang kerja, kondisi lembaga sosial, dinamika kelompok sosial, kesenjangan sosial dan sebagainya. Berbagai informasi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi penjelasan yang lebih utuh mengenai keadaan sosial dan kecenderungan

yang tengah terjadi seiring perubahan struktur sosial masyarakat. Ragam informasi yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia dan terpercaya. Sumber informasi dapat berupa data sekunder yang telah tersusun dalam dokumen, arsip, catatan, laporan dan lainnya. Informasi lain bisa diperoleh dari sumber data primer yang digali dengan metode survai, metode bola salju bergulir (*snow balling*) atau observasi aktif langsung kepada warga dengan fokus an kegiatan yang dikerjakan.

Dalam mekanisme perencanaan sosial yang terkait dengan pengembangan masyarakat seyogyanya memuat kejelasan mengenai kapan waktu implementasi kegiatan dimulai dan kapan diakhiri. Uraian keterangan limit rentang waktu terinci sesuai tahap kegiatan yang dilakukan secara periodik. Selang waktu yang ditetapkan secara jelas terkadang maju atau mundur karena pelaksanaan terlalu cepat atau malah tertunda. Perbedaan waktu pengembangan masyarakat yang riil dengan yang ditetapkan dalam perencanaan sosial dimaklumi dalam batas tertentu. Artinya, perbedaan yang terjadi tidak terlalu menyimpang jauh dari yang direncanakan. Bagi masyarakat di pedesaan dengan lokasi mukim terpencar memungkinkan implementasi kegiatan pengembangan perilaku produktif melalui pengelolaan usaha mikro berbeda dengan limit waktu yang ditentukan pada perencanaan sosial. Sebagai ilustrasi dapat dicermati dari kasus sewaktu fasilitator yang berperan sebagai pengembang masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengadakan kunjungan kepada kelompok pengrajin gula kelapa dalam rangka penguatan posisi tawar pada setiap transaksi produk dengan berbagai pihak terutama pedagang pengumpul. Kebutuhan waktu yang lebih lama dikarenakan fasilitator perlu mengunjungi pengrajin di beberapa *grumbul* (suatu istilah lokal untuk wilayah dusun di pedesaan

Kabupaten Banyumas) yang berjauhan. Kunjungan dengan metode observasi berpartisipasi membantu fasilitator memperoleh sehimpunan data permasalahan dan kebutuhan yang terpercaya dan nyata sehubungan dengan permasalahan posisi tawar pengrajin yang lemah. Kelengkapan informasi yang terhimpun menjadi bahan pertimbangan berharga dalam tahap perencanaan kegiatan pengembangan masyarakat para pengrajin gula kelapa yang bertujuan untuk penguatan posisi tawar pada saat pemasaran produk.

Distribusi tugas dan tanggungjawab para pengembang masyarakat yang ikut berpartisipasi diuraikan dengan jelas dalam mekanisme perencanaan sosial sesuai kualifikasi dan pengalaman masing-masing. Para pengembang masyarakat sejak awal perencanaan sosial telah mengetahui tugas dan tanggungjawab. Persetujuan antara pengembang masyarakat dengan khalayak sasaran yang sesuai distribusi tugas dan tanggungjawab menjadi pedoman untuk memantapkan susunan peran fasilitator sehingga tidak memunculkan gejolak kesalahpahaman dan kesimpangsiuran ketika melaksanakan kegiatan.

Mekanisme perencanaan sosial tidak luput dari kegiatan pengidentifikasian permasalahan dan kesulitan baik yang tersembunyi maupun nyata yang berpotensi kelak menghambat pelaksanaan pengembangan masyarakat. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Santosa (2004) mengungkapkan permasalahan atau kesulitan tersembunyi sering luput dari perencanaan sosial untuk mengembangkan perilaku adaptif masyarakat di pedesaan tepian hutan agar terlepas dari belenggu kemiskinan yang berlarut. Beberapa permasalahan yang tersembunyi hingga sulit diungkap antara lain menyangkut:

1. Sikap eksploitasi diri dari petani yang berusaha menutupi problem dengan alasan sudah terbiasa hidup serba kekurangan.
2. Moral ekonomi yang sesuai pemikiran Scott (1989) yakni cenderung mengutamakan prinsip dahulukan selamat (*safety first*),
3. Perilaku tidak adaptif terhadap berbagai kegiatan pembaharuan karena beranggapan hal tersebut lebih pantas untuk kaum elit.
4. Struktur sosial yang menempatkan kaum miskin pada posisi terpinggirkan.

Di samping beberapa permasalahan yang sulit terungkap dalam pengembangan masyarakat seperti diuraikan, terdapat juga ragam permasalahan lain yang memerlukan perhatian khusus. Conyers (1994) juga mengemukakan paling tidak ada empat kategori pokok permasalahan yang menjadi kesulitan dalam pengembangan masyarakat yaitu:

- (1) Kesulitan dalam mengisolasi faktor sosial yang berpengaruh menghambat pengembangan masyarakat.

Bagi perencana sosial baik yang junior maupun senior seringkali mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut permasalahan untuk mengisolasi berbagai faktor sosial yang diprediksi mempunyai kekuatan menghambat ataupun merintangi pengembangan masyarakat. Para perencana tak jarang merasa kebingungan menetapkan cara atau strategi yang cocok untuk isolasi faktor sosial agar pengaruhnya tidak sampai meluas merintangi pengembangan masyarakat. Perlu disadari bahwa tanggungjawab mengisolasi faktor sosial penghambat bukan hanya tanggungjawab perencana sosial saja. Akan tetapi, penetapan cara atau strategi yang

lebih tepat dapat didiskusikan bersama dengan anggota masyarakat dan pihak pengembang dalam situasi yang kondusif.

(2) Kesulitan dalam mengukur faktor sosial yang menjadi kendala.

Setelah berhasil mengidentifikasi berbagai faktor sosial yang berpengaruh maka para perencana merancang kekuatan pengaruh dari setiap faktor tersebut. Kemampuan mengukur kekuatan pengaruh faktor sosial tidak dapat dilakukan setiap perencana sosial dengan baik dan tepat. Perencana sosial perlu memiliki kepekaan untuk mengukur kadar kekuatan pengaruh faktor sosial dan hal ini menjadi kesulitan tersendiri yang dapat diatasi dengan keyakinan dan kemampuan belajar dari pengalaman. Standar ukuran untuk jadi patokan penetapan faktor sosial yang menjadi kendala perlu dipersiapkan sehingga mempermudah pihak perencana sosial memilah mana yang termasuk permasalahan dengan daya pengaruh kuat, sedang dan rendah menghambat pengembangan masyarakat.

(3) Kesulitan konflik antara tujuan sosial dengan tujuan ekonomi.

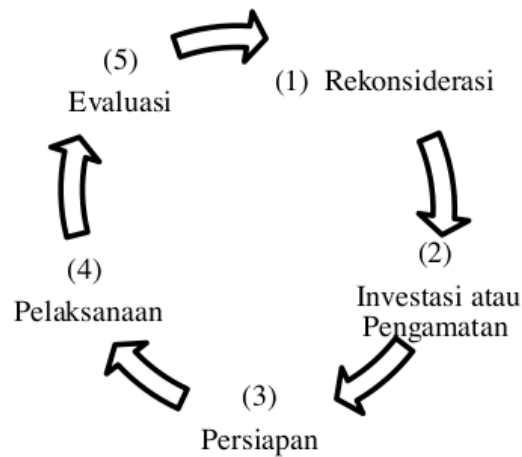
Masalah lain yang lebih mendasar dalam menyusun perencanaan sosial berkenaan dengan kesulitan mengatasi konflik sewaktu terjadi perbenturan antara tujuan sosial dengan tujuan ekonomi. Pada kondisi dilematis ini, pihak perencana sosial kesulitan menetapkan keputusan untuk memprioritaskan apakah tujuan sosial dulu atau tujuan ekonomi yang dicapai. Konflik berupa benturan antara tujuan sosial dengan tujuan ekonomi dalam pengembangan masyarakat dapat teramati dari ilustrasi tentang pembangunan fasilitas pasar produk pertanian yang dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan dengan pembangunan pelayanan pendidikan tingkat menengah atas di desa. Kedua pembangunan tersebut menggunakan dana swadaya masyarakat

dibantu subsidi pemerintah daerah. Tujuan pembangunan fasilitas pasar produk pertanian ingin membantu petani agar lebih mudah memasarkan hasil panen dengan harga layak sehingga dapat memperoleh kenaikan pendapatan. Sementara, tujuan sosial sehubungan dengan kepentingan pembangunan pelayanan pendidikan menengah atas juga perlu dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar tidak terhenti pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Akan tetapi, kedua tujuan ini tidak mungkin tercapai dalam waktu bersamaan karena keterbatasan biaya pembangunan. Benturan tujuan ekonomi dengan tujuan sosial akan terselesaikan bilamana dicapai Konsensus bersama masyarakat untuk konsisten menetapkan tujuan yang mana diantara keduanya yang lebih dulu diprioritaskan sesuai kebutuhan warga. Konsensus berlangsung sebelum tahap perencanaan.

(4) Kesulitan konflik antara tujuan sosial dengan idealisme politik.

Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat acapkali terjadi penyisipan idealisme politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut rawan karena dapat menimbulkan penyimpangan tujuan. Masyarakat yang tengah dikembangkan dipandang sasaran strategis bagi penyebaran idealisme politik sehingga hal ini perlu segera diantisipasi untuk menghindari pencampuran antara tujuan sosial yang ingin dicapai dengan sisipan idealisme politik. Para perencana dan pengembang sosial sejak dini perlu memberi aba-aba kewaspadaan kepada warga agar tak sampai terpengaruh penetrasi idealisme politik yang menyesatkan bagi kelancaran pelaksanaan proses pengembangan masyarakat.

Dalam mekanisme perencanaan sosial yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat terdapat beberapa rambu yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh berbagai pihak terkait. Batasan rambu yang dimaksud berfungsi sebagai kendali dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat. Pada Gambar 21 dapat terlihat alur mekanisme perencanaan sosial untuk pengembangan masyarakat sesuai pemikiran Burger and Duvel (1981).



Gambar 21. Mekanisme Perencanaan Sosial Diadaptasi dari Burger and Duvel (1981)

Setiap tahap dari mekanisme perencanaan sosial yang tercantum pada Gambar 21 dapat dijelaskan dalam rincian kegiatan yang lebih spesifik. Pada setiap tahap perlu dilakukan kegiatan berikut:

- (1) Perencanaan rekonsiderasi merupakan tahap pengumpulan data dan fakta sosial untuk mempertimbangkan berbagai informasi mengenai:

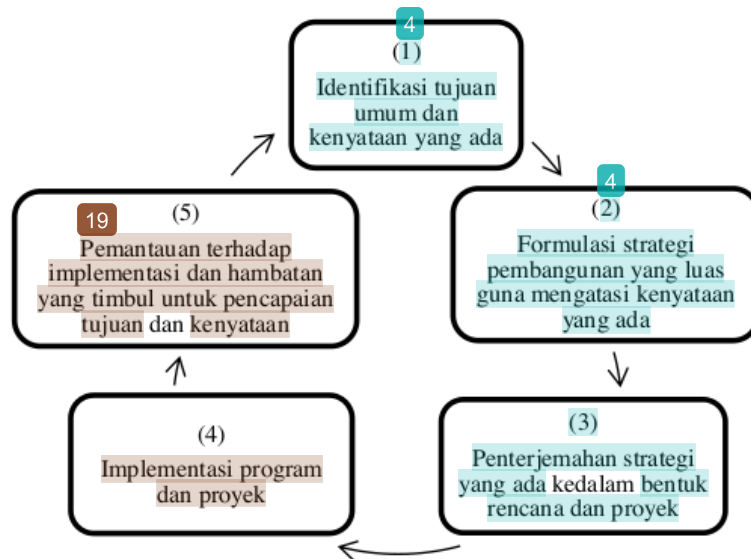
- a. Cakupan permasalahan sosial yang tengah terjadi.
 - b. Liputan kebutuhan untuk pengembangan masyarakat.
 - c. Penetapan tujuan umum dan penetapan skala prioritas kebijakan pengembangan masyarakat.
 - d. Memerinci tujuan umum menjadi tujuan khusus sesuai skala prioritas yang ditetapkan secara partisipatif dengan masyarakat.
 - e. Penentuan peran dan tanggungjawab personal sesuai kebijakan pengembangan masyarakat yang ditetapkan.
 - f. Distribusi lokasi dan kegiatan personal secara spesifik sesuai keahlian masing-masing.
 - g. Penetapan jadwal kegiatan sebagai indikator limit waktu pencapaian tujuan.
 - h. Menyusun ragam alternatif pendekatan dan model untuk pelaksanaan pengembangan masyarakat.
- (2) Perencanaan investigasi atau pengamatan merupakan tahap pengumpulan data dan fakta lanjutan untuk menemukan dan memperoleh kejelasan informasi mengenai:
- a. Potensi dan keadaan riil sumberdaya alam misalnya: kesuburan lahan, ketersediaan air, iklim, curah hujan, lingkungan alam, fauna dan flora.
 - b. Potensi dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat seperti nilai dan norma sosial, adat tradisi, kelembagaan lokal, pasar, jenis dan hasil produksi komoditas lokal, interaksi sosial antara sesama warga masyarakat, kemungkinan konflik, modal sosial dan kearifan lokal.

- c. Melakukan evaluasi atau penilaian terhadap alternatif pendekatan dan model pengembangan masyarakat.
- (3) Perencanaan persiapan merupakan tahapan penting guna menyiapkan kegiatan secara matang dan sistematis sehingga pada tahap ini perlu melakukan beberapa kegiatan berikut:
 - a. Menetapkan tujuan pokok sesuai prioritas yang paling penting dicapai terlebih dahulu.
 - b. Menetapkan pendekatan dan model pengembangan masyarakat sesuai hasil penilaian kelayakan dan ketepatan teknik pemecahan masalah sesuai kondisi riil.
 - c. Menyiapkan kesesuaian pemikiran tim pengembang sosial sebagai fasilitator tentang ragam kegiatan pengembangan masyarakat.
 - d. Melakukan pendekatan persuasif terhadap tokoh masyarakat.
 - e. Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat untuk menetapkan kalangan warga mana yang lebih dahulu digerakkan untuk turut aktif berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.
 - f. Melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat dalam penyusunan kegiatan.
 - g. Menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan pengembangan masyarakat.
- (4) Perencanaan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sesuai agenda yang dijadwalkan kecuali ada perubahan atas permasalahan dan kebutuhan warga.

- (5) Tahap perencanaan evaluasi dilakukan untuk memenuhi beberapa kegiatan berikut:
- a. Merancang rencana teknik evaluasi yang digunakan
 - b. Menyusun tolok ukur evaluasi.
 - c. Menyusun survai pengembangan masyarakat.
 - d. Membuat rencana teknik pengolahan data dan analisis hasil survai.
 - e. Menyusun laporan pengembangan masyarakat.
 - f. Mengidentifikasi saran dan kritik bagi pertimbangan pengembangan masyarakat periode berikutnya.
 - g. Menyusun rencana pendampingan kemandirian masyarakat pasca pengembangan usai dilakukan.

Mekanisme perencanaan sosial dapat berlangsung lebih efektif bilamana perencanaan sosial memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai sumber data. Kemampuan empati dan adaptasi perencana sosial juga dibutuhkan untuk memudahkan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan sosial. Berbagai faktor pendukung dan penghambat baik dari dimensi sosial budaya, ekonomi dan politik yang mempunyai kekuatan pengaruh terhadap pengembangan masyarakat menjadi catatan penting pada tahap penyusunan perencanaan sosial.

Penetapan mekanisme perencanaan sosial untuk pengembangan masyarakat menurut Conyers (1994) tidak dapat dilakukan secara mendadak karena naskah perlu dilengkapi berbagai informasi pendukung. Pada Gambar 22 dapat diamati mekanisme perencanaan sosial (Conyers, 1994).



Gambar 22. Mekanisme Perencanaan Sosial Diadaptasi dari Conyers (1994)

Kedua mekanisme perencanaan sosial yang tertera pada Gambar 21 dan 22 menunjukkan kegiatan pengumpulan data memegang peran penting untuk menghasilkan draft rencana yang akurat. Kegiatan pengumpulan data memerlukan keseriusan dan ketelitian khusus pihak perencanaan sosial. Beberapa teknik pengumpulan data untuk kepentingan perencanaan sosial pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Survei.
- 2) Sensus.
- 3) Pemanfaatan data sekunder yang sudah tersedia.
- 4) Observasi partisipatif.

- 5) Wawancara dengan anggota masyarakat.
- 6) Wawancara dengan tokoh masyarakat.
- 7) *Focus group discussion* (FGD) dengan berbagai komponen masyarakat.

Berbagai Ciri Perencanaan Sosial Partisipatif

Perencanaan sosial partisipatif mencirikan keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dan diposisikan sebagai subjek bukan objek belaka. Beragam masalah akan ditemukan saat mengadakan perencanaan sosial partisipatif. Deretan masalah tersebut tak perlu dihindari namun yang lebih penting dapat diselesaikan dengan bijak dan arif. Bagi seorang perencana, menggerakkan masyarakat untuk mau bersedia ikut aktif dalam setiap tahapan kegiatan perencanaan sosial bukan hal mudah dilakukan. Tidak jarang terdapat ² **kesenjangan komunikasi dan interaksi sosial antara pihak perencana dengan warga** masyarakat.

Kesenjangan komunikasi dapat dipicu tindakan pihak perencana saat menggunakan bahasa yang sulit dimengerti warga. Penyampaian beberapa pertanyaan sewaktu wawancara atau diskusi tanpa disadari justru memunculkan kecurigaan warga. Bahkan penampilan perencana yang terkesan elite hanya membuat warga kian merasa asing bahkan jauh sehingga sulit mengemukakan permasalahan dan kebutuhan riil yang dialami sehari-hari. Sebagai konsekwensi, partisipasi warga melemah bahkan tak jarang menimbulkan sikap antipasti, tidak responsif dan seolah menghindar dari kesempatan berinteraksi dengan pihak perencana.

Berbagai permasalahan perencanaan sosial partisipatif sesungguhnya dapat diatasi dengan melalui cara mereduksi atau menjembatani jurang kesenjangan antara warga dengan pihak perencana.

Beberapa cara yang potensial ditempuh guna menjembatani kesenjangan komunikasi dan interaksi yang terjadi mencakup:

- (1) Melaksanakan pendekatan persuasif lebih awal dengan para tokoh masyarakat sebagai informan kunci. Cara ini mendekatkan perencana sosial dengan warga melalui perantara tokoh masyarakat yang turut memperkenalkan dan menyampaikan informasi hal ihwal maksud dan tujuan hadir bergabung dengan warga setempat.
- (2) Perencana bersedia berintegrasikan atau membaur secara sosial dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan yang berlangsung pada struktur sosial masyarakat dan berkomitmen menanggalkan segala atribut perbedaan paling tidak selama proses integrasi.
- (3) Perencana berempati dan beradaptasi dengan budaya lokal masyarakat. Penguasaan bahasa lokal khususnya beberapa istilah penting untuk sapaan perlu dilakukan perencana sosial hingga ada kedekatan dengan warga dari sisi tutur kata.
- (4) Mengadakan pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini dimulai dari memotivasi warga agar ikut memberikan sumbangsih pemikiran khususnya untuk mengungkap permasalahan dan kebutuhan riil yang dialami. Selain itu, warga juga turut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang penetapan skala prioritas tujuan pengembangan masyarakat yang lebih mendesak dilakukan sesegera mungkin. Pendekatan *bottom up* memposisikan warga bukan sebagai objek melainkan subjek yang ikut menyusun perencanaan sosial. Meskipun demikian, perlu disadari pendekatan ini baru efektif dilakukan bila warga telah menunjukkan kemauan dan kesediaan diajak aktif dalam perencanaan sosial.

- (5) Mengembangkan pendekatan emik yakni menggali data dan keputusan yang langsung bersumber dari persepsi, pandangan, pemikiran dan wawasan masyarakat. Pendekatan emik bila dimanfaatkan dengan tepat akan efektif untuk menumbuhkan sekaligus menguatkan rasa memiliki warga terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Rasa memiliki selanjutnya menuntut tanggungjawab warga untuk berpartisipasi aktif menyukseskan penyusunan perencanaan sosial untuk pengembangan masyarakat.

2

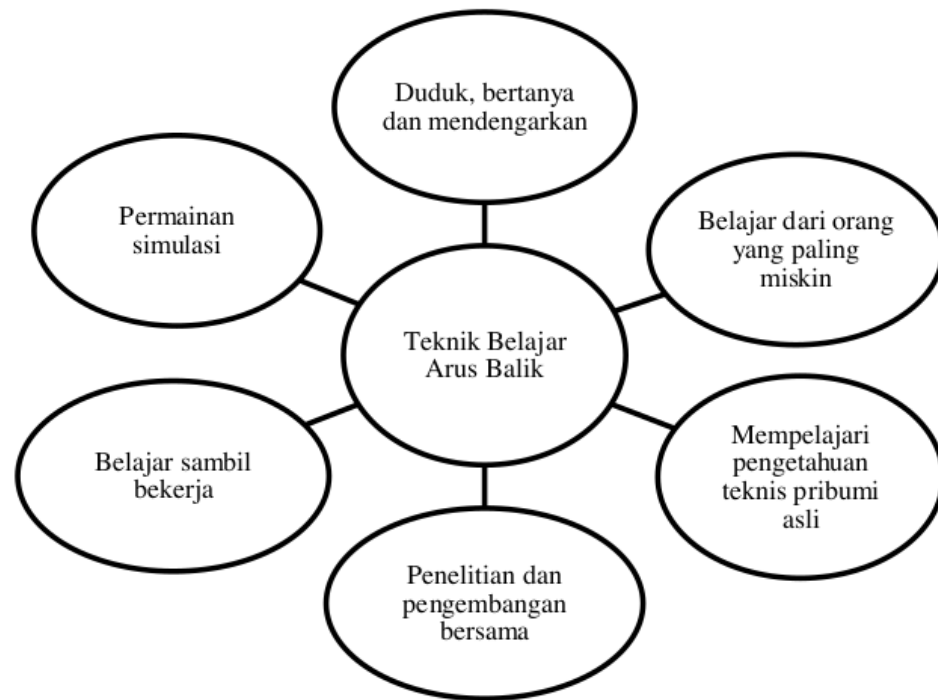
Beberapa cara yang dijelaskan mempunyai manfaat besar bagi perencanaan sosial partisipatif. Untuk menyatakan suatu perencanaan sosial telah bercorak partisipatif maka ada beberapa ciri yang mewarnai yaitu:

- (1) Kesenjangan komunikasi dan interaksi sosial antara perencanaan dengan warga teratasi dengan berbagai pilihan cara atau pendekatan yang tepat.
- (2) Kandungan materi yang tersusun dalam perencanaan sosial memenuhi harapan masyarakat.
- (3) Cakupan ide pokok pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat bersumber dari realitas yang benar-benar tercetus secara sukarela pernyataan warga. Pernyataan masalah, kebutuhan dan ide pengembangan masyarakat bukan tercetus karena tekanan atau paksaan pihak lain.
- (4) Masyarakat sungguh-sungguh terlibat aktif dalam proses perencanaan sosial sejak awal sampai akhir.

- (5) Tujuan pengembangan masyarakat yang terinci dalam perencanaan sosial disetujui oleh anggota masyarakat sesuai skala prioritas yang diputuskan bersama untuk memecahkan masalah yang mendesak.
- (6) Para tokoh masyarakat sebagai pihak *opinion leader* memberikan dukungan moril terhadap tujuan dan rangkaian kegiatan pengembangan masyarakat yang tersusun dalam perencanaan sosial.
- (7) Masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan sosial.
- (8) Perencanaan sosial mendapat legitimasi dari komponen masyarakat. Legitimasi berarti ada pengakuan atau persetujuan yang disahkan atas berbagai ide dan inisiatif pengembangan masyarakat yang termuat sejak tahap perencanaan sosial. Keberadaan legitimasi menjadi suatu pertanda kegiatan yang terinci pada perencanaan sosial telah siap dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai unsur atau komponen masyarakat di suatu wilayah tertentu.

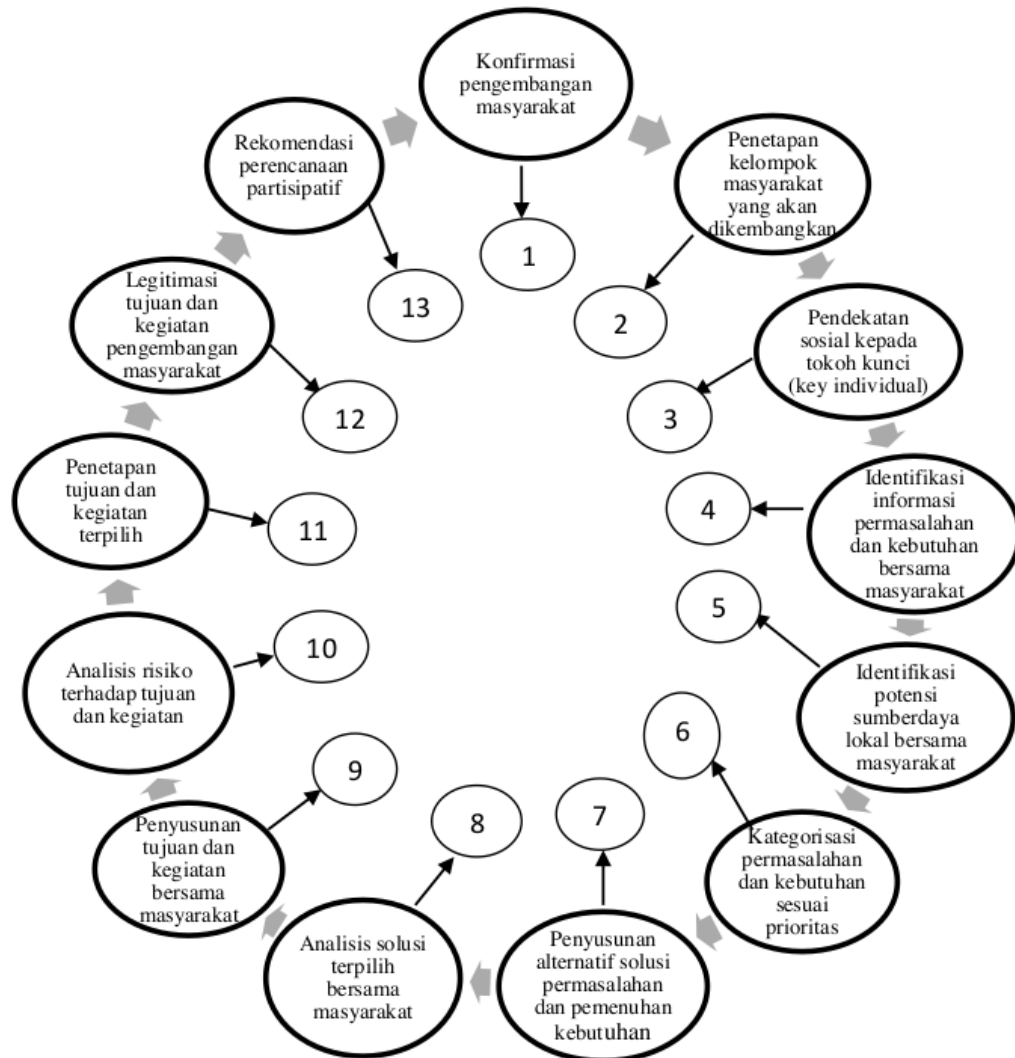
Chambers (1987) menjelaskan pembangunan desa termasuk masyarakat miskin yang berdiam di dalam wilayahnya sudah waktu semestinya diawali dengan paradigma perencanaan partisipatif yang bertolak dari belakang. Paradigma ini ditandai dengan proses belajar yang terbalik. Para perencana dan pengembang sebagai agen pembaharuan masyarakat sudah tidak lazim lagi membawa buah pikiran sendiri tanpa dukungan data riil ke tengah-tengah warga yang menjadi khalayak sasaran. Sebuah perencanaan pengembangan masyarakat yang partisipatif akan dimulai dari gerakan dan sikap mendahulukan yang terakhir melalui

proses belajar terbalik seperti diungkap Chambers (1987). Menurut penjelasannya proses belajar terbalik dapat ditempuh melalui enam cara yang tercantum pada Gambar 23.



Gambar 23. Perencanaan Partisipatif dengan Teknik Belajar Arus Balik (Chambers, 1987)

Proses belajar terbalik seperti yang tercantum pada Gambar 23 merupakan media efektif guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan partisipatif. Ketersediaan data yang lengkap dan terpercaya merupakan kebutuhan pokok dalam perencanaan partisipatif. Proses perencanaan partisipatif bagi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang berbentuk siklus seperti teramati pada Gambar 24.



Gambar 24. Siklus Perencanaan Partisipatif

Penyusunan perencanaan sosial partisipatif tidak dapat dilakukan oleh satu disiplin ilmu saja. Perencanaan sosial yang integratif

memerlukan dukungan analisis dari berbagai disiplin ilmu terkait. Informasi yang disumbangkan dari setiap disiplin ilmu bermanfaat untuk saling melengkapi dalam menyatukan informasi tentang lingkup permasalahan, kebutuhan, tujuan, program kegiatan, kemungkinan risiko dan penetapan tim pelaksana pengembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Laporan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2009-2013. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia. Jakarta.

Agusta, Ivanovich. 2000. Asumsi-asumsi Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia (Assumptions on People Empowerment Programs in Rural Indonesia). Artikel Ilmiah Dimuat pada Jurnal Mimbar Sosek Volume 12 Nomor 3. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

:

AMA. 1993. Effective Communication and Bussiness. American Management Association Inc. USA.

Burger, P. J., and Duvel, G. H., 1981. An Operational Model Programmed Agricultural Development. In Crauch Bruce R. and Shaukariah Chamala (ed) 1981. Extension Education and Rural Development. John Wiley and Sons. Chuchester, New York, Brisbane, dan Toronto.

Cernea, Michael M., 1985. Putting People First: Sociological Variables in Rural Development; Sociological Variables in Rural Development. A World Bank Publication. Oxford University Press. New York.

Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Penerbit LP3ES. Jakarta.

Chambers, Robert. 1996. PRA (*Participatory Rural Appraisal*); Memahami Desa Secara Partisipatif. Penerbit Kanisius Oxfam. Yogyakarta.

Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Dumasari dan Sulistyani Budiningsih. 2001. Kajian Sistem Agribisnis Usahatani Ramah Lingkungan di Pedesaan Agraris. Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Dumasari dan Watemin. 2004. Kajian Gender terhadap Strategi Bertahan pada Rumahtangga Petani Pengrajin Gu⁸ Kelapa di Pedesaan Agraris. Laporan Hasil Penelitian Studi Gender. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Dumasari dan Watemin. 2006. Kajian Gender tentang *Trend* Pergeseran Kerja Produktif dari Pertanian ke Non Pertanian dan Kontribusinya terha¹⁶ Rumahtangga Buruh Tani. Laporan Hasil Penelitian Kompetitif pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Dumasari, Watemin dan Sumadi Sudrijat. 2006. Model Pemberdayaan Wanita Tani Miskin melalui Pengembangan Teknologi Modifikasi Produk Limbah Industri Pertanian menjadi *Tourism Souvenir Goods* Khas Pariwisata Banyumas. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Proyek P2IPT-DIKTI. Jakarta.

Dumasari dan Watemin. 2007. Pemetaan Sistem Usaha Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Spesifik Lokasi dan Berwawasan Lingkungan di Pedesaan Kawasan Karst. Laporan Hasil Penelitian Kompetitif pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Dumasari, ⁵ Naimah, Asep Daud Kosasih dan Regowo Bayu Pamungkas. 2008. Mekanisme *Coping Strategies* Rumahtangga Petani Miskin dalam Mengatasi Permasalahan Kenaikan dan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Laporan Hasil Penelitian Kompetitif. LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

⁵
Dumasari dan Dini Siswani Mulia. 2009. *Problem Focus Coping* Petani Petambak Ikan Air Tawar sebagai Solusi Atas Permasalahan Adopsi Teknologi Produksi Pertanian Berbiaya Tinggi. Hasil penelit¹⁷ yang dipublikasikan melalui Jurnal Saintek Edisi Oktober 2009. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. ISSN 0852-1468. Purwokerto.

¹⁷
Dumasari dan Suwarsito. 2010. Pemberdayaan Petani Miskin melalui Pengembangan Usaha Mikro Pakan Ikan Air Tawar Berprotein dari Limbah Hasil Pertanian dengan Teknologi Subti⁵si Bahan. Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional. DP2M DIKTI-LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Dumasari dan Oetami, D.H., 2013. *Coping Strategies* Petani Miskin dalam Penyelesaian Permasalahan Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian Kompetitif. LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Freire, Paulo. 1984. Pendidikan, Pembebasan, Perubahan Sosial. Penerbit PT. Sangkala Pulsar. Jakarta.

Yami, Yujiro dan V.W., Ruttan. 1985. *Induced Innovation Model Of Agricultural Development*. The John Hopkins University Press. London.

Ife, Jim M., 1995. Community Development; Creating Community Alternatives Vision. Analisis and Practice. Longman. Melbourne.

Raf, A., Sonny. 2006. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Kusnadi. 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Pondok Edukasi Pokja Pembaruan. Yogyakarta.

Mardikanto, Totok. 1992. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Mayo, Virginia. 1994. Community Work in Christopher Hanvey and Terry Philpot (eds), *Practising Social Work*. Routledge. London.

Midgley, James. 1995. *Social Welfare in Global Context*. Sage Publication. London and New Delhi.

Payne, Malcolm. 1995. *Social Work and Community Care*. McMillan. London.

Sajogyo. 1989. Permasalahan Kemiskinan di Pedesaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Santosa, Imam. Tri Rini Windyastuti dan Rawuh Edy Priyono. 2002. Strategi Survival Rumahtangga Miskin di Pedesaan Agraris. Hasil Penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

11

Santosa, Imam. 2004. Pemberdayaan Petani Tepian Hutan melalui Pembaharuan Perilaku Adaptif. Disertasi pada Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Santosa, Imam. Jarot Santosa dan Slamet Rosyadi. 2005. Model Pengembangan Hutan Cadangan Pangan melalui Pendidikan Non Formal Partisipatif untuk Penanganan Kerawanan Pangan Rumah tangga Petani Tepian Hutan. Laporan Hasil Penelitian. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Santosa, Imam. Jarot Santosa dan Slamet Rosyadi. 2006. Model Pengembangan Hutan Cadangan Pangan melalui Pendidikan Non Formal Partisipatif untuk Penanganan Kerawanan Pangan Rumah tangga Petani Tepian Hutan. Laporan Hasil Penelitian. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Santosa, Imam. Rin Rostikawati dan Jarot Santosa. 2006. Model Transmisi Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Petani di Pedesaan Tepian Hutan dalam Pengembangan Diversifikasi Usaha Sulaman Bordir *Unique Motive Design*. Jurnal Siasat-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 16. Badan Penerbit Universitas Islam Riau.

5

Santosa, Imam dan Rin Rostikawati. 2009. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan Kawasan Agrowisata N DI melalui Livelihood Diversification Berbasis Sumberdaya Lokal. Laporan Penelitian Strategis Nasional. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

38

Saragih, Bungaran. 2001. Suara dari Bogor. Membangun Sistem Agribisnis. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.

49

Scott, James C., 1989. Moral Ekonomi Petani. LP3ES. Jakarta.

Sitorus, Felix, MT., Endriatmo Soetarto, Djuara P., Lubis, Ivanovich Agusta dan Rachmat Ambudy. 2004. Agribisnis Berbasis Komunitas. PT. Sang Hyang Seri. Pusat Kajian Agraria. Lembaga Penelitian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

30

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soemardjan, Selo. 1962. *Social Changes in Yogyakarta*. Cornell University Press. New York.

Sudrajat, Ajat. 2006. Pola Nafkah Ganda: Strategi *Coping* Pekerja Sektor Informal dalam Mengatasi Kemiskinan. Dimuat dalam Jurnal Peksos Volume 5 Nomor 34 Juni 2006. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. *Bandung*.

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. LSP-STKS. Bandung.

37

Todaro, M.P., 1994. *Economic Development*. 5Th edition. Longman. New York. London.

Twelvetreets. 1991. *Community Work*. Basingstoke. Palgrave. MacMillan.

10

Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

INDEKS**A**

Adaptasi 6, 105 109, 111

Agraris 19, 22, 84, 93

Analisis 51, 68, 72, 78, 86, 91, 99, 108, 116

B

Bargaining 22, 41

Bersaing 44, 118

F

Fungsi 4, 10, 12, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 47,
55, 57, 63, 66, 71, 74, 75, 85, 88, 89, 95, 99, 105

P

Partisipasi 1, 13, 19, 24, 27, 32, 34, 39, 43, 46, 52, 59, 60, 65, 72, 76, 89,
101, 107, 109, 110, 112

S

Strategis 1, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 66, 98, 104

Sumberdaya Lokal 5, 11, 34, 36, 39, 40, 44, 53, 58, 72, 79, 82, 93, 120

Sumberdaya Manusia 6, 12, 14, 19, 23, 29, 32, 38, 44, 53, 58, 73, 77, 79,
89, 96, 104

BIODATA PENULIS

Dumasari lahir di Sigalangan pada Tanggal 10 Mei 1966. Beliau adalah putri pertama Ibu H. Kamisyah Siregar dengan Bapak H. Payungan Baginda Oloan Tanjung. Penulis melewati masa kecil sampai remaja di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri V Padang Sidempuan. Pendidikan lanjutan pertama di SMP Negeri 1 Padang Sidempuan. Pendidikan lanjutan atas dilalui di SMA Negeri II Padang Sidempuan. Dari Tahun 1985 sampai 1990 penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi Komunikasi dan Penyuluhan di Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selesai lulus dari Strata I Tahun 1990, penulis langsung melanjutkan pendidikan Strata II yang ditempuh dari Tahun 1991 hingga 1995 pada Program Studi Ilmu Penyuluhan dan Pembangunan (PPN), Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menikah pada Tahun 1993 dengan Prof. Dr. Imam Santosa, M.Si kemudian dikarunia satu putra Baginda Khalid Hidayat Jati dan dua putri Dinda Dewi Aisyah serta Angg41 Chairiah. Dari Tahun 1997 hingga sekarang, penulis aktif sebagai staf pengajar pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selain itu, penulis juga turut berpartisipasi aktif mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan LPPM UMP. Berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian dengan tema pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan telah dilaksanakan penulis bersama rekan sejawat. Selama ini, penulis juga telah mendapat kepercayaan dari beberapa instansi dalam rangka pelaksanaan beberapa kegiatan penelitian 55 pengabdian seperti DIKTi dan Toyota Foundation. Penulis juga aktif mempublikasikan hasil penelitian pada berbagai pertemuan ilmiah seminar/workshop nasional dan internasional. Beberapa tulisan beliau juga kerap dimuat pada jurnal nasional.

Pengembangan Masyarakat Partisipatif (Buku 1)

ORIGINALITY REPORT

14%	13%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	5%
2	jurnal.unswagati.ac.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
5	jurnal.fp.uns.ac.id Internet Source	<1%
6	id.scribd.com Internet Source	<1%
7	nourmasr.blogs.uny.ac.id Internet Source	<1%
8	media.neliti.com Internet Source	<1%
9	positori.umsu.ac.id Internet Source	<1%
10	pt.scribd.com Internet Source	<1%

11	id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
14	ejournalwiraraja.com Internet Source	<1 %
15	jurnal.univrab.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.uui.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.urecol.org Internet Source	<1 %
18	ocw.upj.ac.id Internet Source	<1 %
19	es.scribd.com Internet Source	<1 %
20	Ilyas Ilyas. "STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI MASYARAKAT KELOMPOK TANI QORYAH TOYYIBAH DI KALIBENING KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA", INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication), 2016 Publication	<1 %

21	Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
23	docplayer.info Internet Source	<1 %
24	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
25	duniaalay.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	J.E. Holt, D. Schoorl. "Technological change in agriculture—The systems movement and power", Agricultural Systems, 1985 Publication	<1 %
27	repository.ump.ac.id Internet Source	<1 %
28	nrhayatinl.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	derryfahrizal.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	randriyanty.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
32	siteresources.worldbank.org Internet Source	<1 %

33	anzdoc.com Internet Source	<1 %
34	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
35	Empowerment in Organizations, Volume 4, Issue 1 (2006-09-19) Publication	<1 %
36	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to University of Central England in Birmingham Student Paper	<1 %
38	widyakarya.ac.id Internet Source	<1 %
39	documents.worldbank.org Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
41	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Universidade de Évora Student Paper	<1 %

44	ramadhantahun2013.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
46	docobook.com Internet Source	<1 %
47	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
48	mengenang27juli.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
50	www.theseus.fi Internet Source	<1 %
51	La Rovere, R.. "Co-evolutionary scenarios of intensification and privatization of resource use in rural communities of south-western Niger", Agricultural Systems, 200503 Publication	<1 %
52	riskaputridwiutami.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	www.policy.hu Internet Source	<1 %
54	herliandika42.blogspot.com Internet Source	<1 %

55	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
56	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
57	ibnugangga.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	samudra.news Internet Source	<1 %
59	ejournal-balitbang.kkp.go.id Internet Source	<1 %
60	gudangnyaaobatalami.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
62	news.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.neliti.com Internet Source	<1 %
64	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
65	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
66	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

cahyarbsd.blogspot.com

67	Internet Source	<1 %
68	autarabdillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
70	www3.itu.int Internet Source	<1 %
71	jopianustumanggor.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
73	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
74	Submitted to Murdoch University Student Paper	<1 %
75	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off